

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
38	No. 38 Tahun 1979 29 Oktober 1979	Peringatan Menyongsong Abad ke XV Hijriyah.		
39	No. 39 Tahun 1979 1 Nopember 1979	Pembentukan Panitia Penanggulangan Penderita Kusta di Dati I dan Dati II.		
<b>TAHUN 1980</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1980 20 Februari 1980	Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 23	Dicabut dg Permen No.5 Th.1996
2	No. 2 Tahun 1980 10 Maret 1980	Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Kelurahan.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 65	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
3	No. 3 Tahun 1980 17 Juni 1980	Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 71	Dicabut dg Permen No.1 Th.1990
4	No. 4 Tahun 1980 28 Agustus 1980	Pedoman Penyusunan Rencana Kota.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : ..	Dicabut dg Permen No.2 Th.1987
5	No. 5 Tahun 1980 16 Oktober 1980	Persyaratan & Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Wilayah Kota Administratif (Walikota) dan Kepala Wilayah Kecamatan (Camat).	Himp. Peraturan ttg Pemerintahan di Daerah Hal. 516 - 519	*
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1980 12 Januari 1980	Penataran Type A Tingkat Instansi Pusat Depdagri Angkatan X.	L L : 7 hal	
2	No. 2 Tahun 1980 12 Januari 1980	Penulisan Karya Ilmiah Pembangunan Politik Dalam Negeri.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 83	
3	No. 3 Tahun 1980 16 Januari 1980	Pembentukan Team Fact Finding Perencanaan Pembangunan Timor Timur Tahun 1980/1981.	L L :	Tidak Berlaku lagi
4	No. 4 Tahun 1980 23 Januari 1980	Pembentukan Panitia Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Seluruh Indonesia.	L L :	
5	No. 5 Tahun 1980 23 Januari 1980	Penghapusan Inventarisasi dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Daerah milik Negara.	L L :	
6	No. 6 Tahun 1980 23 Januari 1980	Pengangkatan Penatar Type B dan Pembantu Penatar Type A Tingkat Instansi Pusat Depdagri.	L L :	
7	No. 7 Tahun 1980 23 Januari 1980	Penataran Type B Tingkat Instansi Pusat Depdagri pada Sekretariat Jenderal DDN.	L L :	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
8	No. 8 Tahun 1980 23 Januari 1980	Pembentukan Panitia Kerja Manual Administrasi Keuangan Daerah (PUOD)	L L :	
9	No. 9 Tahun 1980 23 Januari 1980	Penghapusan Inventarisasi dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas milik Negara	L L :	
10	No.10 Tahun 1980 23 Januari 1980	Pembentukan Team Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Proyek Pembangunan Sektoral Depdagri	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 91	
11	No.11 Tahun 1980 23 Januari 1980	Penyelenggaraan Kursus Land Use Lanjutan Tingkat I Angkatan XI	L L :	
12	No.12 Tahun 1980 23 Januari 1980	Pembentukan Team Penyusunan pedoman Tata Kerja Bagi semua Satuan Organisasi Depdagri dan Wilayah Daerah	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 99	
13	No.13 Tahun 1980 24 Januari 1980	Penetapan kembali pejabat-pejabat yang diberi wewenang menandatangani DIK DIP dan Usulan revisi serta Anggaran Belanja Tambahan Depdagri	L L : 4 hal	
14	No.14 Tahun 1980 24 Januari 1980	<b>SKB Mendagri, Men. PU, Menhub ttg Penetapan Kelas - kelas Jalan.</b>	L L :	
15	No.15 Tahun 1980 24 Januari 1980	Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek Penataran P4 Type A Tingkat Kantor Pusat Depdagri.	L L :	
16	No.16 Tahun 1980 25 Januari 1980	Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan Kursus Juru Ukur Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria.	L L :	
17	No.17 Tahun 1980 25 Januari 1980	Penggantian Pimpinan dan penunjukan Kembali Bendaharawan Proyek Kursus Kader Pimpinan (SUSKAPIM) Hansip DKI. Jakarta.	L L :	
18	No.18 Tahun 1980 31 Januari 1980	Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek Inventarisasi peraturan2 ttg Catatan Sipil Depdagri a.n. H. Mochtar Hasan, SH.	L L :	
19	No.19 Tahun 1980 31 Januari 1980	Mengakhiri Penugasan selaku Ketua Penyelenggaraan Penataran Type A Tingkat Instansi Pusat a.n. Drs. Aly Mansur menunjuk sebagai gantinya Drs. Subagio Saputputro.	L L :	
20	No.20 Tahun 1980 31 Januari 1980	Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Pengarah & Panitia Penyelenggara Raker Teknis SEKWILDA Tingkat I se-Indonesia.	L L :	
21	No.21 Tahun 1980 31 Januari 1980	Penyelenggaraa Kursus Tata Desa bagi para Kepala Subdit Pengembangan Tata Desa dan para Kepala Seksi Dalam Lingkungan Sub Desa Dati I se-Indonesia	L L : 3 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
22	No.22 Tahun 1980 1 Februari 1980	Pembentukan Team Pembahasan masalah bangunan dan persil sekolah asing/Cina	L L : 3 hal	
23	No.23 Tahun 1980 2 Februari 1980	<b>Temu Karya Lembaga Sosial Desa</b>	L L :	
24	No.24 Tahun 1980 2 Februari 1980	Penyelenggaraan Kursus Staf Adm. Pemerintahan Depdagri/Sekolah Pimpinan dan Staf Administrasi Kotamadya.	L L :	
25	No.25 Tahun 1980 6 Februari 1980	Pemindahan Pusat kedudukan pemerintahan Gubernur NTT bagian Utara dari Maumere ke Ende.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 113	
26	No.26 Tahun 1980 9 Februari 1980	Susunan Personalia Dewan Kependidikan Tingkat II.	L L :	
27	No.27 Tahun 1980 11 Februari 1980	Izin penyelenggaraan T.M.T.I.M.I. Asean Reorganisasi Depdagri.	L L :	
28	No.28 Tahun 1980 11 Februari 1980	Pembentukan Team Penyusunan Reorganisasi Depdagri.	L L : 3 hal	
29	No.29 Tahun 1980 11 Februari 1980	Penyelenggaraan Kursus Kader Pimpinan Hansip Th.1979/1980 Angk. IX di Jakarta.	L L :	
30	No.30 Tahun 1980 11 Februari 1980	Penyelenggaraan Kursus Juru Ukur Pendaftaran Tanah di Banda Aceh, Medan, Padang dan Pekan Baru.	L L :	
31	No.31 Tahun 1980 11 Februari 1980	Penataran Type A Tingkat Instansi Pusat Depdagri pada IIP Jakarta.	L L :	
32	No.32 Tahun 1980 12 Februari 1980	Perincian & Bantuan Kredit Pembangunan & Pemugaran Pasar masing2 Dati I Th.1979/1980 (Tahap Pertama).	L L :	
33	No.33 Tahun 1980 16 Februari 1980	Penataran Type A Tingkat Instansi Pusat Depdagri Angkatan XI a.n. Drs. Teuku Untung Yuana, Cs.	L L :	
34	No.34 Tahun 1980 20 Februari 1980	Pembentukan Team Penyusunan Inventarisasi Peraturan perundang-undangan bidang Catatan Sipil Depdagri.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 121	
35	No.35 Tahun 1980 23 Februari 1980 0144/P/1980	SKB Mendagri, Men. P&K ttg Pelaksanaan Pengangkatan Guru dan Penjaga S.D. Negeri Tahun Anggaran 1979/1980.	L L :	
36	No.36 Tahun 1980 29 Februari 1980	Hasil Penelitian mengenai Program Bantuan Pembangunan (Banlitbang).	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 125	
37	No.37 Tahun 1980 29 Februari 1980	Penyelenggaraan Kursus Land Use Lanjutan II Angkatan 3.	L L :	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
38	No.38 Tahun 1980 29 Februari 1980	Penggantian Bendaharawan Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Transmigrasi di Pusat.	L L :	
39	No.39 Tahun 1980 1 Maret 1980	Penyelenggaraan Pendidikan Mantri Pamong Praja sebagai pembantu Jaksa di Ambon.	L L :	
40	No.40 Tahun 1980 1 Maret 1980	Pembentukan Team Kerja Penyusunan Tata Cara Pengusulan Tanda Kehormatan dan Piagam Penghargaan yg menyangkut bidang Depdagri dan Pemda.	L L :	
41	No.41 Tahun 1980 1 Maret 1980 072a/K/1980 1061a /Kmk.011/80	SKB Mendagri, Men P&K dan Men. Keu RI ttg Subsidi/biaya pembiayaan Penyelenggara an S.D.N.	L L :	
42	No.42 Tahun 1980 10 Maret 1980 M.01.Um.09.03-	SKB Mendagri dan Men. Kehakiman ttg Pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarga negaraan.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 135	
43	No.43 Tahun 1980 10 Maret 1980	Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 149	Dicabut dg KMDN No.73 Th.1999
44	No.44 Tahun 1980 10 Maret 1980	Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 127	Dicabut dg Permen No.159 Th.2004
45	No.45 Tahun 1980 10 Maret 1980	Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 155	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
46	No.46 Tahun 1980 10 Maret 1980	Raker Pembangunan Desa Seluruh Indonesia.	L L :	
47	No.47 Tahun 1980 15 Maret 1980	Pengesahan Pinjaman Bantuan untuk pembangunan dan pemugaran pasar tahun 1978/1979 untuk Kabupaten/Kotamadya Dati I Sumatera Utara.	L L :	
48	No.48 Tahun 1980 15 Maret 1980	S d a Kabupaten Rejang Lebong dalam Lingkungan Propinsi Dati I Bengkulu	L L :	
49	No.49 Tahun 1980 15 Maret 1980	S d a Kab. Bima dalam Lingkungan Prop. Dati I Nusa Tenggara Barat	L L :	
50	No.50 Tahun 1980 15 Maret 1980	S d a Kabupaten/Kodya Dati II dalam Lingkungan Prop. Dati I Sumatera Selatan	L L :	
51	No.51 Tahun 1980 18 Maret 1980	Pengangkatan Penataran Type B Tk. Instansi Pusat Depdagri pada Setjen	L L :	
52	No.52 Tahun 1980 18 Maret 1980	Penyelenggaraan Kursus Pengatur Tata Guna Tanah (KTMA) di Jakarta	L L :	
53	No.53 Tahun 1980 21 Maret 1980	Pembentukan Panitia Rapat Tehnis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan	L L :	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
54	No.54 Tahun 1980 28 Maret 1980	Kep. Mendagri selaku Pembina Penataran Type A Tingkat Instansi Pusat Depdagri Angkatan XII	L L :	
55	No.55 Tahun 1980 28 Maret 1980	Pengangkatan Pembantu Penatar Type A Tk.Instansi Pusat pada IIP Depdagri. Mendagri Selaku Pembina	L L :	
56	No.56 Tahun 1980 29 Maret 1980	Penghapusan Inventarisasi dan Pengalihan Pemilikan kendaraan perorangan Dinas Milik Negara ( Drs. T.M.Aly)	L L :	
57	No.57 Tahun 1980 29 Maret 1980	S d a ( Ismail Harahap, S.H.)	L L :	
58	No.58 Tahun 1980 29 Maret 1980	S d a ( R. Fauzi M )	L L :	
59	No.59 Tahun 1980 29 Maret 1980	S d a ( Tirtodiatmo )	L L :	
60	No.60 Tahun 1980 29 Maret 1980	S d a Kepada Torong	L L :	
61	No.61 Tahun 1980 29 Maret 1980	S d a ( Barhaki Sunitasastro )	L L :	
62	No.62 Tahun 1980 31 Maret 1980	SKB Ment. PAN & Mendagri ttg Tata Cara Penyerahan Proyek Resetlement Penduduk.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 159	
63	No.63 Tahun 1980 29 Maret 1980	Penghapusan Inventarisasi Pemilikan Kendaraan perorangan Dinas milik Negara (Drs. M. Toha AS)	L L :	
64	No.64 Tahun 1980 31 Maret 1980	S d a ( Sumarjo )	L L :	
65	No.65 Tahun 1980 31 Maret 1980	S d a ( Salikin Wiryoatmojo )	L L :	
66	No.66 Tahun 1980 31 Maret 1980	Penyelenggaraan Kursus Orientasi bagi para Pejabat/Pegawai Prop.Dati I Tim-Tim.	L L :	
67	No.67 Tahun 1980 31 Maret 1980	Penggantian Bendaharawan Rutin Ditjen. Pembangunan Daerah di Jakarta.	L L :	
68	No.68 Tahun 1980 7 April 1980	Penghapusan Inventarisasi pemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara (Zainal Abidin Nudin)	L L :	
69	No.69 Tahun 1980 7 April 1980	Penyelenggaraan Kursus Pengelolaan Perlengkapan Depdagri.	L L :	
70	No.70 Tahun 1980 7 Maret 1980	Penyempurnaan Kepmendagri No.13/1980 ttg Penambahan Anggota Tim Penyusunan Pedoman Tata Kerja bagi Semua Satuan Organisasi Depdagri dan Wilayah Daerah.	L L :	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
71	No.71 Tahun 1980 7 April 1980	Penyelenggaraan kursus kearsipan Depdagri Resettlement Desa.	L L :	
71A	No.71A Tahun 1980 7 April 1980	Pembentukan Team Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Keppres ttg ..	L L :	
72	No.72 Tahun 1980 12 April 1980	Penghapusan Inventarisasi dan Pengalihan pemilikan kendaraan perorangan Dinas Milik Negara (Drs. Hasanudin).	L L :	
73	No.73 Tahun 1980 12 April 1980	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Kendaraan Dinas Milik Perorangan (Drs.Hasanuddin).	L L : 3 Hal.	
74	No.74 Tahun 1980 15 April 1980	Pembentukan Panitia rapat tehnik program bantuan Pembangunan Dati.II 1979/1980.	L L :	
75	No.75 Tahun 1980 16 April 1980	Pembentukan Seksi Tata Guna Tanah Kantor Agraria Kab./Kotamadya tertentu.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 167	
76	No.76 Tahun 1980 16 April 1980	Pembentukan Team Konsultasi Kerja Sama.	L L :	
77	No.77 Tahun 1980 16 April 1980	Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan proyek dalam lingkungan Itjen Depdagri.	L L :	
78	No.78 Tahun 1980 17 April 1980	SKB Mendagri, Men Keu, Men PU dan Menko Bidang Ekuin/Ketua Bappenas ttg Penetapan jumlah Bantuan Pembangunan Dati I Tahun 1980/1981.	L L :	
79	No.79 Tahun 1980 17 April 1980	SKB Mendagri, Menteri Keuangan, Menko Bid. Ekuin/Ketua Bappenas ttg penetapan jumlah Bantuan/petunjuk pelaksanaan pembangunan Desa Th.1980/1981	L L :	
80	No. 80 Tahun 1980 17 April 1980 243a/Kmk.03/80 1116/K/4/1980	SKB Mendagri, Menkeu dan Menko Bidang Ekuin/Ketua Bappenas ttg penetapan jumlah bantuan Pembangunan Dati II Th.1980/1981.		
81	No. 81 Tahun 1980 17 April 1980	SKB Mendagri, Menkau, Men P&K, Menag, Menko Bidang Ekuin/Ketua Bappenas, ttg Penetapan Jumlah bantuan dan petunjuk pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.		
82	No. 82 Tahun 1980 17 April 1980	SKB Mendagri, Menkeu, Menko Bidang Ekuin/Ketua Bappenas ttg Penetapan jumlah bantuan & petunjuk pelaks.bantuan pembangunan sarana kesehatan Th.80/81.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
83	No. 83 Tahun 1980 17 April 1980	SKB Mendagri, Menkau, Men Pertanian, Men. PU Men Negara PPLH Menko Bidang Ekuin / Ketua Bappenas ttg persetujuan jumlah bantuan dan petunjuk pelaksanaan bantuan penyempurnaan rekreasi.		
84	No. 84 Tahun 1980 17 April 1980 243/A/Kmk.03/80 149A/KpB.IV/80 13/2/Kep/GBI	SKB Mendagri, Menkeu, Men Dagkop, Menko Bid.Ekuin/Ketua Bappenas & Gub. Bank Indonesia ttg Petunjuk Pelaksanaan bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar 1980/1981.		
85	No. 85 Tahun 1980 17 April 1980	SKB Mendagri, Menkeu, Men PU, Menko Bd. Ekuin/Ketua Bappenas ttg Penetapan Jumlah bantuan dan petunjuk pelaksanaan Bantuan penunjang jalan kabupaten.		
86	No. 86 Tahun 1980 17 Tahun 1980	Pengesahan pinjaman Bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar Th.1978/1979 untuk Kabupaten2 Dati II dalam Lingkungan Prop. Dati I Kaltim.		
87	No. 87 Tahun 1980 17 April 1980	Penghapusan Inventarisasi dan pengalihan kepemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara atas nama S Saifudin.		
88	No.88 Tahun 1980 17 April 1980	Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan proyek dalam Lingkungan Setjen Depdagri.		
89	No.89 Tahun 1980 17 April 1980	S d a dalam lingkungan Ditjen Bangdes. Depdagri.		
90	No.90 Tahun 1980 Sk. 21 D/A/1980 23 April 1980	Jangka Waktu Berakhirnya Hak-hak atas tanah asal Konveksi Hak-hak Barat di Daerah Tk.I Irian Jaya.		
91	No.91 Tahun 1980 25 April 1980	S d a dalam lingkungan Ditjen Sospol Depdagri.		
92	No.92 Tahun 1980 25 April 1980	S d a dalam Lingkungan Bandiklat Depdagri.		
93	No.93 Tahun 1980 25 April 1980	Penyelenggaraan latihan bagi para pegawai baru dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Prop. Dati I seluruh Indonesia.		
94	No.94 Tahun 1980 25 April 1980	Kep. Mendagri selaku pembina Penataran Type A tingkat Instansi Pusat Depdagri.		
95	No.95 Tahun 1980 25 April 1980	Penghapusan Inventarisasi dan pengalihan kepemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara a.n. Sunaryo.		
96	No.96 Tahun 1980 25 April 1980	S d a (Ny. Janda Sri Bani Soemartono)		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
97	No.97 Tahun 1980 25 April 1980	S d a (R. Soetarjo Wirjopranoto)		
97A	No.97A Tahun 1980 2 Mei 1980	Pembentukan Team Rancangan U.U. Tata Guna Tanah.		
98	No.98 Tahun 1980 6 Mei 1980	Penghapusan Inventarisasi dan Pengalihan kepemilikan kendaraan perorangan Dinas milik negara (Drs. Samsunan Machmud).		
99	No.99 Tahun 1980 10 Mei 1980	Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan proyek dlm Lingk. Ditjen PUOD Depdagri.		
100	No.100 Tahun 1980 10 Mei 1980	Perpanjangan masa kerja Kelompok kerja perumus RUU ttg Organisasi masyarakat.		
101	No.101 Tahun 1980 14 Mei 1980	Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek dalam lingk. Bandiklat Depdagri.		
102	No.102 Tahun 1980 14 Mei 1980	Izin penyelenggaraan Motor Relly.		
103	No.103 Tahun 1980 22 Mei 1980	Penunjukan pimpinan dan Bendaharawan proyek pd. Kantor Direktorat Pembangunan Desa di Daerah.		
104	No.104 Tahun 1980 22 Mei 1980	Penyelenggaraan Rapat Kerja antara pimpinan Direktorat Jenderal Agraria dg para Pejabat Agraria di Daerah 2 Th.1980.		
105	No.105 Tahun 1980 22 Mei 1980 0176/P/1980 4398/01/1980 22 Tahun 1980 55/Menpan/1980	SKB Menteri P&K, Mendagri, Menlu, Menteri Agama dan Menpan ttg Pedoman Pemilihan Guru Teladan.		
106	No.106 Tahun 1980 22 Mei 1980 0177/P/1980 4416/01/1980 23 Tahun 1980 56 / Menpan / 1980	SKB. Menteri P&K Mendagri, Menlu, Menteri Agama dan Menpan.		
107	No.107 Tahun 1980 22 Juni 1980	Penunjukan Wakil Sekretaris Umum dan Kepala Bidang pada Sekretariat koordinasi Urusan Timor Timur.		
108	No.108 Tahun 1980 29 Juni 1980	Penunjukan Pimpinan Bendaharawan Proyek Direktorat Sosial politik Prop. Lampung, Kalteng dan Prop. Jatim.		
109	No.109 Tahun 1980 29 Juni 1980	Penyelenggaraan Pendidikan polisi Pamong Praja sebagai pembantu Jaksa di Medan dan Ujung Pandang.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
110	No.110 Tahun 1980 2 Juni 1980	Pembentukan Panitia prakwalifikasi pada kantor pusat Depdagri.		
111	No.111 Tahun 1980 2 Juni 1980	Peralihan Inventaris dan pengalihan pemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara kepada Amin Koesban.		
112	No.112 Tahun 1980 2 Juni 1980	Peralihan Inventaris dan pengalihan pemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara kepada Samsi Kasran.		
113	No.113 Tahun 1980 2 Juni 1980	s.d.a. a/n Drs. L.M. Damanik		
114	No.114 Tahun 1980 2 Juni 1980	Peralihan Inventaris dan pengalihan pemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara kepada Samsi Kasran.		
115	No.115 Tahun 1980 2 Juni 1980	s.d.a. a/n B. Manulang.		
116	No.116 Tahun 1980 2 Juni 1980	s.d.a. a/n Drs. Z. Iskandar, Sm. Hk.		
117	No.117 Tahun 1980 2 Juni 1980	Peralihan Inventaris & pengalihan pemilikan kendaraan perorangan Dinas Milik Negara kepada Soepeno.		
118	No.118 Tahun 1980 2 Juni 1980	Kep. Sekretaris Jenderal selaku pembina penataran Type B tingkat Instansi pusat Depdagri pada Sekjen Depdagri.		
119	No.119 Tahun 1980 5 Juni 1980	Peralihan Barang Inventaris yang tidak di pakai lagi.		
120	No.120 Tahun 1980 5 Juni 1980	Pengesahan Pinjaman bantuan Kredit Pembangunan dan pemugaran pasar th.1978/1979 untuk Kab. Dati II dalam lingkungan Prop. DI. Aceh.		
121	No.121 Tahun 1980 5 Juni 1980	Pengesahan Pinjaman bantuan Kredit pembangunan dan pemugaran pasar th.1978/1979 utk Kab. Dati II di lingkungan Prop. Daerah Tk. II Kalsel.		
122	No.122 Tahun 1980 9 Juni 1980 351/Kpts/Um/5/1980	Penertiban dan penetapan kembali perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.		
123	No.123 Tahun 1980 10 Juni 1980	Pembentukan Tim Persiapan penyusunan pedoman kehumasan Depdagri.		
124	No.124 Tahun 1980 2 Juni 1980 0172/8/1980	SKB. Men.P&K & Mendagri ttg perubahan Kepber Men. P & K dan Mendagri No.71/P/1980, no.35 Th.1980.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
125	No.125 Tahun 1980 12 Juni 1980	Pembentukan Team penyusunan Tata Cara Perencanaan Pembangunan Depdagri.		
126	No.126 Tahun 1980 16 Juni 1980	Peralihan sebagian Gedung Depdagri Jl.Ahmad Yani No. 8 Bogor.		
127	No.127 Tahun 1980 18 Juni 1980	Pelaksanaan Pembangunan Pusat Prop. Dati.I Timor Timur.		
128	No.128 Tahun 1980 18 Juni 1980	Petunjuk ketua dan wakil ketua team Pelaksanaan Pembangunan Pusat Prop. Dati.I Timor Timur.		
129	No.129 Tahun 1980 18 Juni 1980	Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Pameran Bidang Depdagri di Arena Jambore Nasional 1981.		
130	No.130 Tahun 1980 18 Juni 1980	Pembentukan Team Pengembangan Sistim Informasi Depdagri.		
131	No.131 Tahun 1980 20 Juni 1980	SKB. Menkeu dan Mendagri ttg Rencana Penerimaan Ipeda tiap Daerah tk II tanpa sektor pertambangan dan perhutanan asal iuran hasil hutan anggaran 1980/1981.		
132	No.132 Tahun 1980 20 Juni 1980	Pembentukan Badan Pembinaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981.		
133	No.133 Tahun 1980 20 Juni 1980	Penataran Tipe B Tingkat Instansi Pusat Depdagri pd Setjen Depdagri Angkatan ke II.		
134	No.134 Tahun 1980 23 Juni 1980	Perubahan Susunan Personalia Team peneliti Tanda-tanda Kehormatan Depdagri.		
135	No.135 Tahun 1980 23 Juni 1980 231/Kpts/Op/4/1980 135/Tahun 1980	Surat Kepber: Mentan, Mendagri dan Menteri PU ttg Pembentukan Team Pengendali, Team Pembinaan dan Team Pelaksana Pencetaskan Sawah.	Himpunan KMDN ( I ) Thn. 1980 Hal : 181	
136	No.136 Tahun 1980 23 Juni 1980	Pembentukan Team Penyusunan Reorganisasi Sekwilda Tingkat I.		
137	No.137 Tahun 1980 23 Juni 1980	Pembentukan Team Penyusunan Organisasi Inspektorat Jenderal Ditjen PUOD Ditjen Pembangunan Daerah dan Ditjen Pembangunan Desa.		
138	No.138 Tahun 1980 25 Juni 1980	penyelenggaraan kursus Adm. Keuangan bagi para pegawai kantor Pusat Depdagri.		
139	No.139 Tahun 1980 25 Juni 1980	Pembentukan Team Kerja antar Dep. (Ex Offisi mengenai urusan Pemerintahan dan Pembangunan Timor Timur.		
140	No.140 Tahun 1980 26 Juni 1980	Izin Penyelenggaraan Lions Metro IPMY Rally II/1980.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
141	No.141 Tahun 1980	Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan pada Direktorat/ kota Sospol di Prop. Jatim.		
142	No.142 Tahun 1980 3 Juli 1980	Penggantian Bendaharawan Proyek Pembinaan Hansip dan Nilawa di Prop. Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah.		
143	No.143 Tahun 1980 4 Juli 1980	Penghapusan dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.		
144	No.144 Tahun 1980 4 Juli 1980	Penghapusan dan Pengalihan Pelilikan Kendaraan perorangan Dinas milik Negara.		
145	No.145 Tahun 1980 5 Juli 1980	Penggantian Pimpro Pembinaan Masyarakat Ditjen. Sosial Politik DDN an. Drs. Goenardo.		
146	No.146 Tahun 1980 5 Juli 1980	Susunan Keanggotaan Team Khusus Agraria Tingkat Pusat.		
147	No.147 Tahun 1980 5 Juli 1980	Pembentukan Team Pengumpulan dan Penelitian Data.		
148	No.148 Tahun 1980 5 Juli 1980	Pembentukan Team Penyusunan Rencana Pembangunan Depdagri.		
149	No.149 Tahun 1980 5 Juli 1980	Pembentukan Team Bantuan Tehnis Pengembangan Prop. Timor Timur.		
150	No.150 Tahun 1980 7 Juli 1980	Penunjukan Rekanan utk melaks. penyerahan peralatan mesin sandi C Rypto graph C 52 utk memenuhi kebutuhan bagian sandi.		
151	No.151 Tahun 1980 7 Juli 1980	Penunjukan Rekanan untuk melaksanakan Penyerahan perlatan mesin Monroe I/O Writter programe utk Biro Keuangan DDN.		
152	No.152 Tahun 1980 9 Juli 1980	Penyelesaian Permohonan hak baru atas tanah bekas HGU dan HGB asal Konversi Hak-hak Barat yang dibebani hipotik dan Kredit Verban pada Bank.		
152A	No.152A Tahun 9 Juli 1980 412 a/KMK 01/1980 13/7/Kep./GBI	Kepber Mendagri, Menkeu & Gubernur BI ttg penyelesaian permohonan hak baru atas tanah bekas HGU dan HGB asal Konversi Hak-hak Barat yg dibebani Hipotik dan Kredit Verban pada Bank.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 25	
153	No.153 Tahun 1980 10 Juli 1980	Penggantian Pimpinan dan Bendaharawan Sub Proyek Penyusunan Rencana Program dan Pengendalian Pelaksanaan Depdagri di Timor Timur.		
154	No.154 Tahun 1980 10 Juli 1980	Penggantian Pimpro Pengawasan Proyek pada Inspektorat Wilayah Prop. Bengkulu dan Inspektorat Wil. Prop. D.I. Yogyakarta.	L L :	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
155	No.155 Tahun 1980 10 Juli 1980	Penunjukan Bendaharawan dan atasan langsung Bendaharawan pada Kantor Sosial Politik di DKI.		
156	No.156 Tahun 1980 15 Juli 1980	Penghapusan Barang Inventaris yang tidak dapat digunakan lagi di Kabupaten Batang Jawa Tengah.		
157	No.157 Tahun 1980 15 Juli 1980	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara.		
158	No.158 Tahun 1980 17 Juli 1980	Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Barang Proyek Bantuan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Timor Timur.		
159	No.159 Tahun 1980 18 Juli 1980	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.		
160	No.160 Tahun 1980 19 Juli 1980	Pedoman Standarisasi alat Perlengkapan Kearsipan	Himp. KMDN (II) 1980 Hal : 31	Dicabut dg Permen No.78 Th.2012
161	No.161 Tahun 1980 21 Juli 1980	Pembentukan Team Peningkatan Sistem Kearsipan dan Administrasi Perkantoran Depdagri		
162	No.162 Tahun 1980 21 Juli 1980	Peralihan Inventaris dan pengalihan pemilikan kendaraan Dinas milik Negara		
163	No.163 Tahun 1980 21 Juli 1980	Pembentukan Tim Monitoring & pelaporan proyek pembangunan sektoral Depdagri		
164	No.164 Tahun 1980 30 Juli 1980	Penghapusan barang Inventaris yang tidak dapat digunakan lagi.		
165	No.165 Tahun 1980 31 Juli 1980	Penggantian Pinjaman Proyek Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Prop. Timor Timur.		
166	No.166 Tahun 1980 02 Agustus 1980	Penggantian Pinjaman Proyek Perenc. Umum Ditjen. Sospol Depdagri.		
167	No.167 Tahun 1980 02 Agustus 1980	Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.	Himpunan KMDN ( II ) Thn. 1980 Hal : 35	Dicabut dg KMDN No.30 Th.1989
168	No.168 Tahun 1980 04 Agustus 1980	Temu Karya kepala Desa-desa juara pertama Perlombaan Desa tingkat Prop. Seluruh Indonesia.		
169	No.169 Tahun 1980 04 Agustus 1980	Pembentukan Team Peningkatan Administrasi Kepegawaian Depdagri.		
170	No.170 Tahun 1980 07 Agustus 1980	Penyelenggaraan Rapat Kerja para Kepala Direktorat Agraria Prop. Seluruh Indonesia Tahun 1980.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
171	No.171 Tahun 1980 07 Agustus 1980	Penghapusan Inventaris dan pengalihan kepemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara atas nama Drs.Ruspono.		
172	No.172 Tahun 1980 07 Agustus 1980	Idem atas nama Soetrisno.		
173	No.173 Tahun 1980 07 Agustus 1980	Idem atas nama Suhandar Umar, SH.		
174	No.174 Tahun 1980 07 Agustus 1980	Idem atas nama Soejaldi		
175	No.175 Tahun 1980 07 Agustus 1980	Idem atas nama Hardi Ismaela		
176	No.176 Tahun 1980 14 Agustus 1980	Pembentukan panitia penyingkiran Calon PNS kantor pusat Depdagri.		
177	No.177 Tahun 1980 14 Agustus 1980	Pembentukan team penguji pelamar Calon Pegawai Negeri.		
178	No.178 Tahun 1980 21 Agustus 1980 0215/P/1980 6002/80/01 No.52 Tahun 1980 No. 61 Menpan	SKB Ment. P dan K, Mendagri, Menlu, Men Agama dan Men PAN ttg penetapan Guru Teladan Th.1980.		
179	No.179 Tahun 1980	Kosong		
180	No.180 Tahun 1980	Kosong		
181	No.181 Tahun 1980 21 Agustus 1980	Penggantian Pimpro dan Benpro dilingkungan Ditjen Sosial Politik Depdagri.		
182	No.182 Tahun 1980 22 Agustus 1980	Penggantian Pimpro/Bendpro khusus kader pimpinan Hansip di Ujung Pandang.		
183	No.183 Tahun 1980 28 Agustus 1980 596/Kpts/Um/8/1980 345/Kpb/VIII/80	SKB Men.Pertanian, Mendagri & Men.Perdag & Koperasi ttg Petunjuk Pelaks. Pengalihan Kapal-kapal Perikanan bekas Trawl.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 45	
184	No.184 Tahun 1980 28 Agustus 1980	Pemberian Piagam Penghargaan.		
185	No.185 Tahun 1980 28 Agustus 1980	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk. II.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 49	
186	No.186 Tahun 1980 28 Agustus 1980	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Dati I dan Sekretariat DPRD Dati I Timor Timur.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 83	
187	No.187 Tahun 1980 28 Agustus 1980	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tk. II dan Sekretariat DPRD Tk II Timor Timur.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 97	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
188	No.188 Tahun 1980 28 Agustus 1980	Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan Sub proyek peningkatan prasarana fisik pamong praja Prop. Timor Timur di Pusat.		
189	No.189 Tahun 1980 28 Agustus 1980	Penggantian Bendaharawan proyek pengawasan proyek-proyek pada Inspektorat Wil. Prop. NTB, dan Sumbar		
190	No.190 Tahun 1980 28 Agustus 1980	Penggantian Bendaharawan Sub proyek pengawasan politik pada Direktorat sosial politik pada Prop. Timor Timur.		
191	No.191 Tahun 1980 09 September 1980	Pengangkatan penatar dan petugas pelaksana teknis penataran type A untuk Prop. Daerah tk. I Timor Timur.		
192	No.192 Tahun 1980 09 September 1980	Penggantian Bendaharawan proyek dilingkungan Dirjen Sospol Depdagri.		
193	No.193 Tahun 1980	KOSONG		
194	No.194 Tahun 1980 15 September 1980	Pembentukan Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kab. Dili Prop. Timor Timur.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 105	
195	No.195 Tahun 1980 15 September 1980	Pembelian mesin gilas jalan bergetar merek Barata produksi dalam negeri.		
196	No.196 Tahun 1980 16 September 1980	Penunjukan Dosen tetap Institut Ilmu Pemerintahan untuk mengikuti program pendidikan dokter dan paska sarjana pada Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.		
197	No.197 Tahun 1980 16 September 1980	Penggantian Bendaharawan proyek pada Direktorat Pembangunan Desa di Prop. Sulsel, Kalsel dan Sumbar.		
198	No.198 Tahun 1980 19 September 1980	Penyelenggaraan kursus pengawasan bagi para Inspektur pembantu bid. pemerintahan dan Agraria pada Itjen. dan Inspektorat Wilayah Dati I seluruh Indonesia.		
199	No.199 Tahun 1980 19 September 1980	Penggantian ketua team Secreening Depdagri.		
200	No.200 Tahun 1980 20 September 1980	Penghapusan Inventaris yang tidak dapat digunakan lagi.		
201	No.201 Tahun 1980 20 September 1980	Penghapusan Inventaris dan pengalihan kepemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara atas nama Drs. Poedji M.		
202	No.202 Tahun 1980 20 September 1980	Penghapusan Inventaris dan pengalihan kepemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara an. Ny. Siti Mulyadi Mursito.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
203	No.203 Tahun 1980 20 September 1980	Idem atas nama Mochtar.		
204	No.204 Tahun 1980 20 September 1980	Idem atas nama Drs. Zulkifli S. Sutrisno.		
205	No.205 Tahun 1980 20 September 1980	Idem atas nama Ismail Syafii.		
206	No.206 Tahun 1980 22 September 1980	Idem atas nama Drs. GP. Moelyadi.		
207	No.207 Tahun 1980 22 September 1980	Idem atas nama H. Maksid.		
208	No.200 Tahun 1988 22 September 1980	Idem atas nama Drs. Sumarsono.		
209	No.209 Tahun 1980 22 September 1980	Idem atas nama M. Moerahcmad Brotoyudo.		
210	No.210 Tahun 1980 22 September 1980	Idem atas nama Apep Sadikin GP.		
211	No.211 Tahun 1980 30 September 1980 714/Kpts/Um/9/1980	SKB Mendagri dan Men. Pertanian ttg Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden RI, No.13 Th.1980 ttg Pelaksanaan Undang-undang Perjanjian bagi hasil.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 108	
212	No.212 Tahun 1980 29 September 1980	Penyelenggaraan sekolah staf dan Pimpinan Administrasi (Sispa) Depdagri Angkt. ke IV.		
213	No.213 Tahun 1980 30 September 1980	Penghapusan Inventaris dan pengalihan pemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara atas nama Ir. Sugiarso.		
214	No.214 Tahun 1980 30 September 1980	Idem atas nama Koewat M.		
215	No.215 Tahun 1980 01 September 1980	Pembentukan team penyusunan buku pedoman kerja kearsipan Depdagri.		
216	No.216 Tahun 1980 1 Oktober 1980	Penghapusan Inventaris dan pengalihan pemilikan kendaraan perorangan Dinas milik negara a.n. Nurhasan Ibnuhajar		
217	No.217 Tahun 1980 10 Oktober 1980	Idem atas nama Ali Murtopo		
218	No.218 Tahun 1980 10 Oktober 1980	Idem atas nama Iskandar		
219	No.219 Tahun 1980 10 Oktober 1980	Idem atas nama Suhadi		
220	No.220 Tahun 1980 10 Oktober 1980	Idem atas nama Barwi.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
221	No.220 Tahun 1980 10 Oktober 1980	Idem atas nama Drs. Isa Anhar.		
222	No.220 Tahun 1980 10 Oktober 1980	Idem atas nama I. O. Diponegoro.		
223	No.220 Tahun 1980 10 Oktober 1980	Idem atas nama Sanusi Wirosumirto.		
224	No.220 Tahun 1980 15 Oktober 1980 67 Tahun 1980 KEP-III/J.A./10/1980	SKB Men. Agama, Mendagri dan Jaksa Agung ttg Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 ttg Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 114	
225	No.225 Tahun 1980 15 Oktober 1980	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 119	
226	No.226 Tahun 1980 16 Oktober 1980	Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.		
227	No.227 Tahun 1980 16 Oktober 1980	Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Agraria DDN		
228	No.228 Tahun 1980 16 Oktober 1980	Penyelenggaraan Rapat kerja konsultasi/ pembahasan Rencana Kerja th 1981/1982 pemukiman kembali penduduk (Resettlement) Desa dan pemugaran perumahan dan lingkungan desa.		
229	No.229 Tahun 1980 16 Oktober 1980	Penataran Type B tingkat Instansi Pusat Depdagri pada Sekretariat Jenderal Depdagri angkatan VII.		
230	No.230 Tahun 1980 16 Oktober 1980	Penyelenggaraan kursus pengatur agraria jurusan Tata Guna Tanah di Tanj. Karang dan Kupang, jurusan pengurusan hak-hak tanah di Banjarmasin dan Ujung Pandang jurusan pengaturan tanah di Semarang.		
231	No.231 Tahun 1980 18 Oktober 1980	Penyelenggaraan Kursus kearsipan Depdagri		
232	No.232 Tahun 1980	KOSONG		
233	No.233 Tahun 1980	KOSONG		
234	No.234 Tahun 1980 18 Oktober 1980	Penyelenggaraan kursuskader pimpinan pertahanan sipil Depdagri		
235	No.235 Tahun 1980 23 Oktober 1980	Penyempurnaan Keputusan Mendagri No.188.205-175 ttg pembentukan team penyempurnaan ranc. Undang-undang ttg Pemda Khusus Ibukota.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
236	No.236 Tahun 1980 29 Oktober 1980	Penghapusan Inventaris dan pengalihan kepemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara atas nama Drs. Aly Mansur.		
237	No.237 Tahun 1980 29 Oktober 1980	S.D.A. atas nama Slamet Kabeol.		
238	No.238 Tahun 1980 29 Oktober 1980	S.D.A. atas nama Drs.H.Helan Soewarno.		
239	No.239 Tahun 1980 1 Nopember 1980	Organisasi & Tata kerja Badan Pembinaan Pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Dati.I dan badan pembinaan pendidikan pelaksanaan P4 Dati II.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 131	Dicabut dg KMDN No.42 Th.1999
240	No.240 Tahun 1980 10 Nopember 1980	Pedoman Organisasi dan Tata kerja Sekwilda Tk.I & Sekretariat DPRD Tk.I.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 145	
241	No.241 Tahun 1980 10 Nopember 1980	Pedoman Organisasi dan tata kerja Sekwilda Tk.I dan Sekretariat DPRD Tk I.		
242	No.242 Tahun 1980 10 Nopember 1980	Penyelenggaraan Lokakarya/raker pendidikan dan latihan pegawai Depdagri.		
243	No.243 Tahun 1980 12 Nopember 1980	Penghentian anggota team pembinaan bantuan Desa th 1980/1981.		
244	No.244 Tahun 1980 13 Nopember 1980	Pembentukan team penanganan masalah kepegawaian di Prop. Dati I Timor Timur.		
245	No.245 Tahun 1980 15 Nopember 1980	Penghapusan Inventaris dan pengalihan kepemilikan kendaraan perorangan dinas milik Negara a.n. Ny. Tuti Kandarwati Sugito.		
246	No.246 Tahun 1980 15 Nopember 1980	Pembentukan Panitia penyaringan penerimaan mahasiswa IIP.		
247	No.247 Tahun 1980	Peralihan Inventaris.		
248	No.248 Tahun 1980 20 Nopember 1980	Pembentukan Jurusan Keuangan pada Institut Ilmu Pemerintahan.	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 189	
249	No.249 Tahun 1980 20 Nopember 1980	Penghapusan Inventaris dan pengalihan kepemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara atas nama Soekanto.		
250	No.250 Tahun 1980 20 Nopember 1980	S.D.A. Sutawa.		
251	No.251 Tahun 1980 20 Nopember 1980	Keputusan Sekjen. selaku pembina penataran type B tingkat instansi pusat Depdagri pd Setjen. DDN No. 251 Th.1980 ttg penataran type B tingkat Instansi pusat DDN pada Setjen. Depdagri Angkatan IX.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
252	No.252 Tahun 1980 20 Nopember 1980	Penataran Type B tingkat Instansi Pusat Depdagri pada Sekretariat Jenderal Depdagri Angkatan X.		
253	No.253 Tahun 1980 20 Nopember 1980	Penunjukan Sekretariat dan anggota badan pengawasan san simpan pinjam Depdagri.		
254	No.254 Tahun 1980 20 Nopember 1980	Penunjukan tenaga lepas untuk membantu pengurus dana simpan pinjam Depdagri.		
255	No.255 Tahun 1980 20 Nopember 1980	Pemberian kenaikan honorarium kepada pengurus dana simpan pinjam Depdagri.		
256	No.256 Tahun 1980 4 Desember 1980	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan, kepemilikan kendaraan perorangan Dinas milik Negara a.n. Drs. Oenggoel Soerono.		
257	No.257 Tahun 1980 4 Desember 1980	Idem atas nama Soebarjo		
258	No.258 Tahun 1980 4 Desember 1980	Idem atas nama Sapto Darsono BE		
259	No.259 Tahun 1980 5 Desember 1980	Penyelenggaraan kursus administrasi keuangan/Bendaharawan bagi para kepala kantor pusat Depdagri.		
260	No.260 Tahun 1980 5 Desember 1980	SKB Menkeu dan Mendagri ttg Penyediaan penyaluran dan pertanggungjawaban pembiayaan pemilihan umum th 1982.		
261	No.261 Tahun 1980 5 Desember 1980	Penyelenggaraan kursus Land Use lanjutan Tingkat I angkatan 12		
262	No.262 Tahun 1980 5 Desember 1980	Penyelenggaraan kursus pangatur Tata Guna Tanah ( K.T.M.A ) di Jakarta		
263	No.263 Tahun 1980 5 Desember 1980	Pembentukan Panitia Pusat Penerimaan penyaringan Mahasiswa Akademi Agraria dan siswa kursus pengatur Agraria jurusan pendaftaran tanah pengurusan Hole-hole tanah anggaran 1979/1980		
264	No.264 Tahun 1980 6 Desember 1980	SKB Mendagri Men, P&K dan MenAgama ttg pelaksanaan pengangkatan guru Agama sekolah dasar negeri TA. 1979/1980		
265	No.265 Tahun 1980 6 Desember 1980	Perubahan Daftar isian proyek (DIP) proyek penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan di pusat Depdagri		
266	No.266 Tahun 1980 15 Desember 1980	Penghapusan Inventaris dan pengalihan kepemilikan kendaraan perorangan dinas milik Negara an. Ir.Soenarso Harjowidagdo.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
267	No.267 Tahun 1980 15 Desember 1980	Penggantian Pimpro Pengembangan Wilayah Jabotabek & proyek pengesahan rencana kota pada Ditjen. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.		
268	No.268 Tahun 1980	KOSONG		
269	No.269 Tahun 1980 16 Desember 1980	Penunjukan Pemegang Buku Kas umum pada Bendaharawan umum Depdagri		
270	No.270 Tahun 1980 20 Desember 1980	Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan proyek penyempurnaan prasarana fisik inspektorat Daerah-daerah		
271	No.271 Tahun 1980 20 Desember 1980	Penyelenggaraan Kursus Administrasi Kepegawaian Depdagri		
272	No.272 Tahun 1980 27 Desember 1980	Petunjuk pelaksanaan penyusunan Daftar Warga Negara RI yg terlibat dlm G.30S/PKI dan bekas anggota Organisasi terlarang serta yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam pemilu tahun 1982	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 197	
273	No.273 Tahun 1980 31 Desember 1980 2291/KEP/1980	SKB Mendagri dan Kepala BAKN ttg pengangkatan Calon PNS		
274	No.274 Tahun 1980 31 Desember 1980	Penyelenggaraan Kursus pembangunan Desa bagi para kepala kantor Pembangunan Desa, Kabupaten/Kotamadya Dati II seluruh Indonesia tahap ke IV		
275	No.275 Tahun 1980 31 Desember 1980	Team Pengawasan Pekerjaan Proyek Pembangunan Perumahan Dinas Depdagri desa Bintara Kecamatan Bekasi		
276	No.276 Tahun 1980 31 Desember 1980	Pembentukan Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten di Prop. Tim-tim.		Tidak berlaku lagi
*	No.140-502 Th.1980 22 September 1980	Penetapan Desa Menjadi Kelurahan.	Hal.: 2 Hal Lamp.: ... hal	
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 1980 18 Januari 1980	Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.30 Th.1979, Tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 193	Dicabut dg Pemen No.38 Th.2005
2	No.2 Tahun 1980 23 Januari 1980	Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentuk Susunan Org. & Tata Kerja Dinas Kesehatan.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 197	
3	No.3 Tahun 1980 23 Januari 1980	Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas Kesehatan Pertanian Tanaman Pangan.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 205	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
4	No.4 Tahun 1980 23 Januari 1980	Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan.	Himp.KMDN (I) 1980 Hal : 211	
5	No.5 Tahun 1980 23 Januari 1980	Petunjuk Pelaksanaan mengenai pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 217	
6	No.6 Tahun 1980 23 Januari 1980	Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan.		*
7	No.7 Tahun 1980 23 Januari 1980	Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 223	
8	No.8 Tahun 1980 23 Januari 1980	Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 229	
9	No.9 Tahun 1980 6 Februari 1980	Pelaksanaan Undang-undang No.5 Th.1979 ttg Pemerintahan Desa.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 237	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
10	No.10 Tahun 1980 6 Februari 1980	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 243	
11	No.11 Tahun 1980 10 Maret 1980	Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja Di Daerah.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 249	
12	No.12 Tahun 1980 15 Maret 1980	Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah dlm Rangka Pengembangan Area.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 250	
13	No.13 Tahun 1980 22 Maret 1980	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek2 Pembangunan TA.1980/1981 di Lingkungan Setjen. Depdagri.		*
14	No.14 Tahun 1980 16 April 1980	Instruksi Bersama Mendagri dan Menag ttg Peningkatan Penerangan Perjalanan Haji Kepada Masyarakat Islam Indonesia.		*
15	No.15 Tahun 1980 17 April 1980	Penertiban Perladangan Liar di Kawasan Hutan Lindung Sumpur II Panti Kabupaten Dati II Pasaman, Prop. Dati I Sumbar.		*
16	No.16 Tahun 1980 25 April 1980	Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaks. Bantuan Pembangunan Dati.I 1980/1981.		*
17	No.17 Tahun 1980 25 April 1980	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa TA.1980/1981.		*
18	No.18 Tahun 1980 25 April 1980	Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaks. Bantuan Pembangunan Dati II 1980/1981.		*
19	No.19 Tahun 1980 25 April 1980	Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah rangka Program Pengembangan Wilayah.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 267	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
20	No.20 Tahun 1980 25 April 1980	Petunjuk Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pembangunan dan Perbaikan Gedung SD dalam Rangka Bantuan Pembangunan SD 1980/1981.		*
21	No.21 Tahun 1980 25 April 1980	Petunjuk Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1980/1981.		*
22	No.22 Tahun 1980 25 April 1980	Petunjuk Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi 1980/1981.		*
23	No.23 Tahun 1980 25 April 1980	Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.		*
24	No.24 Tahun 1980 25 April 1980	Petunjuk Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Bantuan Penunangan Jalan Kabupaten Dati II 1980/1981.		*
25	No.25 Tahun 1980 25 April 1980	Pelaksanaan Keppres No.28 Th.1980 ttg Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 289	
26	No.26 Tahun 1980 1 Mei 1980	Penentuan HET Minyak Tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 293	
27	No.27 Tahun 1980 17 Mei 1980	Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian VIII/1980. (Inber Mentan dan Mendagri).		*
28	No.28 Tahun 1980 22 Mei 1980	Pelaksanaan Pemilihan Guru Teladan Th.1980. (Inber Men P+K, Mendagri, Menlu dan Menag.).		*
29	No.29 Tahun 1980 2 Juni 1980	Tindak Lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Th 1976, ttg Pengembangan wilayah Jakarta - Bogor -Tangerang - Bekasi (JABOTABEK ).	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 297	
30	No.30 Tahun 1980 5 Juni 1980	Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan UNICEF Kepada Pemerintah Daerah untuk Pelayanan Dasar bagi Ibu dan Anak di Daerah Perkotaan.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 301	
31	No.31 Tahun 1980 18 Juni 1980	Penunjukan Pemegang Pembukuan Pelaks. Anggaran Proyek2 Pembangunan dalam Lingkungan Sekjen.Depdagri.		*
32	No.32 Tahun 1980 18 Juni 1980	Pelaksanaan Ketentuan/Peraturan yang berlaku dalam rangka Pembinaan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum.	Himp. KMDN (I) 1980 Hal : 311	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
33	No.33 Tahun 1980 20 Juni 1980	Petunjuk Lebih Lanjut Mengenai Pelaks. Bantuan Pembangunan Desa, Bantuan Pembangunan Dati II, Dati I, Bantuan Pembangunan SD, Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Th.1980/1981.		*
34	No.34 Tahun 1980 15 Juli 1980	Petunjuk Pelaksanaan Hasil Rapat Koordinasi BKPM/ seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 31 April s/d 1 Mei 1980	Himp.KMDN (II) 1980 Hal : 209	
35	No.35 Tahun 1980 22 Juli 1980	Pembentukan Team Pengendali Pengadaan Barang peralatan Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi	L L : 8 hal	
36	No.36 Tahun 1980 28 Agustus 1980	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tk. I Propinsi Timor Timur	L L : 3 hal	
37	No.37 Tahun 1980 3 September 1980	Instruksi bersama Menteri P&K dan Mendagri ttg Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 1980		
38	No.38 Tahun 1980 2 Oktober 1980	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan harga dasar pembelian jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau	L L : 3 hal	
39	No.39 Tahun 1980 27 Oktober 1980	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan pengadaan pangan dalam Negeri	L L : 2 hal	
40	No.40 Tahun 1980 27 Oktober 1980	Disiplin jam Kerja dan Daftar Hadir PNS pada Kantor Pusat Depdagri	L L : 3 hal	
41	No.41 Tahun 1980 10 Nopember 1980	Instruksi Bersama Menteri Pertanian dan Mendagri ttg Penyelenggaraan Pekan Penghijauan Nasional ke XX Th.1980		
<b>TAHUN 1981</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1981 24 Januari 1981	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa dan perangkat Desa	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 1	Dicabut dg Permen No.3 Th.1993
2	No. 2 Tahun 1981 24 Januari 1981	Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 19	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
3	No. 3 Tahun 1981 24 Januari 1981	Keputusan Desa	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 15	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
4	No. 4 Tahun 1981 24 Januari 1981	Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 25	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
5	No. 5 Tahun 1981 24 Januari 1981	Pembentukan Dusun dalam desa dan lingkungan dalam Kelurahan	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 31	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
6	No. 6 Tahun 1981 24 Januari 1981	Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 37	Dicabut dg Permen No.11 Th.1996
7	No. 7 Tahun 1981 24 Januari 1981	Tata cara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 53	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
8	No. 8 Tahun 1981 24 Januari 1981	Persyaratan, Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 57	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1981 7 Januari 1981	Pembentukan Panitia Rapat Terbatas Gubernur KDH Tk. I		
2	No. 2 Tahun 1981 7 Januari 1981	Penghapusan Inventarisasi dan Pengalihan Kendaraan Dinas Milik Negara an. Soebagyo.		
3	No. 3 Tahun 1981 7 Januari 1981	Penghapusan Inventarisasi dan Pengalihan Kendaraan Dinas Milik Negara an. Dahlan Roos, SH.		
4	No. 4 Tahun 1981 8 Januari 1981	Penggantian Bendaharawan & Atasan Langsung Bendaharawan pada Kantor Sosial Politik Kab. Dati. II Sidoarjo di Prov. Jatim.		
5	No. 5 Tahun 1981 8 Januari 1981	Penggantian Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Peningkatan Agraria Prop. Timtim.		
6	No. 6 Tahun 1981 10 Januari 1981	Pembentukan Panitia Rapat Gubernur dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Seluruh Indonesia		
7	No. 7 Tahun 1981 10 Januari 1981	Penetapan Status Rumah Negeri di Lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagai Rumah Negeri.		
8	No. 8 Tahun 1981 10 Januari 1981	Penataran Tipe B Tingkat Instansi Pusat Depdagri pada Setjen. DDN Angkatan XV.		
9	No. 9 Tahun 1981 10 Januari 1981	Penataran Tipe B Tingkat Instansi Pusat Depdagri pada Setjen. DDN Angkatan XV.		
10	No.10 Tahun 1981 15 Januari 1981	Penunjukan Pejabat Departemen Dalam Negeri dalam Pembahasan-pembahasan dengan SekJend WANHANKAMNAS.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 63	
11	No.11 Tahun 1981 15 Januari 1981	Penunjukan Langsung untuk Pekerjaan Analisa data penggambaran & pencetakan peta-peta untuk proyek Tata Guna Tanah dan Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Transmigrasi di Pusat Dir. Tata Guna Tanah Ditjen. Agraria Depdagri.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 65	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
12	No.12 Tahun 1981 15 Januari 1981	Penggantian Atasan Langsung Bendaharawan Umum Depdagri.		
13	No.13 Tahun 1981 15 Januari 1981	Pembentukan Team Pembahas RUU ttg Pertahanan Negara dan RUU Rakyat terlatih sebagai kekuatan Bela Negara.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 71	
14	No.14 Tahun 1981 22 Januari 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kendaraan Dinas Milik Negara an. Dahlan Karma Ibrahim.		
15	No.15 Tahun 1981	KOSONG		
16	No.16 Tahun 1981	KOSONG		
17	No.17 Tahun 1981 24 Januari 1981	Penetapan-penetapan kembali pejabat-pejabat yang diberi wewenang menanda tangani DIK, DIP dan usulan Revisi serta Anggaran Belanja Tambahan Depdagri.	L L : 4 hal	
18	No.18 Tahun 1981 30 Januari 1981	Penyelenggaraan Tata Guna Tanah Lanjutan (Diklat) Tk.II Angkatan ke 4.		
19	No.19 Tahun 1981 30 Januari 1981	Penunjukan Rekanan untuk Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Elevator (Box Lift) pada Gedung Ditjen.Agraria.		
20	No.20 Tahun 1981 30 Januari 1981	Penunjukan Atasan Langsung Pelaksana Pekerjaan Penyusunan Buku Petunjuk Perencanaan Pembangunan Daerah.		
21	No.21 Tahun 1981 3 Pebruari 1981	Penunjukan Rekanan utk Melaksanakan Penyerahan Peralatan Radio Transceivers utk Jaringan Radio.		
22	No.22 Tahun 1981 3 Pebruari 1981	Penggantian Pimpinan Proyek di Lingkungan Ditjen Sospol DDN.		
23	No.23 Tahun 1981 5 Pebruari 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n Latief Shah. SH.		
24		KOSONG		
25	No.25 Tahun 1981 5 Februari 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n Soekardi Soehartono.		
26	No.26 Tahun 1981 3 Februari 1981	Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman modal Daerah Prop. Dati I Sulut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, NTT, Kalsel & DI. Aceh.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 79 - 82	
27	No.27 Tahun 1981 9 Februari 1981 83a/Kmk.011/1981 131/Kpts/Um/2/81 SK.11/OT/011/Phb/1981	SKB : MDN, Men. Keuangan, Men. Pertanian dan Men. Perhubungan ttg Pembentukan Panitia pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan, terminal dan kawasan Industri.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 83 - 88	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
28	No.28 Tahun 1981 10 Februari 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n H.A.Rasyid Nasution, SH.		
29	No.29 Tahun 1981 10 Februari 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n Moch Zaenal.		
30	No.30 Tahun 1981 12 Februari 1981	Pembentukan Team Pembina Lembaga Ketahanan Masy. Desa (LKMD) dan Team Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PPK)	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 89 - 98	
31	No.31 Tahun 1981 12 Februari 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n M.Soenjoto.		
32	No.32 Tahun 1981 17 Februari 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n Drs.M.Butar-Butar.		
33	No.33 Tahun 1981 20 Februari 1981	Penggantian Bendahara Bagian Proyek Pembinaan Bantuan Desa dan Usaha Perekonomian Desa pada Direktorat Pembangunan Desa Prov. Jatim.		
34	No.34 Tahun 1981 20 Februari 1981	Penetapan Nama-nama Calon Mahasiswa Akademi Agraria & Siswa Kursus Pengatur Agraria yg diterima Th.1980/1981 (Diklat).		
35	No.35 Tahun 1981 21 Februari 1981	Raker Pembangunan Desa se Indonesia Th.1981 (PMD).		
36	No.36 Tahun 1981 21 Februari 1981	Penataran Tipe A Tingkat Instansi Pusat DDN Angkt. XVI (Kepegawaian)		
37	No.37 Tahun 1981 21 Februari 1981	Pelaksanaan KEPRES No. 55 Tahun 1980 mengenai perincian tugas dan tata kerja pelaksanaan Landreform.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 99 - 110	
38	No.38 Tahun 1981 21 Februari 1981	Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform sebagai dimaksud dalam Keppres No. 55 Tahun 1980	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 111 - 114	
39	No.39 Tahun 1981 21 Februari 1981	Pembentukan Team antar Dep. Penyusunan RUU Tata Guna Tanah.		
39A	No.39A Tahun 1981 21 Februari 1981	Penyelenggaraan Kursus Administrasi Perkantoran bidang Kearsipan bagi PNS Pusat DDN.		
40	No.40 Tahun 1981 4 Maret 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n Drs.Soejitno Tardjo.		
41	No.41 Tahun 1981 4 Maret 1981	Penyelenggaraan Kursus Pengelolaan Perlengkapan Angkatan ke II DDN.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
42	No.42 Tahun 1981 6 Maret 1981	Penetapan Tipe C Tingkat Instansi Pusat Depdagri pada Setjen Depdagri.		
43	No.43 Tahun 1981 17 Maret 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n .....		
44	No.44 Tahun 1981 7 Maret 1981	Panitia Perumus Rancangan KEPPRES RI ttg Ketentraman dan Ketertiban di daerah.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 115 - 118	
45	No.45 Tahun 1981 7 Maret 1981	Penyelenggaraan Kursus Pengatur Fotogrametri di Jakarta (Diklat).		
46		KOSONG		
47	No.47 Tahun 1981 10 Maret 1981	Pembentukan Direktorat Sosial Politik Prop. dan Kantor Sosial Politik Kab. di Prop.Timtim.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 119 - 122	Tidak berlaku lagi
48	No.48 Tahun 1981 12 Maret 1981	Susunan Anggota Team Tehnis Pemeriksaan dan Penelitian Syarat-syarat Tehnis Pengusulan pemberian tanda-tanda Kehormatan.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 123 - 126	
49	No.49 Tahun 1981 12 Maret 1981	Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Lokakarya Dinas Perburuhan Seluruh Indonesia.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 127 - 130	
50	No.50 Tahun 1981 12 Maret 1981	Team Penyediaan tanah utk Pembangunan Kompleks Perkantoran DDN di Jakarta.		
51	No.51 Tahun 1981 12 Maret 1981	Penyelenggaraan Sekolah Pimpinan Administrasi tingkat Dasar dan Lanjutan Depdagri oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 131 - 134	
52	No.52 Tahun 1981 12 Maret 1981	Pendelegasian Wewenang membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan PNS dalam lingkungan Depdagri.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 135 - 138	
52A	No.52A Tahun 1981 12 Maret 1981 65/KPTS/1981	SKB Mendagri dan Men. PU ttg Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 139 - 146	
53	No.53 Tahun 1981 16 Maret 1981	Pembentukan Panitia Pertimbangan Pusat	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 147 - 152	
54	No.54 Tahun 1981 19 Maret 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n Drs. Slamet Moelyono.		
55	No.55 Tahun 1981 19 Maret 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n Sardjono Djojomihardjo.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
56	No.56 Tahun 1981 19 Maret 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n Dharyanto.		
57	No.57 Tahun 1981 19 Maret 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n M. Swardi.		
58	No.58 Tahun 1981 19 Maret 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n Ny.Koesbijati Soebekti.		
59	No.59 Tahun 1981 19 Maret 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a/n Haji Machmud.		
60	No.60 Tahun 1981 19 Maret 1981	Penyempurnaan Standarisasi Penggunaan Peralatan Telekomunikasi Depdagri	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 153 - 156	
61	No.61 Tahun 1981 19 Maret 1981	Perpajangan waktu tugas bagi SK MDN No.234 Th.1980 ttg Pembentukan Team Penyempurnaan ttg Pemerintahan DKI Jakarta.		
62	No.62 Tahun 1981 19 Maret 1981	Pembentukan Markas Wilayah Pertahanan Sipil di Prop. Dati I Timor Timur	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 157 - 160	Tidak Berlaku Lagi
63	No.63 Tahun 1981 26 Maret 1981	Penyelenggaraan Penataran Sosial Politik bagi Para Komawil Hansip Dati II Kab./Kodya.		
64	No.64 Tahun 1981 26 Maret 1981	Penggantian Wakil Ketua Team Pelaksana Pembangunan Pusat Prov. Dati I Tim-Tim.		
65	No.65 Tahun 1981 26 Maret 1981	Pembentukan Team Penyempurnaan RUU Kependudukan Antar Komponen di Lingkungan Depdagri.		
66	No.66 Tahun 1981 26 Maret 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. Ny.Hartini Tranggono,SH.		
67	No.67 Tahun 1981 30 Maret 1981	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Dati I dan Sekretariat DPRI Tk. I Timor Timur	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 161 - 224	Tidak Berlaku Lagi
68	No.68 Tahun 1981 30 Maret 1981	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Dati II dan Sekretariat DPRD Tk II di Wilayah Prop. Timor Timur	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 225 - 241	Tidak Berlaku Lagi
69	No.69 Tahun 1981 4 April 1981	Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Wil. Kecamatan di Prop. Dati I Timor Timur	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 242 - 248	Tidak Berlaku Lagi
70	No.70 Tahun 1981 30 Maret 1981	Penyelenggaraan Diskusi Panel/Lokakarya Perencanaan Pembangunan Daerah di Wonosobo.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
71	No.71 Tahun 1981 31 Maret 1981	Pembelian Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Drs.Pramono Hadi.		
72A	No.72 Tahun 1981 31 Maret 1981	Pembelian Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Drs.Pramono Hadi.		
72	No.72 Tahun 1981 1 April 1981	Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.		Diubah dg Kepmen No.75 Th.1983 Dicabut dg Kepmen No.92 Th.1992
73	No.73 Tahun 1981 1 April 1981	Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Proyek Pengamanan Politik Ditjen Sospol 81/82.		
74	No.74 Tahun 1981 1 April 1981	Team Penyusunan Sumbangan Pikiran Bahan GBHN 1983 Depdagri.		
75	No.75 Tahun 1981 4 April 1981	Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usaha Uang Perangsang	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 249 - 252	Dicabut dg Kepmen No.27 Th.2002
76	No.76 Tahun 1981 4 April 1981	Pembentukan Team Pembinaan Penataan Guru Agama Sekolah Dasar Tingkat Pusat.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 253 - 258	
77	No.77 Tahun 1981 11 April 1981	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dalam Lingkungan Ditjen Sospol.		
78	No.78 Tahun 1981 13 April 1981	Penghapusan barang Inventaris yang tidak dapat digunakan lagi.		
79	No.79 Tahun 1981 13 April 1981	Jual Beli Kendaraan Perorangan Dinas Negara a/n Drs.Suroso.		
80	No.80 Tahun 1981 5 September 1981	Jual Beli Kendaraan Perorangan Dinas Negara a/n Syukur Juhri.		
81	No.81 Tahun 1981 5 September 1981	Jual Beli Kendaraan Perorangan Dinas Negara a/n Ahmad Dachri.		
82	No.82 Tahun 1981 18 April 1981 271/Kpts/Um/4/81	SKB Mendagri, & Men. Pertanian ttg Perpanjangan batas waktu dalam pasal 6 ayat (1) Kep. Bersama Mendagri & Men.Pertanian No. 122 Th.1980 ttg 351/Kpts/Um/6/80 mengenai batas waktu penertiban & Penataan Kembali Perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 263 - 264	
83	No.83 Tahun 1981 20 April 1981	Penggantian Bendaharawan Rutin pada ITJEN Depdagri.		
84	No.84 Tahun 1981 20 April 1981	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dalam Lingkungan Itjen DDN.		
85	No.85 Tahun 1981 25 April 1981	SKB Menteri PU, Menteri Pertanian dan Mendagri ttg Koordinasi pengembangan Wilayah Daerah aliran sungai Citanduy	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 265 - 272	
86	No.86 Tahun 1981 25 April 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. Drs.Bambang Purnomo.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
87	No.87 Tahun 1981 25 April 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. Drs.Soeparmanto.		
88	No.88 Tahun 1981 25 April 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. Soedjoko.		
89		KOSONG		
90	No.90 Tahun 1981 25 April 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. R.O. Kaisiry.		
91	No.91 Tahun 1981 25 April 1981	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Dalam Lingkungan Badan Diklat Depdagri.		
92	No.92 Tahun 1981 25 April 1981	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Dalam Lingkungan Ditjen Bangda Depdagri.		
93	No.93 Tahun 1981 29 April 1981 Km.110/AL.106/Phb/81	SKB Mendagri dan Ment. Perhubungan ttg batas-batas lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 273 - 278	
94	No.94 Tahun 1981 30 April 1981	Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Dati I Jambi, Sulteng, NTB, Kalteng dan Irian Jaya.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 279 - 282	
95	No.95 Tahun 1981 30 April 1981	Pembentukan Team Perumahan Dinas Depdagri.		
96	No.96 Tahun 1981 30 April 1981	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek Dalam Lingkungan Ditjen PMD DDN.		
97	No.97 Tahun 1981 26 Sept 1981	Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a.n Abu Kasam.		
98	No.98 Tahun 1981 26 Sept 1981	Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara a.n Sukardi.		
99	No.99 Tahun 1981 30 April 1981	Pembentukan Team Penyusun Rancangan PP ttg Hak Guna Usaha.		
100	No.100 Tahun 1981 30 April 1981	Susunan Pengasuh Majalah Mimbar Depdagri	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 283 - 286	
101	No.101 Tahun 1981 25 April 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Drs. M.Hasyim Parakasi.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
102	No.102 Tahun 1981 30 April 1981	Susunan Panitia Pemeriksaan dan Peneliti Pembelian/Pembangunan Depdagri.		
103	No.103 Tahun 1981 30 April 1981	Susunan Panitia Pembelian dan Pembangunan Depdagri.		
104	No.104 Tahun 1981 4 Mei 1981	Pembagian Kotamadya Dati II yang belum terbagi dalam Wilayah Kecamatan dalam Wilayah yang Setingkat dg Kecamatan.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 287 - 290	
105	No.105 Tahun 1981 4 Mei 1981	Pembagian Kotamadya Dati II yang belum terbagi dalam wilayah Kec. dlm wil. yg setingkat dengan kec. di Prop. Dati I Sumut.	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 291 - 294	
106	No.106 Tahun 1981 4 Mei 1981	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Dalam Lingkungan Ditjen PUM dan OTDA DDN.		
107	No.107 Tahun 1981 9 Mei 1981 No.257/KMK.03/81 No.143/KPTS/81 No.982/K/5/81	SKB MDN, Menkeu, MenPU dan Menko Ekuin ttg Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Dati I 1981/82.		
108	No.108 Tahun 1981 9 Mei 1981 No.256/KMK.03/81 No.981/K/5/81	SKB MDN, Menkeu, dan Menko Ekuin/ Bappenas tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Dati II 1981/82.		
109	No.109 Tahun 1981 9 Mei 1981 No.252/KMK.03/81 No.0160a/P/81 No.983/K/5/81 No.40a Th.1981	SKB MDN, Menkeu, P dan K, Agama dan Menko Ekuin/Bappenas ttg Penetapan Jumlah Bantuan & Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan SD Th.1981/82.		
110	No.110 Tahun 1981 9 Mei 1981 No.259/KMK.03/81 No.218B/Menkes/SKB/V/81 No.984/K/5/81	SKB MDN, Menkeu, Menkes dan Menko Ekuin ttg Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 81/82.		
111		KOSONG		
112	No.112 Tahun 1981 9 Mei 1981 No.300/KMK.03/81 No.216/A/Kep/V/81 No.986/K/5/81 No.14/3/Kep/GBJ	SKB MDN, Menkeu, Menperdag dan Koperasi dan Menko Ekuin ttg Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar 81/82.		
113	No.113 Tahun 1981 9 Mei 1981	Pedoman Pelaksanaan Bantuan Penunjang Jalan Kab. Dati II 1981/1982		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
114		KOSONG		
115	No.115 Tahun 1981 15 Mei 1981	Penambahan Anggota Team Penyusunan Sumbangan Pikiran Bahan GBHN 1983 Depdagri.		
116	No.116 Tahun 1981 15 Mei 1981	Pedoman Pengawasan Umum di lingkungan Depdagri	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 295 - 306	
117	No.117 Tahun 1981 18 Mei 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. A. Sam Ani..		
118	No.118 Tahun 1981 18 Mei 1981	Penunjukan/Penggantian Bendaharawan Kantor Pusat Ditjen Kesbang Depdagri.		
119	No.119 Tahun 1981 18 Mei 1981	Penunjukan Bendaharawan Gaji pada Badan Diklat Depdagri.		
120	No.120 Tahun 1981 18 Mei 1981	Penggantian Bendaharawan pada Ditjen PUM dan OTDA Depdagri.		
121	No.121 Tahun 1981 25 Mei 1981	Penggantian Bendaharawan pada Ditjen BANGDA Depdagri.		
122	No.122 Tahun 1981 25 Mei 1981	Pembentukan Team Pengembangan Sistem Informasi Depdagri.		
123	No.123 Tahun 1981 25 Mei 1981	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek dalam Lingkungan Ditjen Agraria Depdagri.		
124	No.124 Tahun 1981 26 Mei 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. Drs. Moegiatanto.		
125	No.125 Tahun 1981 26 Mei 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. Mansyur Gaek.		
126	No.126 Tahun 1981 26 Mei 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. Drs.H.Soemarno.		
127	No.127 Tahun 1981 3 Juni 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. H.Sudjak Darmo S.SH.		
128	No.128 Tahun 1981 3 Juni 1981	Pembentukan Seksi Tataguna Tanah pada Kantor Agraria Kab./Kodya Terpadu.		
129	No.129 Tahun 1981 5 Juni 1981	Susunan Personalia Tim Peneliti Tanda Kehormatan Depdagri.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
130	No.130 Tahun 1981 5 Juni 1981	Penunjukan Wakil Sekretaris Umum dan Para Kepala Bidang pada Sekretariat Koordinasi Urusan Timor Timur	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 307 - 310	Tidak Berlaku lagi
131	No.131 Tahun 1981 9 Juni 1981	Penunjukan rekanan utk melaksanakan pengadaan Mesin Sandi Cryptograph-C-52 utk Memenuhi Kebutuhan Sandi Depdagri.		
132	No.132 Tahun 1981 9 Juni 1981	Pejabat Penilai bagi PNS yang diangkat Menjadi Gubernur Kepala Dati I Wakil Gubernur Kepala Dati I dan Bupati/ Walikota madya KDH Tk II	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 311 - 312	
133	No.133 Tahun 1981 13 Juni 1981	Penunjukan Pejabat-pejabat di Lingkungan Depdagri yang diberi kuasa untuk atas nama Mendagri menandatangani Formulir Nota Persetujuan Kepala BAKN untuk permintaan persetujuan Mutasi	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 313 - 316	
134	No.134 Tahun 1981 15 Juni 1981	Penunjukan pejabat-pejabat di lingkungan Depdagri yang diberi kuasa untuk atas nama Mendagri Menandatangani Nota Persetujuan Mendagri	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 317 - 320	
135	No.135 Tahun 1981 15 Juni 1981	Pengangkatan Penatar Tipe C Tingkat Instansi Pusat Depdagri.		
136	No.136 Tahun 1981 15 Juni 1981	Pembentukan Panitia Pengarah dan Panitia Teknis Pemetaan Urban Dalam Rangka Proyek Urban IV-IBRD		
137	No.137 Tahun 1981 22 Juni 1981	Pembentukan Panitia Rapat Teknis Pelaksanaan Program Inpres Penunjang Jalan Kabupaten.		
138	No.138 Tahun 1981 22 Juni 1981	Izin Penyelenggaraan International Rally.		
139	No.139 Tahun 1981 23 Juni 1981 139/Kpts/1981	SKB Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Mendagri RI, ttg Pembentukan Team Koordinasi Pusat Pengembangan Wilayah daerah Sungai Citanduy	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 321 - 324	
140	No.140 Tahun 1981 25 Juni 1981	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek Latihan Perenc. dan Tata Laksana Pembangunan Regional di Lingkungan Badan Diklat Depdagri.		
141	No.141 Tahun 1981 26 Juni 1981	Penunjukan Langsung untuk pekerjaan Analisa data penggambaran & pencetakan Peta-peta untuk proyek Tata Guna Tanah dan Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah daerah Transmigrasi di Pusat Ditjen. Agraria Depdagri	Himp. KMDN (I) 1981 Hal : 325 - 332	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
142	No.142 Tahun 1981 26 Juni 1981	Pembentukan Team Penyusunan Program Pembangunan Depdagri 1982/1983		
143	No.143 Tahun 1981 1 Juli 1981	Pembentukan Team Penerbitan Ijazah Palsu di Lingkungan Depdagri	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 1 - 6	
144	No.144 Tahun 1981 3 Juli 1981 87/Kpts/1981 SK.2/AY.003/Phb.81	SKB Mendagri, Men. PU, Menhub ttg Pencabutan SKB Mendagri, Ment. PUTL, Menhub. No.105 Th.1972 205/Kpts/1972 SK. 355/U/1972 ttg Penertiban Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 7 - 10	
145	No.145 Tahun 1981 4 Juli 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. H.R.Soemihartono.		
146	No.146 Tahun 1981 4 Juli 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. Thamrin Thohiruddin.		
147	No.147 Tahun 1981 4 Juli 1981	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pemukiman Kembali Penduduk Desa Prop. Irla.		
148	No.148 Tahun 1981 4 Juli 1981	Penunjukan Bendaharawan dan Atasan langsung Bendaharawan pada Lingkungan Ditjen Sospol di Daerah.		
149	No.149 Tahun 1981 4 Juli 1981	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pembangunan Air Minum Pedesaan di Prop. Maluku.		
150	No.150 Tahun 1981 9 Juli 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. Soeparno S.Utomo.		
151	No.151 Tahun 1981 9 Juli 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an. Ny.Suwarti Soedjoko,Bsc.		
152	No.152 Tahun 1981 9 Juli 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Soedharmo Djodjodiwongso		
153	No.153 Tahun 1981 11 Juli 1981	Penyelenggaraan Kursus Kader Pimpinan Pertahanan Sipil Depdagri.		
154	No.154 Tahun 1981 15 Juli 1981	Pembentukan Team Penyusunan Manual Kehumasan dan Bahan Informasi Baku DDN.		
155	No.155 Tahun 1981 15 Juli 1981	Pembentukan Team Bantuan Teknis Pengembangan Prop. Tim-Tim.		
156	No.156 Tahun 1981 15 Juli 1981	Penunjukan Pimpinan Proyek Kursus Non Reguler dan Kursus Kader Pimpinan Hansip di Kendari dan Palembang.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
157	No.157 Tahun 1981 15 Juli 1981	Pembentukan Team Monitoring Pelaks. Proyek-proyek Pembangunan antar Departemen/Lembaga Prop. Dati I Tim-Tim.		
158	No.158 Tahun 1981 15 Juli 1981	SKB MDN, P & K Menlu, Menag, Menpan ttg Pemilihan Guru Teladan Th.1981 dan Pembentukan Pan Nas Pemilihan Guru Teladan 81/82.		
159	No.159 Tahun 1981 15 Juli 1981	Pembentukan Team Kerja antar Departemen (Ex Officio) mengenai urusan pemerintahan dan pembangunan Tim-Tim.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 11 - 14	
160	No.160 Tahun 1981 15 Juli 1981	Pemilihan Guru teladan Th.1981 dan Pembentukan Panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan Th.1981.		
161	No.161 Tahun 1981 16 Juli 1981	Pembentukan Team Pembinaan Bantuan Pembangunan Desa Th.1981/1982.		
162	No.162 Tahun 1981 16 Juli 1981	Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Masing2 Dati I Th.81/82 tahap Pertama.		
163	No.163 Tahun 1981 18 Juli 1981	Pembentukan BP 7 Dati I Seluruh Indonesia.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 15 - 18	Dicabut dg KMDN No.42 Th.1999
164	No.164 Tahun 1981 18 Juli 1981	Pembentukan Team Pembina dan Team Teknis Pengembangan Area Th.1981/1982.		
165	No.165 Tahun 1981 23 Juli 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.BH. Sutardjo.		
166	No.166 Tahun 1981 23 Juli 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Drs.Soejono Sastro.		
167	No.167 Tahun 1981 23 Juli 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Drs.Karyadi Gunawan.		
168	No.168 Tahun 1981 23 Juli 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Muljadi.		
169	No.169 Tahun 1981 23 Juli 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Drs. Thamrin Noer.		
170	No.170 Tahun 1981 29 Juli 1981	Pengesahan terhadap pengadaan Pinjaman/Kredit Investasi pemerintah Kotamadya Dati II Pematang Siantar untuk Pembangunan Pusat Pasar Horas di Pematang Siantar.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 19 - 24	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
171	No.171 Tahun 1981 30 Juli 1981	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kab./Kodya Dati II dalam Lingkungan Prop. Sumsel.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 25 - 30	
172	No.172 Tahun 1981 30 Juli 1981	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kodya Dati II Solok dalam Lingkungan Prop. Dati I Sumbar.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 31 - 36	
173	No.173 Tahun 1981 30 Juli 1981	SKB MDN, P dan K ttg Pelaksanaan Pengangkatan Guru Teladan dan Penjaga SD Negeri TA.80/81.		
174	No.174 Tahun 1981 30 Juli 1981	SKB MDN, P & K, Menag ttg Pelaksanaan Pengadaan Guru Agama SD Negeri Th.80/81.		
175	No.175 Tahun 1981 30 Juli 1981	SKB MDN, P & K, Menag ttg Pelaksanaan Pengadaan Guru Agama SD Negeri Th.81/82.		
176	No.176 Tahun 1981 30 Juli 1981	SKB. Mendagri, Ment. P&K dan Ment. Agama ttg Pelaksanaan Pengangkatan Guru Agama SD. Negeri TA. 1981/1982.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 37 - 46	
177	No.177 Tahun 1981 30 Juli 1981	Pembentukan BKP-MD Prop. Propinsi Riau,Bali, Sulawesi Tenggara dan Maluku.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 47 - 50	
178	No.178 Tahun 1981 5 Agustus 1981	Pembentukan Kantor Agraria Kodya Tanjung Balai.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 51 - 54	
179	No.179 Tahun 1981 5 Agustus 1981	Penyelenggaraan Rapat Kerja Khusus kpd Ditjen Agraria Prop.Seluruh Indonesia.		
180	No.180 Tahun 1981 5 Agustus 1981	Temu Karya Kepala Desa, Desa Juara Pertama perlombaan Desa Tingkat Prop. Seluruh Indonesia.		
181	No.181 Tahun 1981 5 Agustus 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Drs. Misbach.		
182	No.182 Tahun 1981 8 Agustus 1981	Perubahan Lampiran Kepmendagri No.105 Th.1981 ttg Pembagian Kodya Dati II yg belum terbagi dalam wilayah Kec. Di Prop. Dati I Sumatera Utara.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 55 - 58	
183	No.183 Tahun 1981 8 Agustus 1981	Penetapan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek Pembinaan Bantuan Pembangunan SD untuk Pusat Th.1981/82.		
184	No.184 Tahun 1981 8 Agustus 1981	Penggantian Pimpinan Proyek Peningkatan Fasilitas Prasarana Fisik Agraria Prop.Sulsei.		
185	No.184 Tahun 1981 8 Agustus 1981	Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek/Bag Proyek Pemukiman Kembali Penduduk Desa di Prop. Irian Jaya.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
186	No.186 Tahun 1981 8 Agustus 1981	Penggantian Pimpinan Proyek/Bagian Proyek pada Ditjen Sospol Lampung a.n Drs.Swardi Ramli.		
187	No.187 Tahun 1981 8 Agustus 1981	Pengesahan Pinjaman Pemerintah Prop. Dati I Jateng dari Pemerintah Pusat Cq.Menkeu dalam rangka Pengembangan Badan Kredit Kec. Di Prop. Dati I Jateng.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 59 - 66	
188	No.188 Tahun 1981 14 Agustus 1981	SKB MDN, P & K, Menkeu, Menag ttg Panitia Penetapan Guru Teladan.		
189	No.189 Tahun 1981 15 Agustus 1981	Proyek Operasi Nasional Agraria (ORONA).		
190	No.190 Tahun 1981 15 Agustus 1981	Penyelenggara Diskusi Panel/Lolakarya Perencanaan Pembangunan Pemda di Sumut.		
191	No.191 Tahun 1981 15 Agustus 1981	Penggantian Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek Pembinaan Hansip dan Menwa Prop. Lampung.		
192	No.192 Tahun 1981 15 Agustus 1981	Pembentukan Team Peningkatan Sistim Kearsipan dan Administrasi Perkantoran Depdagri.		
193	No.193 Tahun 1981 15 Agustus 1981	Penggantian Pemimpin/Bendahara Proyek/ Bagian Proyek pd Dit. Bangdes di Daerah.		
194	No.194 Tahun 1981 15 Agustus 1981	Pembentukan Panitia Penyaringan CPNS Pusat Depdagri.		
195	No.195 Tahun 1981 15 Agustus 1981	Pembentukan Tim Penguji Pelamar CPNS Pusat Depdagri.		
196	No.196 Tahun 1981 15 Agustus 1981 No.394/Menkes/SK/VII/81	SKB Menkes dan MDN ttg Pengadaan Obat utk unit Pelayanan Kesehatan Pusat dan Daerah.		
197	No.197 Tahun 1981 18 Agustus 1981	Penyelenggaraan Kursus Aplikasi Camat Wil. Kecamatan WDKP.		
198	No.198 Tahun 1981 19 Agustus 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Drs.Nazir Nasution.		
199	No.199 Tahun 1981 19 Agustus 1981	idem an.Drs.Barjadi Prapantja.		
200	No.200 Tahun 1981 19 Agustus 1981	idem an.Drs.Soeradi Hadisuwarno.		
201	No.201 Tahun 1981 19 Agustus 1981	idem an.Soearno.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
202	No.202 Tahun 1981 19 Agustus 1981	idem an.Drs. Sanjoto.		
203	No.203 Tahun 1981 19 Agustus 1981	idem an.Abdul Wahab BA.		
204	No.204 Tahun 1981 19 Agustus 1981	Penggantian Pemimpin dan Bendaharawan Proye /Bagian Proyek pada Ditjen Sospol di Prop.Timtim dan Riau.		
205	No.205 Tahun 1981 19 Agustus 1981	Penunjukan Rekanan utk melaksanakan Pengadaan Peralatan Radio utk Jaringan Radio Telekomunikasi a.. PT.Habadi Beungkar Ltd.		
206	No.206 Tahun 1981 19 Agustus 1981	Penunjukan Rekanan utk Pelaksanakan Pengadaan Peralatan DDN.		
207	No.207 Tahun 1981 19 Agustus 1981	Pembentukan Team Pembinaan Umum Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Dati I Pusat Th.1981/82.		
208	No.208 Tahun 1981 19 Agustus 1981	Pembentukan Team Pembinaan Umum Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Dati.II Pusat Th.1981/82.		
209	No.209 Tahun 1981 19 Agustus 1981	Pembentukan Team Pembinaan Umum Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Pusat Th.1981/82.		
210	No.210 Tahun 1981 19 Agustus 1981	Pembentukan Team Pembinaan Umum Pelaksanaan Bantuan Pembangunan SD Pusat Th.1981/82.		
211	No.211 Tahun 1981 22 Agustus 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Drs.Moh. Soleh.		
212	No.212 Tahun 1981 27 Agustus 1981	Pengadaan Mesin Cetak Mini Offset Merk Rotto utk Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Dati II dalam Prop. Dati I Sumut.		
213	No.213 Tahun 1981 27 Agustus 1981	Perubahan Susunan Keanggotaan Team Khusus Agraria Tingkat Pusat.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 67 - 70	
214	No.214 Tahun 1981 27 Agustus 1981	Penunjukan dan Penugasan Anggota Team Petugas Haji Indonesia (TPHI) a.n. Ruslan, M.Riva Cs		
215	No.215 Tahun 1981 29 Agustus 1981	Penunjukan Menempati Rumah di Lingkungan DDN a.n. Ibnu Soleh Cs.		
216	No.216 Tahun 1981 31 Agustus 1981	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/ 1982 utk Kodya Dati II Paya-kumbuh dlm Lingk. Prop. Dati I Sumbar.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 71 - 76	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
217	No.217 Tahun 1981 31 Agustus 1981	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit pembangunan dan pemugaran pasar Th.1979/1980 untuk Kab. /Kodya Dati II Lingkungan Prop. Dati I Sumbar.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 77 - 82	
218	No.218 Tahun 1981 2 September 1981	Pengesahan Pinjaman bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kab. dalam Lingkungan Prop. Dati I Jabar.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 83 - 88	
219	No.219 Tahun 1981 2 September 1981	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kab. dalam Lingkungan Prop. Dati I Jabar.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 89 - 94	
220	No.220 Tahun 1981 2 September 1981	Besarnya Pungutan Biaya dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Tanah yang Berasal dari Pemberian Hak atas Tanah Negara, penegasan hak tanah adat dan konvensi bekas hak tanah adat yang menjadi obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 95 - 100	
221	No.221 Tahun 1981 5 September 1981	Penunjukan dan Penugasan Anggota Team Petugas Haji Indonesia (TPHI).		
222	No.222 Tahun 1981 5 September 1981	Pembentukan Subdit Landreform Agraria pada Direktorat Agraria Propinsi.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 101 - 104	
223	No.223 Tahun 1981 5 September 1981	Penyelenggaraan Kursus Pengawas Bidang Manajemen Audit Jakarta.		
224	No.224 Tahun 1981 5 September 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.M.Syukri Zahri.BA.		
225	No.225 Tahun 1981 8 September 1981	Persetujuan Penunjukan langsung PT.Habadi Beunghar Ltd Jkt selaku Pelaksana/Kontrak utk Pengadaan Pemasangan Pesawat SBB dan Adaptor Spare Part Radio Mesin.		
226	No.226 Tahun 1981 8 September 1981	Persetujuan Penunjukan langsung PT. Pembangunan Perumahan selaku Pelaksana/ Kontraktor Pembangunan Gedung KDH Tk.I Jatim.		
227	No.227 Tahun 1981 8 September 1981	Persetujuan Penunjukan langsung PT.Adhi Karya selaku Pelaksana/Kontraktor Pembangunan Gedung Samsat dan Dinas Pendapatan Prop. Dati I Jateng.		
228	No.228 Tahun 1981 8 September 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Moeljoto.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
229	No.229 Tahun 1981 8 September 1981	Pengesahan Pinjaman bantuan kredit pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kab.-Kabupaten dalam Lingkungan Prop. Dati I Kalbar.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 105 - 110	
230	No.230 Tahun 1981 10 September 1981	Pembentukan Team Pembina Pengendalian Operasional dan Pelaks. Bagian Proyek di Tingkat Pusat 1980/81 Proyek Pemukiman kembali penduduk desa bekas GPL/CPM Irja.		
231	No.231 Tahun 1981 10 September 1981	Pembentukan Organisasi dan Penunjukan Personil Penyelenggaraan Bagpro Tingkat Pusat Th.80/81 Pembangunan Air Minum Pedesaan Prop.Maluku.		
232	No.232 Tahun 1981 10 September 1981	Pembentukan Team Perencanaan Umum Ditjen Bangda.		
233	No.233 Tahun 1981 10 September 1981	Pembentukan Team Pembinaan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah 1981/82.		
234	No.234 Tahun 1981 19 September 1981	Pembentukan Team Penyusunan Manual dan Pedoman Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.		
235	No.235 Tahun 1981 19 September 1981	Pembentukan Team Penyusunan Manual dan Pedoman Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SIDI).		
236	No.236 Tahun 1981 24 September 1981	Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Buku Petunjuk Panduan Kepemimpinan di Jajaran DDN.		
237	No.237 Tahun 1981 24 September 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Achmad Noerdin, SH.		
238	No.238 Tahun 1981 24 September 1981	Idem a.n. Ny. Suryati Sumaryo.		
239	No.239 Tahun 1981 24 September 1981	Idem a.n. A.D. Usman.		
240	No.240 Tahun 1981 24 September 1981	Idem a.n. H.M.Victor Matondang,SH.		
241	No.241 Tahun 1981 26 September 1981	Pembentukan Team Penelitian dan Penerapan Calon Developer Penukar Kompleks Pergudangan Depdagri.		
242	No.242 Tahun 1981 26 September 1981	Penyelenggaraan Latihan Singkat Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Pegawai Bappeda Th.I di Jakarta.		
243	No.243 Tahun 1981 26 September 1981	Penyelenggaraan Latihan Pendidikan Kependudukan di Lingkungan Depdagri.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
244	No.244 Tahun 1981 26 September 1981	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pengembangan Pasar pada Ditjen Bangda.		
245	No.245 Tahun 1981 26 September 1981	Penunjukan Bendaharawan Rutin/ Bendaharawan Gaji dan Atasan Langsung Bendaharwan pada Markas Wilayah Pertahanan Sipil Prop. NTT dan Sultra.		
246	No.246 Tahun 1981 30 September 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Sogiman.		
247	No.247 Tahun 1981 30 September 1981	Idem a.n. E.Soemarna.		
248	No.248 Tahun 1981 30 September 1981	Penggantian Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek di Lingkungan Ditjen Agraria yg Berada di prop. Jateng.		
249	No.249 Tahun 1981 1 Oktober 1981	Penggantian Pemimpin Proyek Pengesahan Rencana Kota pada Ditjen PUM dan Otda Depdagri.		
250	No.250 Tahun 1981 1 Oktober 1981	Penunjukan Bendaharawan Rutin/ Bendaharawan Gaji dan Atasan Langsung Bendaharawan pd Ditjen Sospol Depdagri.		
251	No.251 Tahun 1981 6 Oktober 1981	Penyelenggaraan Kursus Pengatur Agraria Jurusan Landerform di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Kupang.		
252	No.252 Tahun 1981 6 Oktober 1981	Penyelenggaraan Kursus Managemen Audit di Ujung Pandang.		
253	No.253 Tahun 1981 7 Oktober 1981	Penunjukan Koperasi Pegawai negeri Dharma Praja di Banjarmasin.		
254	No.254 Tahun 1981 7 Oktober 1981	Rencana Penerimaan Ipeda tiap Daerah Tk.II tanpa Sektor Pertambangan dan Perhutanan Asal luran Hasil Hutan Th.81/82.		
255	No.255 Tahun 1981 7 Oktober 1981	Penyelenggaraan Latihan Data Bagi Pegawai Bappeda Tk.I di Jakarta.		
256	No.256 Tahun 1981 7 Oktober 1981	Penyelenggaraan Pendidikan Perwira Cadangan Dalam Lingkungan Depdagri.		
257	No.257 Tahun 1981 7 Oktober 1981	Perubahan Beberapa pasal dari Keputusan Mendagri No. 72 Tahun 1981 ttg Organisasi dan Tatakerja Depdagri	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 111 - 116	
258	No.258 Tahun 1981 9 Oktober 1981	Penggantian Atasan Langsung Bendaharawan pada Ditjen PUM dan Otda		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
259	No.259 Tahun 1981 9 Oktober 1981	Penyelenggaraan Konsultasi Nasional Bappeda Th.1981.		
260	No.260 Tahun 1981 14 Oktober 1981	Pemberhentian dengan Hormat Pemimpin Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak-hak Tanah dalam Lingkungan Ditjen Agraria.		
261	No.261 Tahun 1981 14 Oktober 1981	Penunjukan Sementara Pemimpin Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak2 Tanah dlm Lingk. Ditjen Agraria.		
262	No.262 Tahun 1981 14 Oktober 1981	Penyelenggaraan Kursus Pengatur Agraria Jurusan Tataguna Tanah di Jakarta.		
263	No.263 Tahun 1981 14 Oktober 1981	Pembentukan Team Penyusunan Rancangan UU ttg Pertahanan Sipil.		
264	No.264 Tahun 1981 15 Oktober 1981	Pembentukan Direktorat Pembangunan Desa Prop. Dati I dan kantor Pembangunan Desa Dati II Timor Timur	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 117 - 120	
265	No.265 Tahun 1981 15 Oktober 1981	Pembelian Mesin Gilas Jalan Bergetar dan Mesin Pemadat Tanah Merk Barata Produksi Dalam Negeri.		
266	No.266 Tahun 1981 15 Oktober 1981	Pembentukan Team Penyusunan rancangan PP ttg Tata Guna Tanah.		
267	No.267 Tahun 1981 15 Oktober 1981	Pembentukan Team Penyusunan rancangan PP ttg Hak Guna Bangunan.		
268	No.268 Tahun 1981 19 Oktober 1981	Penyelenggaraan Kursus Pengatur Fotogrametri di Jakarta.		
269	No.269 Tahun 1981 19 Oktober 1981	Pembentukan Panitia Pusat Penerimaan/ Penyaringan Mahasiswa Akademi Agraria dan Siswa Kursus Pengatur Agraria.		
270	No.270 Tahun 1981 19 Oktober 1981	Penyelenggaraan Kursus Pengatur Agraria Jurusan Tata Guna Tanah di Tanjung Karang dan Ujung Pandang.		
271	No.271 Tahun 1981 19 Oktober 1981	Penggantian Pimpinan Proyek Prasarana Fisik Mobilitas Ditjen Sospol.		
272	No.272 Tahun 1981 19 Oktober 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Drs. Moh. Usman.		
273	No.273 Tahun 1981 19 Oktober 1981	Idem a.n. Ir.M.I. Sahertian.		
274	No.274 Tahun 1981 19 Oktober 1981	Idem a.n. Gutomo.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
275	No.275 Tahun 1981 19 Oktober 1981	Idem a.n.Ny.Sukarti Jenggo Kusman Sidauruk.		
276	No.276 Tahun 1981 21 Oktober 1981	Pembentukan Team Peningkatan Administrasi Kepegawaian Depdagri	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 121 - 124	
277	No.277 Tahun 1981 26 Oktober 1981	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan pemugaran Pasar Th.1979/1980 utk kabupaten2 dalam lingkungan Sumatera Barat	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 125 - 130	
278	No.278 Tahun 1981 26 Oktober 1981	Pengesahan Pinjaman bantuan kredit Pembangunan dan pemugaran pasar Tahun 1981/1982 untuk Kodya Dati II Bulittinggi dalam Lingkungan Sumatera Barat	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 131 - 136	
279	No.279 Tahun 1981 26 Oktober 1981	Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Masing2 Dati I 1981/82 (Tahap II)		
280	No.280 Tahun 1981 26 Oktober 1981	Penggantian Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Hansip & Menwa Prop. Jateng.		
281	No.281 Tahun 1981 29 Oktober 1981	Pembentukan Team Pembina Program Pengembangan Wilayah Th.81/82.		
282	No.282 Tahun 1981 7 Nopember 1981	Penggantian Pemimpin Proyek Tata Guna Tanah dan Proyek Pengukuran Daerah transmigrasi di Prop. Riau serta Penggantian Bendaharawan Proyek Pendaftaran Tanah Prop. Jateng.		
283	No.283 Tahun 1981 7 Nopember 1981	Penunjukan Tenaga Lepas utk Membantu Pengurus Dana Simpan Pinjam DDN.		
284	No.284 Tahun 1981 9 Nopember 1981	Perubahan Susunan Keanggotaan Team Khusus Agraria Tingkat Propinsi.		
285	No.285 Tahun 1981 9 Nopember 1981	Penggantian Pemimpin/Benpro Khusus non Reguler di Prop. Sumsel.		
286	No.286 Tahun 1981 9 Nopember 1981	Penggantian Pemimpin Proyek pada Direktorat Sospol Prop. Kalsel.		
287	No.287 Tahun 1981 14 Nopember 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Soebekti.		
288	No.288 Tahun 1981 14 Nopember 1981	Idem a.n. Dehan Soegondo.		
289	No.289 Tahun 1981 14 Nopember 1981	Idem a.n. Salam.		
290	No.290 Tahun 1981 14 Nopember 1981	Idem a.n. Lukman Abubakar.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
29	No.291 Tahun 1981 21 Nopember 1981	Panitia Penyelenggara Pertemuan Pembahasan Inpres Dati I dan APBD.		
291	No.291 Tahun 1981	KOSONG		
292	No.292 Tahun 1981 21 Nopember 1981	Pembentukan Kontingen POR Korpri XI Th.1981 unit Korpri Depdagri.		
293	No.293 Tahun 1981 21 Nopember 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Soekardjo.		
294	No.294 Tahun 1981 21 Nopember 1981	Idem a.n. Paimin.		
295	No.295 Tahun 1981 21 Nopember 1981	Penundaan/Penghentian Sementara Kegiatan Penelitian Survey dan Kegiatan lapangan Selama Masa Kampanye, Hari Pemungutan Suara dan Masa Penghitungan Suara Pemilu Th.1982.		
296	No.296 Tahun 1981 21 Nopember 1981	Penyelenggaraan Sekolah Staf dan Pendidikan Administrasi DDN Angkt. VII.		
297	No.297 Tahun 1981 21 Nopember 1981	SKB Mendagri, Ment, Pertanian dan Ment,Kehakiman ttg Syarat-syarat Khusus dan Pemberian Hak Guna Usaha Baru untuk Perusahaan Perkebunan Besar dalam rangka melaksanakan Keppres No.32 Tahun 1979	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 137 - 142	
298	No.298 Tahun 1981 28 Nopember 1981	Pembentukan Panitia Penyelenggara Konsultasi Pemantapan Perencanaan & Pelaks. Bantuan Pembangunan SD Th.81.		
299	No.299 Tahun 1981 28 Nopember 1981	Pembentukan Team Pembinaan Umum Pelaks. Bantuan Pemetaan SD Wakil Kecamatan dan Desa Wakil Pusat Th.'81/82.		
300	No.300 Tahun 1981 28 Nopember 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Soenarko Sospol Hankam.		
301	No.301 Tahun 1981 2 Desember 1981	Pengadaan Mesin Cetak Mini Offset dalam Lingkungan Ditjen Agraria.		
302	No.302 Tahun 1981 2 Desember 1981 No.716/KMK/04/81	SKB Menkeu dan Mendagri ttg Rencana Penerimaan Ipeda Tiap Dati II tanpa Sektor Pertambangan Asal Iuran Hasil Hutan TA. 81/82.		
303	No.303 Tahun 1981 4 Desember 1981	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pengadaan Mesin Gilas Jalan dan Mesin Pematat Tanah utk Dati II se Indonesia.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
304	No.304 Tahun 1981 5 Desember 1981	Perubahan Susunan Personalia Team Penelitian dan Kehormatan DDN.		
305	No.305 Tahun 1981 5 Desember 1981	Penggantian Pemimpin & Bendaharawan Proyek-proyek dilingkungan Ditjen Agraria yg berada di Prov. Maluku, Kalteng dan Riau.		
306	No.306 Tahun 1981 5 Desember 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Hasanuddin (Itjen).		
307	No.307 Tahun 1981 5 Desember 1981	Idem a.n. Ny. Hadidjah (LPU)		
308	No.308 Tahun 1981 9 Desember 1981	Penyelenggaraan Raker Teknis Kepala Direktorat Agraria Prov. Se Indonesia.		
309	No.309 Tahun 1981 9 Desember 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Sutarno.		
310	No.310 Tahun 1981 9 Desember 1981	Idem a.n. Drs.Slamet Warsito (Diklat)		
311	No.311 Tahun 1981 9 Desember 1981	Idem a.n. Soemardjono Hadi Siswoyo.		
312	No.312 Tahun 1981 16 Desember 1981	Penggantian Pemimpin Proyek bagian Proyek Ditjen PMD Prov. Sumut.		
313	No.313 Tahun 1981 16 Desember 1981	Perubahan dan Penggantian Keanggotaan Team Screening Depdagri	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 143 - 148	
314	No.314 Tahun 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Drs.YX.Seda.		
315	No.315 Tahun 1981 17 Desember 1981	Idem a.n. M.Aris Muhandar.		
316	No.316 Tahun 1981 17 Desember 1981	Idem a.n. G.Soekarno.		
317	No.317 Tahun 1981 17 Desember 1981	Raker Gubernur se Indonesia.		
318	No.318 Tahun 1981 17 Desember 1981	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Pemilikan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara an.Komar Tayim.		
319	No.319 Tahun 1981 17 Desember 1981	Perpanjangan Waktu Tugas bagi SKMDN No.39 Th.1981 ttg Pembentukan Team antar Dep Penyus. RUU Tata Guna Tanah.		
320	No.320 Tahun 1981 22 Desember 1981 No.226/Kep/Menpen/81	SKB Menpen dan Mendagri ttg raker Humas Pemda dan Unsur Penerangan Deppen se Indonesia.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
321	No.321 Tahun 1981 22 Desember 1981	Persetujuan Pembangunan Gelanggang Olahraga di Pontianak sbg Proyek Multi years.		
322	No.322 Tahun 1981 23 Desember 1981	Persetujuan Penunjukan PT.Intisari selaku Pelaksana Pengadaan Alat-alat.		
323	No.323 Tahun 1981 23 Desember 1981	Persetujuan Penunjukan Langsung Pembangunan Perumahan Istana Pagaruyung.		
324	No.324 Tahun 1981 23 Desember 1981	Persetujuan Penunjukan Langsung Pembangunan Stadion Rumbokaluang Tahap IV TA.81/82.		
324A	No.324A Th.1981 23 Desember 1981 No.554/Menkes/SKB/X/81 No.0430a/M/81	SKB Menteri Kesehatan, Menteri P&K dan Mendagri ttg Pemberian Tugas, Tanggung jawab dan penetapan prosedur sebagai rumah sakit pemerintah yang digunakan untuk pendidikan dokter.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 149 - 160	
325	No.325 Tahun 1981 28 Desember 1981	Perubahan DYP Proyek Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan di Pusat Depdagri Th.1980/1981.		
326	No.326 Tahun 1981 28 Desember 1981	Pembentukan Team untuk menyelesaikan persoalan menyelesaikan persoalan tanah2 Ex Swapraja.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 161 - 164	
*	No.584-033 Th.1981 2 Februari 1981	Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah.	L L : 4 hal	Dicabut dg KMSN No.21 Th.1990
*	No.536.666 Th.1981			Dicabut dg KMSN No.50 Th.1999
*	No.140-263 Th.1981 7 April 1981	Pembentukan Kelurahan di Prop. DIY	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 259 - 262	
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1981 22 Januari 1981	Pensuksesan pelaksanaan pembangunan di daerah.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 333 - 338	
2	No. 2 Tahun 1981 4 Februari 1981	Pelaksanaan Kepmendagri No.240 Th.1980 ttg Pedoman Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wil./Dati I & Sekretariat DPRD Tk.I	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 339 - 342	
3	No. 3 Tahun 1981 10 Februari 1981	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.167 Th.1981 ttg Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 343 - 346	
4	No. 4 Tahun 1981 13 Februari 1981	Mekanisme Pengendalian pelaksanaan Program Masuk Desa.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 347 - 356	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
5	No. 5 Tahun 1981 24 Januari 1981	Perjudian	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 357 - 360	
6	No. 6 Tahun 1981 27 Februari 1981	Peningkatan Penuksesan Pelaksanaan Pelita III.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 361 - 372	
7	No. 7 Tahun 1981 27 Februari 1981	Penuksesan Pelaksanaan PEMILU Th.1982.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 373 - 378	
8	No. 8 Tahun 1981 11 Maret 1981	Peningkatan peranan Unit Hubungan Masyarakat Prop. Dati I dan Kabupaten/ Kotamadya Dati II.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 379 - 382	
9	No. 9 Tahun 1981 25 Maret 1981	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-Proyek pembangunan TA.1981/1982 dilingkungan Sekjen Depdagri.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 383 - 406	
10	No.10 Tahun 1981 25 Maret 1981	Pengisian Daftar Isian Penentuan Tipologi Kota-kota di Indonesia.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 407 - 410	
11	No.11 Tahun 1981 4 April 1981	Pemungutan Bersama Pajak Rumah Tangga dan Ipeda.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 411 - 414	
12	No.12 Tahun 1981 4 April 1981	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman Modal.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 415 - 418	
13	No.13 Tahun 1981 4 April 1981	Ketentuan Pelaksanaan berpakaian dinas bagi aparat dinas Pendapatan daerah.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 419 - 420	
14	No.14 Tahun 1981 4 April 1981	Reorganisasi & Reformasi Dinas Pendapatan Dati I dan Dinas Pendapatan Dati II.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 421 - 424	
15	No.15 Tahun 1981 4 April 1981	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Guru-guru Agama Sekolah Dasar yang diangkat dalam TA. 1979/1980.	Himp.KMDN (I) 1981 Hal : 425 - 437	
16	No.16 Tahun 1981 14 April 1981	Laporan pendapatan asli Daerah sendiri.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 165 - 180	
17	No.17 Tahun 1981 11 Mei 1981	Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaks. Bantuan Pembangunan Dati I 1981/1982.		*
18	No.18 Tahun 1981 11 Mei 1981	Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaks. Bantuan Pembangunan Dati.II 1981/1982.		*
19	No.19 Tahun 1981 11 Mei 1981	Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung SD. Th.1981/1982.		*
20	No.20 Tahun 1981 11 Mei 1981	Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Th.1981/1982.		*
21	No.21 Tahun 1981 11 Mei 1981	Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Th.1981/1982.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
22	No.22 Tahun 1981 11 Mei 1981	Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Penghijauan Th.1981/1982.		*
23	No.23 Tahun 1981 11 Mei 1981	Petunjuk Pelaks. bantuan pembangunan Daerah dalam rangka program pembangunan wilayah.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 181 - 196	
24	No.24 Tahun 1981	BATAL		*
25	No.25 Tahun 1981 11 Mei 1981	Petunjuk Pelaksanaan bantuan Pembangunan desa TA.1981/1982	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 197 - 226	
26	No.26 Tahun 1981 11 Mei 1981	Petunjuk Pelaksanaan bantuan Pembangunan Timor Timur TA.1981/1982	-	*
27	No.27 Tahun 1981 20 Mei 1981	Penyelenggaraan Peringatan Hari Krida Pertanian ke IX dan Hari Pangan Sedunia Th.1981. (SKB Mentan dan Mendagri).	-	*
28	No.28 Tahun 1981 23 Mei 1981	Petunjuk Lebih Lanjut Mengenai pelaksanaan bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar Th.1981/1982.	L L : 16 hal	
29	No.29 Tahun 1981	KOSONG		*
29A	No.29A Tahun 1981 11 Agustus 1981	Penyelenggaraan Pekan Penghijauan Nasional XXI Th.1981.		*
30	No.30 Tahun 1981 18 Agustus 1981	Petugas Pembimbing Ibadah dan Pelayanan Kesehatan Haji Daerah. (Inst. Bersama Mendagri, Menag dan Menkes).		*
31	No.31 Tahun 1981 19 Agustus 1981 3U/1981	Instruksi Bersama menteri P&K dan Mendagri ttg Hari Peringatan Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 1981.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 227 - 234	
32	No.32 Tahun 1981 22 Agustus 1981	Pembinaan dan Pengawasan thdp bekas tahanan dan bekas Narapidana G30S/PKI.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 235 - 250	
33	No.33 Tahun 1981 12 Oktober 1981	Petunjuk Pelaksanaan Pemetaan Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan dan Desa.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 251 - 258	
34	No.34 Tahun 1981 28 Oktober 1981	Koordinasi, Pengawasan dan Pengamanan Harga Dasar pembelian jagung kuning, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau .	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 259 - 262	
35	No.35 Tahun 1981 28 Oktober 1981	Koordinasi, Pengawasan dan Pengadaan pangan dalam Negeri.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 263 - 266	
36	No.36 Tahun 1981 18 Nopember 1981	Pelaksanaan Inventarisasi dan Sensus barang perlengkapan milik negara di Depdagri.	Himp.KMDN (II) 1981 Hal : 267 - 270	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
<b>TAHUN 1982</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 1982 9 Juni 1982	Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan & pengawasannya.	L L : 6 hal	
2	No.2 Tahun 1982 9 Juni 1982	Pungutan Desa.	L L : 8 hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
3	No.3 Tahun 1982 9 Juni 1982	Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.	L L : 6 hal	Dicabut dg Permen No.2 Th.1991
4	No.4 Tahun 1982 9 Juni 1982	Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala2 Urusan dan Kepala - kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.	L L : 8 hal	Dicabut dg Permen No.8 Th.1996
5	No.5 Tahun 1982 9 Juni 1982	Kota-kota Lain Di Luar Wil. Ibukota Negara, Ibukota Prop. Ibukota Kabupaten, Kotamadya, dan Kota Administratif dpt Dibentuk Kelurahan.	L L : 6 hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
6	No.6 Tahun 1982 9 Juni 1982	Pelaksanaan Administrasi Umum Di Desa dan Kelurahan.	L L : 4 hal	
7	No.7 Tahun 1982 9 Juni 1982	Pelaksanaan Administrasi Penduduk Di Desa dan Kelurahan.	L L : 14 hal	
8	No.8 Tahun 1982 9 Juni 1982	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa.	L L : 10 hal	
9	No.9 Tahun 1982 20 September 1982	Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.	L L : 10 hal	
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1982 4 Januari 1982	Perbantuan Pejabat Depdagri Kepada Team Pelaksana Pembangunan Pusat Provinsi Timor Timur.		
2	No. 2 Tahun 1982 4 Januari 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th. 1979/1980 untuk Kabupaten Dati II dalam Lingkungan Prop. Dati I Sulawesi Tengah.		
3	No.3 Tahun 1982 4 Januari 1982	Pembentukan Team Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Tingkat Pusat.	L L : 12 hal	
4	No.4 Tahun 1982 4 Januari 1982	Pembentukan Team penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Pusat.	L L : 8 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
5	No.5 Tahun 1982 7 Januari 1982	Pengawasan Pekerjaan Proyek Pembangunan Perumahan Dinas Depdagri.		
6	No.6 Tahun 1982 7 Januari 1982	Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan untuk Perbaikan Berat Gedung Slaputda Medan dan Biaya Ikatan Dinas Mahasiswa Akademi Agraria Semarang.		
7	No.7 Tahun 1982 7 Januari 1982	Penunjukan Bendaharawan Langsung dan Atasan Langsung Bendaharawan Penataran Camat Seluruh Indonesia.		
8	No.8 Tahun 1982 7 Januari 1982	Team Penyusun Rumusan Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Depdagri	L L : 4 hal	
8a	No.8a Tahun 1982 7 Januari 1982	Pembentukan Team Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah ttg Kedudukan Tugas, Hak dan Wewenang Polisi Pamong Praja.		
9	No.9 Tahun 1982 14 Januari 1982	Persetujuan Penunjukan PT. Multi Structure Cabang Balikpapan Selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Wilayah Dati I Kalimantan Timur Tahap II.		
10-15		<b>SK MDN</b>		
16	No.16 Tahun 1982 17 Januari 1982	Pendataan dan Penelitian Pegawai Negeri Sipil pada Daerah.		
17	No.17 Tahun 1982 17 Januari 1982	Penyempurnaan SK Mendagri No.263 Th.1981 ttg Pembentukan Team Penyus. Ranc. UU Tentang Pertahanan Sipil.		
18	No.18 Tahun 1982 18 Januari 1982	Penghapusan Rumah Negeri di Jalan Jenderal Sudirman No.49 Padang Sumatera Barat.		
19	No.19 Tahun 1982 18 Januari 1982	Penyempurnaan Organisasi Tatakerja Direktorat Pengamanan pada Direktorat Jenderal Sosial Politik.		
20	No.20 Tahun 1982 20 Januari 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th. 1981/1982 utk Kotamadya Dati II Bengkulu Dalam Lingkungan Prov. Dati I Bengkulu.		
21		<b>KOSONG</b>		
22	No.22 Tahun 1982 20 Januari 1982	Pelaksanaan Pemberian Uang Sumbangan Sebagai Penghargaan atas jasa kepala desa dan Perangkat Desa yang Meninggal Dunia di Dalam dan Sewaktu Menjalankan Tugas Negara.	L L : 10 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
23	No.23 Tahun 1982 20 Januari 1982	Pelaksanaan Pemberian Piagam Tanda Kesetiaan, Ketaatan dan Pengabdian Jasa Kepala Desa dan Perangkat Desa.		
24	No.24 Tahun 1982 20 Januari 1982	Penunjukan Bendaharawan Rutin/Gaji dan Atasan Langsung Bendaharawan Pada Markas Wilayah Pertahanan Sipil Tk.I dan Tk.II Prov. Bengkulu.		
25		SK. MDN		
26		SK. MDN		
27	No.27 Tahun 1982 28 Januari 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/1982 utk Kabupaten/Kotamadya Dati II dalam Lingk. Prov. Dati I Sulut.		
28	No.28 Tahun 1982 30 Januari 1982	Pengangkatan Anggota-anggota Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.		
29	No.29 Tahun 1982 30 Januari 1982	Penggantian Bendaharawan Proyek Pembinaan Hansip dan Menwa pada D.I. Aceh.		
30	No.30 Tahun 1982 30 Januari 1982	Penggantian Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Kursus Non Reguler di Prov. NTT.		
31	No.31 Tahun 1982 3 Februari 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/1982 utk Kab. Dati II Poso dalam Lingkungan Prov. Dati I Sulawesi Tengah.		
32	No.32 Tahun 1982 3 Februari 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/1982 utk Kab./Kotamadya Dati II dalam Lingkungan Prov. Dati I Jawa Timur.		
33	No.33 Tahun 1982 6 Februari 1982	Penyelenggaraan Rapat Kerja Pemantapan Program Inpres Pasar dan Inpres Pertokoan Tahun 1982.		
34	No.34 Tahun 1982 6 Februari 1982	Lagu Mars Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa (LKMD)-	L L : 4 hal	
35	No.35 Tahun 1982 6 Februari 1982	Penyelenggaraan Rapat Kerja Pemantapan Program Inpres Pasar dan Inpres Pertokoan		
36	No.36 Tahun 1982 6 Februari 1982	Penetapan Status Rumah Negeri Di Lingkungan Depdagri sebagai Rumah Negeri Golongan II	L L : 2 hal	
37	No.37 Tahun 1982 11 Februari 1982	Panitia Kerja Gabungan Untuk Menunjang Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Seluruh Indonesia.	L L : 6 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
38	No.38 Tahun 1982 11 Februari 1982	Penggantian Pemimpin Proyek Pembinaan Umum, Pembinaan Masyarakat, Pengaman Politik serta Bendaharawan Bagian Proyek Pembinaan Hansip di Prov. Sultra.		
39	No.39 Tahun 1982 11 Februari 1982	Syarat-syarat Khusus Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Baru Untuk Perusahaan Perkebunan Besar dalam Rangka Melaksanakan Kepres RI No.32 Th.1979.	L L : 6 hal	
40	No.39 Tahun 1982 15 Februari 1982	Rapat Kerja Pembangunan Desa Seluruh Indonesia Tahun 1982.		
41-44		SK MDN		
45	No.45 Tahun 1982 24 Februari 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/1982 utk Kabupaten-Kabupaten Dati II dlm Lingk. Prov. Kalsel.		
46	No.46 Tahun 1982 24 Februari 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/1982 utk Kabupaten Dati II Bandung dlm Lingk. Prov. Dati I Jabar.		
47	No.47 Tahun 1982 24 Februari 1982	Penetapan Dana Alokasi Inpres Pasar Tahap Ketiga Th.1981/1982.		
48	No.48 Tahun 1982 25 Februari 1982	Pengukuhan Para Gubernur Kepala Daerah Sebagai Ketua Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi	L L : 4 hal	
49	No.49 Tahun 1982 27 Februari 1982	Pengangkatan pelindung Utama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	L L : 4 hal	
50	No.50 Tahun 1982 27 Februari 1982	Pengangkatan Pelindung pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	L L : 4 hal	
51	No.51 Tahun 1982 27 Februari 1982	Pengangkatan penasehat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	L L : 4 hal	
52	No.52 Tahun 1982 27 Februari 1982	Pengangkatan Penasehat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	L L : 4 hal	
53	No.53 Tahun 1982 1 Maret 1982	SKB Mendagri, Men PU dan MenPAN ttg Pedoman Prakuilifikasi di Tingkat Daerah.		
54	No.54 Tahun 1982 1 Maret 1982	Pembentukan Team Pembina Organisasi Metode Depdagri.		
55	No.55 Tahun 1982 4 Maret 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Boediardjo.		
56	No.56 Tahun 1982 4 Maret 1982	Idem a.n. Sapardjo		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
57	No.57 Tahun 1982 4 Maret 1982	Idem a.n. Drs.Djajadi Kartawirja.		
58	No.58 Tahun 1982 5 Maret 1982	Idem a.n. Moch. Sidik.		
59	No.59 Tahun 1982 6 Maret 1982	Idem a.n. Daryono, SH.		
60	No.60 Tahun 1982 6 Maret 1982	Idem a.n. Pramono.		
61	No.61 Tahun 1982 6 Maret 1982	Idem a.n.Ir.R.Darmakum Darmakusumo.		
62	No.62 Tahun 1982 6 Maret 1982	Idem a.n. R.Sintardjo.		
63	No.63 Tahun 1982 6 Maret 1982	Pembentukan Team Pelatih Pembangunan Desa terpadu Tingkat Pusat.		
64	No.64 Tahun 1982 9 Maret 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. H.Achmad Adnawidjaja.		
65	No.65 Tahun 1982 13 Maret 1982	SKB Mendagri, P&K dan Menkeu ttg Subsidi/ Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri.		
66	No.66 Tahun 1982 18 Maret 1982	Pengesahan Terhadap Pengadaan Pinjaman / Kredit Investasi Pemerintah Kodya Dati II Balikpapan utk Pembangunan Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur di Balikpapan.		
67	No.67 Tahun 1982 18 Maret 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Kab. Dati II Tapanuli Utara dlm Lingk. Prov. Dati I Sumut.		
68	No.68 Tahun 1982 19 Maret 1982	Penyelenggaraan Pembinaan Kepala Dinas,Unit, Kesatuan Kebakaran.	L L : 4 hal	
69	No.69 Tahun 1982 19 Maret 1982	Penghapusan Barang Inventaris yg Tidak Digunakan Milik LPU.		
70	No.69 Tahun 1982 19 Maret 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan & Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Pasar2 dlm Wil. Prov. Dati I DKI Jakarta.		
71	No.71 Tahun 1982 19 Maret 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Dati II Rejang Lebong dlm Lingk. Prov. Dati I Bengkulu.		
72	No.72 Tahun 1982 19 Maret 1982	Penyelenggaraan Kursus Administrasi Kepegawaian/Pengenalan Lingk. Bagi CPNS baru Depdagri.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
73	No.73 Tahun 1982 24 Maret 1982	SKB Mendagri, Menkeu, Menko Ekuin/Bappenas tentang Subsidi/Bantuan Pembangunan Desa.		
74	No.74 Tahun 1982 24 Maret 1982	SKB Mendagri, Menkeu, Menko Ekuin/Bappenas tentang Subsidi/Bantuan Pembangunan Dati II		
75	No.75 Tahun 1982 24 Maret 1982	SKB Mendagri, Menkeu, Menko Ekuin/Bappenas tentang Subsidi/Bantuan Pembangunan Dati I.		
76	No.76 Tahun 1982 24 Maret 1982	Pemberian bantuan Kepada Akademi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta untuk Meningkatkan Fungsi & Pelaksanaan Tugas Pemerintah Bid. Pembangunan Desa.	L L : 4 hal	
77	No.77 Tahun 1982 1 April 1982	SKB Mendagri, Menkeu, Menkes, Menko Ekuin/Bappenas tentang Subsidi/Bantuan Kesehatan.		
78	No.78 Tahun 1982 1 April 1982	SKB Mendagri, Menkeu, Menhut, Menko Ekuin/Bappenas tentang Subsidi/Bantuan Pembangunan Penghijauan.		
79	No.79 Tahun 1982 1 April 1982	SKB Mendagri, Menkeu, Menko Ekuin/Bappenas tentang Subsidi/Bantuan Pembangunan Pasar.		
80	No.80 Tahun 1982 1 April 1982	SKB Mendagri, Menkeu, Menko Ekuin/Bappenas tentang Subsidi/Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan.		
81	No.81 Tahun 1982 1 April 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Firdaus S.CH.		
82	No.82 Tahun 1982 1 April 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Kab./Kodya Dati II dalam Lingkungan Prop. Dati I Sulsel.		
83	No.83 Tahun 1982 1 April 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Kab./Kodya Dati II dalam Lingkungan Prop. Dati I Bali.		
84	No.84 Tahun 1982 8 April 1982	Penunjukan sebagai Perencana dan Kontraktor dlm rangka Pembangunan Gedung Sekretariat Bertingkat Delapan Depdagri.		
85	No.85 Tahun 1982 8 April 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Kab./Kodya Dati II Banggai dalam Lingkungan Prop. Dati I Sulteng.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
86	No.86 Tahun 1982 8 April 1982	Pembentukan BP-7 Dati II	L L : 2 hal	Dicabut dg KMDN No.42 Th.1999
87	No.87 Tahun 1982 8 April 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Achmad Soedarman.		
88	No.88 Tahun 1982 8 April 1982	Pembentukan Panitia Prakuilifikasi pada Kantor Pusat Depdagri.		
89	No.89 Tahun 1982 8 April 1982	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek dalam Lingk. Ditjen Sospol.		
90	No.90 Tahun 1982 11 April 1982	Pengnesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th. 1981/1982 utk Kab. Dati II Ogan Komering Ulu dlm Lingkungan Prop. Dati I Sumsel.	L L : 10 hal	
91	No.91 Tahun 1982 11 April 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Drs. Sanjoto.		
92	No.92 Tahun 1982 11 April 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Drs. Modjiman.		
93	No.93 Tahun 1982 11 April 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Drs. Moch. Muchlas.		
94	No.94 Tahun 1982 11 April 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Drs. Eddy Nanontara.		
95	No.95 Tahun 1982 11 April 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Oedong Atminhardja.		
96	No.96 Tahun 1982 11 April 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Nardi.		
97	No.97 Tahun 1982 11 April 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. J.S.Santoso,SH.		
98	No.98 Tahun 1982 12 April 1982	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dalam Lingk. Ditjen Bangda.		
99	No.99 Tahun 1982 12 April 1982	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dalam Lingk. Badan Diklat Depdagri.		
100	No.100 Tahun 1982 12 April 1982	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dalam Lingk. Ditjen PMD.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
101	No.101 Tahun 1982 12 April 1982	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dalam Lingk. Ditjen PUOD.		
102	No.102 Tahun 1982 16 April 1982	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dalam Lingk. Itjen Depdagri.		
103	No.103 Tahun 1982 16 April 1982	Pelaksanaan Ujian Dinas di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.		
104	No.104 Tahun 1982 16 April 1982	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dlm Lingk. Sekjen Depdagri.		
105	No.105 Tahun 1982 16 April 1982	Pembentukan Kelompok Kerja Inti Proyek Pengamanan Politik Ditjen Sospol 81/82.		
106	No.106 Tahun 1982 16 April 1982	Pembentukan Team Pelaksanaan Koordinasi Proyek Perencanaan Umum Ditjen. Sospol.		
107	No.107 Tahun 1982 16 April 1982	Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI Th.82/83.	L L : 6 hal	
108	No.108 Tahun 1982 19 April 1982	Pembentukan Team Pembina Organisasi dan Takerja Dinas Daerah Lingkup Pertanian.	L L : 6 hal	
109	No.109 Tahun 1982 26 April 1982	Pembinaan Perusahaan-perusahaan Daerah Air Minum dan Persatuan Perair Minuman Seluruh Indonesia.	L L : 4 hal	
110	No.110 Tahun 1982 16 April 1982	Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Lingkungan DDN.	L L : 4 hal	Dicabut dg Permen No.5 Th.2008
111	No.111 Tahun 1982 1 Mei 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/1982 untuk Kab. Dati II Buol Toli-toli dalam lingkungan Prop. Dati I Sulsel.	L L : 6 hal	
112	No.112 Tahun 1982 1 Mei 1982	Pengaturan Pembinaan Tekhnis Dinas Pekerjaan Umum Kab, dan Tatalaksana Pembinaan Jalan Kabupaten.	L L : 6 hal	
113	No.113 Tahun 1982 1 Mei 1982	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Penelitian Identifikasi Masalah Pertanahan di Timor Timur.		
114	No.114 Tahun 1982 6 Mei 1982	Lanjutan Penertiban dan Penataan Kembali Perusahaan Gilingan Padi Hullier dan Penyosohan Beras.		
115	No.115 Tahun 1982 6 Mei 1982	Penunjukan Menempati Perumahan Dinas di Lingkungan Depdagri.	L L : 4 hal	
116	No.116 Tahun 1982 6 Mei 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/1982 utk Kab./Kotamadya Dati II dalam Lingkungan Prop. Dati I Sulsel.	L L :4 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
117	No.117 Tahun 1982 10 Mei 1982	penambahan Keanggotaan Team Screening Depdagri.	L L : 8 hal	
118	No.118 Tahun 1982 10 Mei 1982	Penunjukan Wakil Sekretaris Umum dan Para Kepala Bidang Pada Sekretariat Koordinasi Urusan Timor Timur.	L L : 4 hal	
119	No.119 Tahun 1982 11 Mei 1982	Penyelenggaraan Raker Teknis Kepala Ditjen Agraria Seluruh Indonesia.		
120	No.120 Tahun 1982 11 Mei 1982	Pembentukan Team Rancangan PP ttg Ketentuan-ketentuan Pokok Organisasi dan Hubungan Kerja Perangkat Pemerintah di Daerah.		
121	No.121 Tahun 1982 12 Mei 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/1982 utk Kab. Dati II Dairi dalam Lingkungan Prop. Dati I Sumut.	L L : 4 hal	
122	No.122 Tahun 1982 12 Mei 1982	Pengesahan Terhadap Pengadaan Pinjaman/ Kredit Investasi Pemerintah Kotamadya Dati II Payakumbuh utk Pembangunan Pusat Per-tokoan Pasar Payakumbuh di Payakumbuh.	L L : 6 hal	
123	No.123 Tahun 1982 12 Mei 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Drs T. Untung Yuana.		
124	No.124 Tahun 1982 12 Mei 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Sofyan Sulaiman.		
125	No.125 Tahun 1982 12 Mei 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Supadi.		
126	No.126 Tahun 1982 12 Mei 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Miskar Suramenggala.		
127	No.127 Tahun 1982 12 Mei 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan pemugaran Pasar Th.81/82 untuk Kab./Kodya Dati II dalam Lingkungan Prop. Dati I Jawa Tengah.	L L : 6 hal	
128	No.128 Tahun 1982 12 Mei 1982	Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari.	L L : 12 hal	
129	No.129 Tahun 1982 13 Mei 1982	Pembentukan Team Peningkatan Ketatalaksanaan Administrasi Keuangan Depdagri.		
130	No.130 Tahun 1982 17 Mei 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n.W.Syaifuddin.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
131	No.131 Tahun 1982 17 Mei 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n.W.Syaifudin.		
132	No.132 Tahun 1982 17 Mei 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan perorangan dinas milik negara a.n.R.Soenarto Koesoemo Amidjojo.		
133	No.133 Tahun 1982 17 Mei 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n.Pon Sumito.		
134	No.134 Tahun 1982 17 Mei 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n.Mundari A.S.		
135	No.135 Tahun 1982 22 Mei 1982	Penyelenggaraan Orientasi/Konsultasi Camat Kepala Wilayah Kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan.		
136	No.136 Tahun 1982 22 Mei 1982	Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan pada Itjen.		
137	No.137 Tahun 1982 22 Mei 1982	Pembentukan Team Penyusunan Urusan Tugas serta Bagian di Lingkungan Setjen Depdagri.		
138	No.138 Tahun 1982 22 Mei 1982	Penggantian Bendaharawan Proyek Pembinaan Pengembangan Perusahaan Daerah pada Ditjen PUOD.		
139	No.139 Tahun 1982 22 Mei 1982	Penggantian Pimbagpro Penyempurnaan Prasarana Fisik Pembangunan Gedung Kantor Itjen Wil. Kodya di Aceh.		
140	No.140 Tahun 1982 22 Mei 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n.Drs.R.Adiwiguna.		
141	No.141 Tahun 1982 22 Mei 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n.Drs.Koencoro.		
142	No.142 Tahun 1982 1 Juni 1982	Penunjukan Menempati Perumahan Dinas di Lingkungan Depdagri.		
143	No.143 Tahun 1982 1 Juni 1982	Penunjukan Pimpro dan Benpro/ Pimbagpro dlm Lingk. Ditjen. Agraria Depdagri.		
144	No.144 Tahun 1982 1 Juni 1982	Pembentukan Panitia Rapat Teknis Pelaksanaan Program Inpres Penunjang Jalan Kabupaten Th.82/83.		
145	No.145 Tahun 1982 3 Juni 1982	Pembentukan Team Penyusunan RPP ttg Tata Guna Tanah.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
146	No.146 Tahun 1982 3 Juni 1982	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dalam Lingk. Badan Litbang Depdagri.		
147	No.147 Tahun 1982 3 Juni 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n.Ny.Soewardi.		
148	No.148 Tahun 1982 3 Juni 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n.Abu Amer.		
149	No.149 Tahun 1982 3 Juni 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n.Ny.Sitjati Kartanegara.		
150	No.150 Tahun 1982 3 Juni 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n.Tohir Soebijono.		
151	No.151 Tahun 1982 3 Juni 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n.Amat Mubadi Bsc.		
152	No.152 Tahun 1982 3 Juni 1982	Pembentukan Team Penyusunan Laporan dan Evaluasi Proyek2 Pembangunan Prop. Dati I Tim-Tim.		
153	No.153 Tahun 1982 9 Juni 1982	Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing2 Dati I Th.82/83 Tahap Pertama.		
154	No.154 Tahun 1982 9 Juni 1982	Pembentukan Team Pembinaan Bantuan Pembangunan Desa Th.82/83.		
155	No.155 Tahun 1982 13 Juni 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Kab. di Lingk. Prop. Sumut.		
156	No.156 Tahun 1982 14 Juni 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan & Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Kab.2 Dati II dlm Lingk. Prop. Dati I Lampung.	L L : 4 hal	
157	No.157 Tahun 1982 14 Juni 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran pasar Th.81/82 utk Kab.2 Dati II dalam Lingk. Prop. Dati I Jabar.	L L : 6 hal	
158	No.158 Tahun 1982 14 Juni 1982	Pengesahan pinjaman Bantuan Kredit pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Kab.Dati II Lombok Barat dalam Lingkungan Prop. Dati I NTB.	L L : 4 hal	
159	No.159 Tahun 1982 14 Juni 1982	Pengesahan pinjaman Bantuan Kredit pembangunan & Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Kab.Dati II Kep.Riau dlm Lingk. Prop.Dati I Riau.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
160	No.160 Tahun 1982 15 Juni 1982	Pengesahan pinjaman Pemerintah Prop. Dati I Sumbar dari Pemerintah Pusat c.q Menkeu RI dalam rangka Pengembangan Lumbung Pitih Nagari di Sumbar.		
161	No.161 Tahun 1982 17 Juni 1982	Pembelian Mesin Gilas Jalan dan Mesin Pemadat Tanah Produksi Dalam Negeri.		
162	No.162 Tahun 1982 17 Juni 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Mas Anang.		
163	No.163 Tahun 1982 17 Juni 1982	Pengesahan APBD Rutin Prop. Dati I Timor Timur TA.1982/1983.		
164	No.164 Tahun 1982 21 Juni 1982	Pembentukan Team Pembinaan Penataran Guru Agama SD Tingkat Pusat Th.1980/81 dan Th.1981/1982.		
165	No.165 Tahun 1982 21 Juni 1982	Penunjukan Bendaharawan/Bendaharawan Gaji dan Atasan Langsung Bendaharawan pada Kantor Sospol dan Mawil Hansip Dati I dan Dati II.		
166	No.166 Tahun 1982 24 Juni 1982	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan KursusJuru Ukur Pendaftaran Tanah dan Pengatur Agraria Jurusan Hak-hak Tanah Ditjen Agraria.		
167	No.167 Tahun 1982 24 Juni 1982	Penyelenggaraan Kursus Pengatur Agraria Jurusan Pengurusan Hak-hak Tanah.		
168	No.168 Tahun 1982 24 Juni 1982	Tata Cara Penyelesaian Perkara-Perkara sewa menyewa perumahan atau penggunaan Perumahan yg Sudah Diputus tetapi Putusannya Belum Dilaksanakan	L L : 8 hal	
169	No.169 Tahun 1982 24 Juni 1982	Pemilihan Guru Teladan Tahun 1982 dan Pembentukan Panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan Tahun 1982	L L : 8 hal	
170	No.170 Tahun 1982 24 Juni 1982	Pembentukan Team Bantuan Teknis Pengembangan Prop. Timor Timur.		
171	No.171 Tahun 1982 24 Juni 1982	Pedoman Pelaksanaan Latihan Prajabatan di Lingkungan Depdagri.		
172	No.172 Tahun 1982 24 Juni 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Soewito.		
173	No.173 Tahun 1982 24 Juni 1982	Idem a.n. Moh. Ali.		
174	No.174 Tahun 1982 3 Juli 1982	Pembentukan Team Pembina dan Team Teknis Pengembangan Area Th.1982/1983.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
175	No.175 Tahun 1982 3 Juli 1982	Pembentukan Team Pembinaan Umum Pelaks. Program Bantuan Pembangunan Dati.II Kab./Kodya di Tingkat Pusat.		
176	No.176 Tahun 1982 3 Juli 1982	Pembentukan Team Pembinaan Umum Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tk.I Pusat Th.82/83.		
177	No.177 Tahun 1982 3 Juli 1982	Pembentukan Team Pembinaan Umum Pelaksanaan Program Bantuan Penunjang Jalan Kab. Dati II di Tingkat Pusat.	L L : 8 hal	
178	No.178 Tahun 1982 3 Juli 1982	Pembentukan Tim Penyusunan Standardisasi Penerbitan dan Bahan Dokumentasi DDN.		
179	No.179 Tahun 1982 3 Juli 1982	Pembentukan Team Penyusunan Manual Kehumasan dan Bahan Informasi Buku Depdagri.		
180	No.180 Tahun 1982 8 Juli 1982	Susunan Personalia Tim Peneliti Tanda-tanda Kehormatan Depdagri.		
181	No.181 Tahun 1982 10 Juli 1982	Pengesahan Terhadap Pengadaan Tambahan Pinjaman/Kredit Investasi Pemerintah Kodya Dati II Balikpapan utk Pembangunan Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur di Balikpapan.		
182	No.182 Tahun 1982 10 Juli 1982	Rapat Konsultasi Pemantapan Keterpaduan Operasional Pembangunan Desa Tahun 1982 di Jakarta.	L L : 10 hal	
183	No.183 Tahun 1982 10 Juli 1982	Pembentukan Sekretariat Team Koordinasi antar Departemen utk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Prop. Dati I Timtim.		
184	No.184 Tahun 1982 10 Juli 1982	Penunjukan Pejabat pada Sekretariat Koordinasi antar Departemen untuk menyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan di Prop. Dati I Timor Timur.	L L : 4 hal	
185	No.185 Tahun 1982 10 Juli 1982	Pembentukan Tim Penelitian dan Penetapan Calon Developer Penukar Kompleks Pergudangan dan Mess Depdagri.		
186	No.186 Tahun 1982 14 Juli 1982	Penghapusan Kendaraan Bermotor Perorangan Milik Negara a.n. Sutjitro.		
187	No.187 Tahun 1982 14 Juli 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Ir.Sutjitro.		
188	No.187 Tahun 1982 14 Juli 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Ir.Sugana.S.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
189	No.189 Tahun 1982 14 Juli 1982	Pembentukan Team Pembina Program Pengembangan Wilayah Tahun 1982/1983	L L : 4 hal	
190	No.190 Tahun 1982	Penyelenggaraan Khusus, Kader Pimpinan pertahanan Sipil Depdagri	L L : 6 hal	
191	No.191 Tahun 1982 17 Juli 1982	Pembentukan Team Penghubung Antar Departemen (Ec Officio) untuk Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Prop. Dati I Timor Timur.	L L : 4 hal	
192	No.192 Tahun 1982 17 Juli 1982	Persetujuan Pembangunan enam jembatan di Jateng sebagai Proyek Multiyears.		
193	No.193 Tahun 1982 17 Juli 1982	Penggantian Bendaharawan Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak Tanah di Prop. Kalbar.		
194	No.194 Tahun 1982 17 Juli 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Kabupaten2 Dati I Prop. Jatim.		
195	No.195 Tahun 1982 17 Juli 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kab. Dati II Lebak dalam Lingkungan Prop. Dati I Jawa Barat	L L : 8 hal	
196	No.196 Tahun 1982 27 Juli 1982	Pembentukan Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya.		
197	No.197 Tahun 1982 28 Juli 1982	Penngesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kab./Kodya Dati II dalam Lingkungan Prop. Dati I Sumbar	L L : 8 hal	
198	No.198 Tahun 1982 28 Juli 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/1982 untuk Kab. Dati II Donggala dalam Lingkungan Prop. Dati I Sulsel	L L : 6 hal	
199	No.199 Tahun 1982 23 Juli 1982	Pembentukan Team Pembinaan Umum Pelaksanaan Bantuan Pembangunan SD Tingkat Pusat Th.82/83.		
200	No.200 Tahun 1982 23 Juli 1982	Pembentukan Team Pembinaan Umum Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tingkat Pusat Th.82/83.		
201	No.201 Tahun 1982 31 Juli 1982	Organisasi Tata Kerja dan Uraian Tugas Ditjen PUOD.		
202	No.202 Tahun 1982 31 Juli 1982	Pengesahan Thdp pengadaan Pinjaman Kredit Investasi Pemerintah Kotamadya Dati II Medan untuk Pembangunan Pusat Kota Medan.	L L : 6 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
203	No.203 Tahun 1982 31 Juli 1982	Pembentukan Panitia Lokakarya Lamtoro Gung tanggal 19 s/d 23 Agustus 1982	L L : 6 hal	
204	No.204 Tahun 1982 31 Juli 1982	Pembentukan Team Pembina Pengembangan Kredit Pedesaan Tingkat Pusat.		
205	No.205 Tahun 1982 31 Juli 1982	Penyelenggaraan Kursus Pengatur Agraria Jurusan Landreform di Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, Ujungpandang, Banjarmasin, Denpasar dan Kupang.		
206	No.206 Tahun 1982 31 Juli 1982	Pembentukan Team Pembina Perencanaan Pembangunan antar Sektoral dan Daerah Th.82/83 di Tingkat Pusat.		
207	No.207 Tahun 1982 31 Juli 1982	Pembentukan Team Pembina Umum Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.82/83 di Tingkat Pusat.		
208	No.208 Tahun 1982 2 Agustus 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. R.Soenario.		
209	No.209 Tahun 1982 2 Agustus 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Ny. Waluyo.		
210	No.210 Tahun 1982 2 Agustus 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Drs.Sahidnu Sosrotaruno.		
211	No.211 Tahun 1982 2 Agustus 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Drs.Sujono Tjiptoprawiro.		
212	No.212 Tahun 1982 2 Agustus 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Drs.Soeharso Setyodarmodjo.		
213	No.213 Tahun 1982 2 Agustus 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Perorangan Dinas Milik Negara a.n. Dra.Endang Sri Wigati.		
214	No.214 Tahun 1982 2 Agustus 1982	Pembentukan Team Penyusunan Buku Pedoman Kearsipan Depdagri.		
215	No.215 Tahun 1982 2 Agustus 1982	Persetujuan Pembangunan Prasarana Fisik Peemerintahan Berpa Perluasan Kantor Gubernur di Prop. Dati I Bengkulu sebagai Proyek Multiyears.		
216	No.216 Tahun 1982 2 Agustus 1982	Persetujuan Pembangunan/Penggantian 13 buah Jembatan di Prop. Dati I Bengkulu sebagai Proyek Multiyears.	L L : 8 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
217	No.217 Tahun 1982 2 Agustus 1982	Persetujuan Pembangunan Prasarana Fisik Pembinaan Generasi Muda Berupa Pembangunan Gedung Pemuda dan Kolam Renang di Prop. Dati I Bengkulu Sebagai Proyek Multiyears.		
218	No.218 Tahun 1982 2 Agustus 1982	Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan PP ttg Koordinasi Instansi2 Vertikal di Daerah.		
219	No.219 Tahun 1982 2 Agustus 1982	Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pengadaan Mesin Gilas dan Mesin Pemadat Tanah utk Dati II se Indonesia.		
220	No.220 Tahun 1982 7 Agustus 1982	Pembentukan Panitia Penaksiran Harga Tanah dan Bangunan Gudang di Jl.Sanjaya I/94 Kebayoran Baru dan Mess di Jl.Matraman Raya 165/167 Milik Depdagri serta Tanah dan Bangunan sebagai Penukar dari PT.Duta Pertiwi.		
221	No.221 Tahun 1982 7 Agustus 1982	Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Rangka Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Para Pejabat dilingkungan Pemda Tk.I dan Pemda Tk.II.		
222	No.222 Tahun 1982 10 Agustus 1982	Penetapan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pembinaan Program Bantuan Pembangunan SD Tingkat Pusat Th.82/83.		
223	No.223 Tahun 1982 10 Agustus 1982	Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Negara a.n. Sumitro Maskun.		
224	No.224 Tahun 1982 10 Agustus 1982	Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Negara a.n. Abdul Wahab Beindji.		
225	No.225 Tahun 1982 10 Agustus 1982	Pemilihan Juru Teladan Tahun 82 Tingkat Nasional.		
226	No.226 Tahun 1982 14 Agustus 1982	Pembentukan Sekretariat Team pelaksana Pembangunan Pusat utk Penyelenggaraan Pemerintah & Pembangunan Dati I Timtim.	L L : 4 hal	
227	No.227 Tahun 1982 15 Agustus 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kab. Dati II Bengkalis dalam Lingkungan Prop. Dati I Riau.	L L : 6 hal	
228	No.228 Tahun 1982 18 Agustus 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran pasar Tahun 1981/1982 untuk Kab. Dati II Solok dalam Lingkungan Prop. Dati I Sumbar.	L L : 6 hal	
229	No.229 Tahun 1982 18 Agustus 1982	Pemberian Piagam Penghargaan Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria.	L L : 6 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
230	No.230 Tahun 1982 18 Agustus 1982	Pemberian Piagam Penghargaan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria Khusus kepada Prop. Dati Timtim.	L L : 2 hal	
231	No.231 Tahun 1982 19 Agustus 1982	Team Penyusunan Rumusan Implementasi Wawasan Nusantara dlm Tugas Pemerintahan Dalam Negeri.		
232	No.232 Tahun 1982 19 Agustus 1982	Penghapusan Kendaraan Perorangan Milik Negara a.n. Sugeng Kadarusman.		
233	No.233 Tahun 1982 19 Agustus 1982	Penghapusan Kendaraan Perorangan Milik Negara a.n. Drs.Soetopo Djadiasmono.		
234	No.234 Tahun 1982 19 Agustus 1982	Penghapusan Kendaraan Perorangan Milik Negara a.n. Drs.Zulkarnaen Subana.		
235	No.235 Tahun 1982 23 Agustus 1982	Pembentukan Panitia Penyaringan Calon Pegawai Depdagri.		
236	No.236 Tahun 1982 23 Agustus 1982	Pembentukan Tim Penelitian Persyaratan Administrasi dan Penguji Pelamar CPNS Kantor Pusat Depdagri.		
237	No.237 Tahun 1982 23 Agustus 1982	Penunjukan Bagian Proyek Latihan Perencanaan Tata Laksana Pembangunan Regional serta Kursus Non Reguler.		
238	No.238 Tahun 1982 23 Agustus 1982	Pedoman Pemeriksaan Khusus Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.		Dicabut dg Permen No.4 Th.1992.
239	No.239 Tahun 1982 23 Agustus 1982	Pemberian Piagam Penghargaan Kepada Pencipta Lagu Prona.	L L :4 hal	
240	No.240 Tahun 1982 27 Agustus 1982	Persetujuan Proyek Penyusunan Rencana Pengamanan dan Penataan Kawasan Tanah Runtuh di Palu TA.82/83.		
241	No.241 Tahun 1982 29 Agustus 1982	Persetujuan Penetapan CV.Pasifik Raya sebagai Pelaksana Pembangunan Pasar Inpres Toli-Toli Th.81/82 Dati.II Boul Toli-Toli.		
242	No.242 Tahun 1982 29 Agustus 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Kendaraan perorangan Dinas Milik Negara .		
243	No.243 Tahun 1982 30 Agustus 1982	Pengesahan Terhadap Pengadaan Pinjaman Kredit Investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara utk Pembangunan Pasar.		
244	No.244 Tahun 1982 30 Agustus 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Kodya dlm Lingkungan Prov. Dati I Sumbar.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
245	No.245 Tahun 1982 30 Agustus 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983 untuk Kab./Kodya Dati II dalam Lingkungan Prop. Dati I Jawa Timur	L L : 6 hal	
246	No.246 Tahun 1982 30 Agustus 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Kab. Belitung dlm Lingk. Prop. Dati I Sumsel.		
247	No.247 Tahun 1982 30 Agustus 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/1982 untuk Kab. Dati II Belitung dalam Lingkungan Prop. Dati I Sumsel	L L : 34 hal	
248	No.248 Tahun 1982 31 Agustus 1982	Perubahan/Penambahan Lampiran Kep Ber Mendagri Kesehatan, Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 544/MEN-KES/SKB/X/81 No. 043a/U/1981 dan No.324 A Th.1981 tanggal 23 Desember 1981	L L : 4 hal	
249	No.249 Tahun 1982 31 Agustus 1982	Pembentukan Team Peningkatan Administrasi Kepegawaian Depdagri.		
250	No.250 Tahun 1982 2 September 1982	Pembentukan Team Pengembangan Sistim Informasi Depdagri.		
251	No.251 Tahun 1982 2 September 1982	Pembentukan Team Antar Departemen Penyusunan dan Pembahasan RPP tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah utk Keperluan kuburan.		
252	No.252 Tahun 1982 2 September 1982	Penunjukan Bendaharawan dan atasan Langsung Bendaharawan pada Mawil Hansip Tingkat I dan II di DKI Jakarta dan DI. Aceh.		
253	No.253 Tahun 1982 6 September 1982	Pembentukan Team Penyusunan RPP ttg Penertiban Pemberian dan Penggunaan Kuasa Mutlak di bidang Pertanahan.		
254	No.254 Tahun 1982 10 September 1982	Penunjukan Rekanan Pengadaan Peralatan Radio utk Jaringan Radio Komunikasi DDN.		
255	No.255 Tahun 1982 10 September 1982	Penunjukan PT.Habada Beungkar LTD utk Pengadaan Peralatan Radio utk Jaringan Radio Komunikasi Depdagri.		
256	No.256 Tahun 1982 10 September 1982	Pembentukan Team Pengawas Pembangunan Gudang.		
257	No.257 Tahun 1982 10 September 1982	Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Depdagri.		Dicabut dg Kepmen No.4 Th.2002
258	No.258 Tahun 1982 10 September 1982	Penghapusan barang Inventaris yang tidak dapat digunakan lagi.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
259	No.259 Tahun 1982 10 September 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan Kendaraan Dinas Milik Negara a.n. Tyasno Sudarto.		
260	No.260 Tahun 1982 10 September 1982	Pembentukan Team Penyusunan RPP tentang Hak Pakai.		
261	No.261 Tahun 1982 14 September 1982	Ketentuan Bentuk & Penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi di Lingkungan Organisasi Pemda dan Wilayah	L L : 6 hal	
262	No.262 Tahun 1982 14 September 1982	Perincian dana Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Masing2 Dati I Th.82/83 (Tahap II).		
263	No.263 Tahun 1982 14 September 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Inpres Pasar Dati II Jawa Barat.		
264	No.264 Tahun 1982 14 September 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Kabupaten Sumbawa.		
265	No.265 Tahun 1982 16 September 1982	Lanjutan Penerbitan dan Penataan Kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.	L L : 10 hal	
266	No.266 Tahun 1982 16 September 1982	Besarnya Pungutan Biaya dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak atas Tanah Bagi Golongan Mampu yang Menjadi Obyek proyek Operasi Nasional Agraria	L L : 28 hal	
267	No.267 Tahun 1982 16 September 1982	Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Lingkungan Depdagri	L L : 6 hal	
268	No.268 Tahun 1982 16 September 1982	Pokok-pokok Kebijakan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah yang dicadangkan bagi dan atau dikuasai Oleh Perusahaan2.	L L : 6 hal	
274	No.274 Tahun 1982 17 September 1982	Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Dati I	L L : 4 hal	
275	No.275 Tahun 1982 20 September 1982	Pedoman Kerjasama Pembangunan antara Daerah.	L L : 6 hal	
277	No.277 Tahun 1982 20 September 1982	Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Karet, Karet Kuningan dan Kuningan Timur Kec. Setiabudi Wilayah Jakarta Selatan DKI Jakarta	L L : 10 hal	
281	No.281 Tahun 1982 21 September 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 utk Kabupaten-kabupaten Dati II dalam Lingkungan Prop. Dati I Sumbar	L L : 4 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
282	No.282 Tahun 1982 21 September 1982	Pembentukan Team Peningkatan dan Perluasan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Depdagri	L L : 2 hal	
283	No.283 Tahun 1982 22 September 1982	Pembentukan Team Penaksir Uang Santunan Bagi Penghuni Rumah Dinas Jl.Tirtayasa IV/12 Jakarta.		
284	No.284 Tahun 1982 22 September 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit.		
285	No.285 Tahun 1982 23 September 1982	Pemberhentian dan Pengangkatan sebagai anggota Tim Penggerak PKK Tingkat Pusat.		
286	No.286 Tahun 1982 23 September 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th. 1982/1983 utk Kodya Dati.II Banjarmasin dalam Lingkungan Prop. Dati I Kalsel.	L L : 4 hal	
287	No.287 Tahun 1982 23 September 1982	Pengesahan Terhadap Pengadaan Pinjaman Kredir Investasi Pemerintah Kodya Dati II Padang untuk Pembangunan pasar Raya Padang Bagian Barat.	L L : 6 hal	
288	No.288 Tahun 1982 23 September 1982	Pengesahan Thdp Pengadaan Tambahan Pinjaman/Kredit Investasi Pem.Kodya Dati II Pematang Siantar untuk Pembangunan Pasar Horas di Pematang Siantar.	L L : 6 hal	
289	No.289 Tahun 1982 24 September 1982	Persetujuan Penetapan PT.Sentral Sulawesi sbg Pelaksana Pembangunan Pasar Inpres Luwuk Kab. Banggai.		
290	No.290 Tahun 1982 24 September 1982	Penghapusan Inventaris dan Pengalihan Kepemilikan a.n. FX.Soedijana,SH.		
291	No.291 Tahun 1982 24 September 1982	Pengesahan Pinjaman bantuan Kredit pembangunan dan pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kab. Dati II Musi Rawas dalam Lingkungan Prop. Dati I Sumsel.	L L : 6 hal	
292	No.292 Tahun 1982 24 September 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/1982 untuk Kabupaten2 Dati II dalam Lingkungan Prop. Dati I Jabar.	L L : 6 hal	
293	No.293 Tahun 1982 20 September 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran pasar Tahun 1981/1982 untuk Kab.-kabupaten Dati II Lingkungan Prop.Dati I Kalsel	L L : 6 hal	
294	No.294 Tahun 1982 24 September 1982	lagu Mars Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	L L : 6 hal	
295	No.295 Tahun 1982	KOSONG		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
296	No.296 Tahun 1982 1 Oktober 1982	Penunjukan Langsung Pembelian Pesawat Handie Talkit Funono kepada PT.Habadi Beungkar LTD.		
297A	No.297A Th. 1982 12 Oktober 1982	Pengangkatan dan Susunan Keanggotaan Panitia Peneliti Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Tingkat Pusat.	L L : 4 hal	
300	No.300 Tahun 1982 .. Oktober 1982	Organisasi dan Tatakerja Staf Ahli Menteri di Lingkungan Depdagri.		Diubah dg KMDN No.97 Th.1990 Dicabut dg KMDN No.92 Th.1992
301	No.301 Tahun 1982 28 Oktober 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.81/82 utk Kab. Labuhan Batu dlm Lingkungan Prop. Sumut.		
302	No.302 Tahun 1982 28 Oktober 1982	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan & Pemugaran Pasar Th.81/82 untuk Kab. Dati II Buton dalam Lingkungan Prop. Dati I Sulteng	L L : 8 hal	
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1982 2 Januari 1982	Pelaksanaan penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak Bumi Tahun 1982.		*
2	No. 2 Tahun 1982 13 Januari 1982	Penertiban Tanah di Daerah Perkotaan yg dikuasai oleh Badan Hukum atau Perseorangan yg tidak dimanfaatkan atau Ditelantarkan.	L L : 10 hal	*
2A	No. 2A Tahun 1982 2 Maret 1982	Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras Tunjangan Pangan Bagi PNS Daerah/ Pusat Dpb. pd Daerah dan Prosedur Pembayaran.		*
3	No. 3 Tahun 1982 6 Maret 1982	pelaksanaan 8 Sukses	L L : 20 hal	
4	No. 4 Tahun 1982 4 Maret 1982	Pensuksesan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1982/1983 di Daerah.	L L :4 hal	
5	No. 5 Tahun 1982 6 Maret 1982	Pensuksesan pengadaan Pangan.	L L : 4 hal	
6	No. 6 Tahun 1982 6 Maret 1982	Pensuksesan Penyelenggaraan Transmigrasi.	L L : 4 hal	
7	No. 7 Tahun 1982 4 Maret 1982	Pembinaan Golongan Ekonomi Lemah.	L L : 4 hal	
8	No. 8 Tahun 1982 6 Maret 1982	Peningkatan Ekspor Non Minyak dan Gas Bumi.	L L : 4 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
9	No. 9 Tahun 1982 6 Maret 1982	Ketenaga Kerjaan dan Hubungan Perburuhan Pancasila.	L L : 6 hal	
10	No.10 Tahun 1982 6 Maret 1982	Pensuksesan Pemilihan Umum Tahun 1982.	L L : 4 hal	
11	No.11 Tahun 1982 6 Maret 1982	Kebijaksanaan Untuk Meningkatkan Kegiatan Pelaksanaan Landreform.	L L : 8 hal	
12	No.12 Tahun 1982 6 Maret 1982	Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Secara Produktif.	L L : 4 hal	
13	No.13 Tahun 1982 6 Maret 1982	Intensifikasi Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.		
14	No.14 Tahun 1982 6 Maret 1982	Larangan Penggunaan kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah.	L L : 4 hal	
15	No.15 Tahun 1982	KOSONG		*
16	No.16 Tahun 1982 18 April 1982	Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Dati II Th.1982/1983.		*
17	No.17 Tahun 1982 18 April 1982	Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Dati I Th.1982/1983.		*
18	No.18 Tahun 1982 18 April 1982	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung SD Th.1982/1983.		*
19	No.19 Tahun 1982 18 April 1982	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Th.1982/1983.		*
20	No.20 Tahun 1982 18 April 1982	Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Penghijauan Th.1982/1983.		*
21	No.21 Tahun 1982 18 April 1982	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Pasar Th.1982/1983.		*
22	No.22 Tahun 1982 18 April 1982	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Kabupaten Th.1982/1983.		*
23	No.23 Tahun 1982 18 April 1982	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah dalam rangka program pembangunan wilayah.		*
24	No.24 Tahun 1982 18 April 1982	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Desa, Pembangun-an Dati II, Dati I, Pembangunan SD, Sarana Kesehatan, dan Pembangunan Penunjang Jalan Kab. Dati II di Prop. Dati I Timor Timur Th.1982/1983.		*
25	No.25 Tahun 1982	KOSONG		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
26	No.26 Tahun 1982 13 Mei 1982	Penetapan/Pengesahan Batas Kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan.		*
27	No.27 Tahun 1982 31 Mei 1982	Penyelenggaraan Peringatan Hari Krida Pertanian ke X Th.1982.		*
28	No.28 Tahun 1982 2 Juni 1982	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa TA.1982/1983.		*
29	No.29 Tahun 1982 21 Juni 1982	Petunjuk Pelaksanaan Program Penataran bagi Guru2 Agama SD yg Diangkat dalam TA.1980/1981 dan 1981/1982.		*
30	No.30 Tahun 1982 21 Juni 1982	Pelaks. Pemilihan Guru Teladan (In. Bersama Men P+K, Mendagri, Menlu & Mendagri).		*
31	No.31 Tahun 1982 21 Juli 1982	Petugas Pembimbing Ibadah dan Pelayanan Kesehatan Haji Daerah.		*
31A	No.31A Tahun 1982 12 Agustus 1982	Pekan Penghijauan		*
32	No.32 Tahun 1982 19 Agustus 1982	Koordinasi Bagi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah.		*
33	No.33 Tahun 1982 28 Agustus 1982	Hari Peringatan Kesaktian Pancasila 1 Okt. 1982. (Inst. Bersama Men.P+K & Mendagri).		*
34	No.34 Tahun 1982 30 Agustus 1982	Pedoman Pelaksanan Pembangunan Daerah dalam Rangka Pengembangan Area.		*
35	No.35 Tahun 1982 30 Agustus 1982	Perintisan Pembentukan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru di DKI. Jakarta.		*
*	No.650-1232 Th.1982 30 September 1982	Pelaksanaan Permendagri No.4 Th.1980 ttg Pedoman Penyusunan Rencana Kota.		
*	No.650-1233 Th.1982 30 September 1982	Tata Kerja Penyusunan Rencana Kota.		
*	No.650-1234 Th.1982 30 September 1982	Pendaftaran Konsultan Bidang Penyusunan Rencana Kota.		
<b>TAHUN 1983</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1983 1 Juli 1983	Pedoman Kerjasama antar Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga.	L L : 8 hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1990
2	No. 2 Tahun 1983 31 Oktober 1983	Tata tertib Rapat Lembaga Musyawarah Desa.	L L : 12 hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
3	No. 3 Tahun 1983 31 Oktober 1983	Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.	L L : 4 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
4	No. 4 Tahun 1983 31 Oktober 1983	Pejabat yang mewakili Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dalam hal Kepala Desa/Kepala Kelurahan berhalangan.	L L : 8 hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
5	No. 5 Tahun 1983 31 Oktober 1983	Serah Terima Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan	L L : 6 hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
6	No. 6 Tahun 1983 31 Oktober 1983	Pengawasan atas jalanya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.	L L : 12 hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
7	No. 7 Tahun 1983 31 Oktober 1983	Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.	L L : 8 hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
8	No. 8 Tahun 1983 9 Nopember 1983	Bentuk Peraturan Daerah Perubahan	L L : 22 hal	Dicabut dg KMDN No.6 Th.1993
9	No. 9 Tahun 1983 19 Nopember 1983	Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan.	L L : 22 hal	
10	No.10 Tahun 1983 29 Desember 1983	Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah Kepunyaan Bersama yang disertai dg pemilikan secara terpisah bagian-bagian pd bangunan bertingkat.	L L : 4 hal	
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1983 3 Januari 1983	Ganti Rugi/pesangon Terhadap Penghuni dan Bekas Penghuni Rumah Dinas Jl. Tirtayasa IV/12 Jakarta.		*
2	No. 2 Tahun 1983 3 Januari 1983	Persetujuan Penetapan PT.Total Bangun Persada sebagai Pelaksana Pembangunan Pusat Perbelanjaan Pasar Pangeran Antasari Kotamadya Banjarmasin		*
3	No. 3 Tahun 1983 15 Januari 1983	Pengesahan Pinjaman bantuan dan kredit Pembangunan dan Pemugaran pasar Th.1982/1983 untuk Kodya Dati I Bengkulu dalam lingkungan Prop. Dati I Bengkulu.	L L : 5 hal Lamp : 1 hal	
4	No. 4 Tahun 1983 13 Januari 1983	Sda Pasar th 1981/1982 untuk Kab. Dati II Asahan dalam Lingk. Prop. Dati I SUMUT.	L L : 5 hal Lamp : 1 hal	
5	No. 5 Tahun 1983 13 Januari 1983	Sda pasar th 1981/1982 untuk Kab. Dati II Aceh Barat dalam Lingk. Prop. Dati I Aceh.	L L : 5 hal Lamp : 1 hal	
6	No. 6 Tahun 1983 13 Januari 1983	Sda pasar th 1982/1983 untuk Kab. Dati II Sorong dalam lingk. Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 5 hal lamp : 1 hal	
7	No. 7 Tahun 1983 4 Februari 1983	Pembentukan Kelompok Kerja penataan di bidang Keamanan, Resetlement dan Hansip Wanra, Kamra dan Ratih di Prop Timor Timur.	L L : 3 hal Lamp : 1 hal	
8	No. 8 Tahun 1983 14 Februari 1983	Pembentukan Sub Team Kerja pemberian penghargaan bagi pejuang kemerdekaan Irian Barat dari Penjajah Belanda.	L L : 3 hal Lamp : 5 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
9	No. 9 Tahun 1983 22 Februari 1983	Pembentukan Panitia Prakualifikasi pada Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri TA.1983/1984.		*
10	No.10 Tahun 1983 24 Februari 1983	Perubahan Keputusan Mendagri No. 110 Th.1982 ttg Pendelegasian Wewenang penjatahan hukuman disiplin dalam lingkungan Depdagri.	L L : 3 hal Lamp : 6 hal	Dicabut dg Permen No.5 Th.2008
11	No.11 Tahun 1983 28 Februari 1983	Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prop. Dati I Tim-Tim Tahun Anggaran 1982/1983.	L L : 7 hal	
12	No.12 Tahun 1983 28 Februari 1983	Pengesahan Pinjaman bantuan kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1981/1982 untuk Kab. OKI dalam Lingkungan Prop. Dati I Sumsel.	L L : 5 hal Lamp : 1 hal	
13	No.13 Tahun 1983 28 Februari 1983	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang Terpusat atas beban biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tk.II.	L L : 3 hal	
14	No.14 Tahun 1983 28 Februari 1983	Tata Cara Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan Daerah yg Bernilai diatas Rp.500.000.000,- atas Beban Biaya APBD.		*
15	No.15 Tahun 1983 28 Februari 1983	Pembentukan Team Pengendalian dan pengawasan pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan di lingk. Depdagri.	L L : 6 hal	
16	No.15 Tahun 1983 4 Maret 1983	Penetapan Kembali Pejabat-pejabat yang diberi wewenang menandatangani DIK, DIP dan usulan revisi serta Anggaran Belanja Tambahan Departemen Dalam Negeri.	L L : 5 hal	
17	No.17 Tahun 1983 17 Maret 1983	Persetujuan Penetapan PT.Grafos sebagai Pelaksana Pembangunan Pasar Solok Kotamadya Dati II Solok.		*
18	No.18 Tahun 1983 17 Maret 1983	Persetujuan Penetapan PT.Prambanan Dwipaka sebagai Pelaksana Pembangunan Pasar Barukoto Kotamadya Dati II Bengkulu.		
19	No.19 Tahun 1983 19 April 1983	Pembentukan Team Pelaksanaan Crash Program Team Screening Depdagri.	L L : 3 hal	
20	No.20 Tahun 1983 13 April 1983	Pembentukan Kantor Agraria Kotamadya Payakumbuh dann Kotamadya Solok.	L L : 3 hal	
21	No.21 Tahun 1983 16 April 1983	Subsidi / Bantuan Pembiayaan Payakumbuh dann Kotamadya Solok.	L L : 7 hal	
22	No.22 Tahun 1983 16 April 1983	Penyelenggaraan Tata Pembukuan Bendaharawan pada Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Depdagri.	L L : 14 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
23	No.23 Tahun 1983 18 Mei 1983 No.273/Menkes/SKB/VII/83 No.335a/KMK.03/1983	Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang Digunakan untuk Pendidikan Calon Dokter Umum dan Calon Dokter Spesialis Mendagri, Menkes dan Menkeu.	L L : 6 hal Lamp : 9 hal	
24	No.24 Tahun 1983 31 Mei 1983 No.363/KMK.011/1983 No.180/KPTS/1983 No.033/KEP/5/1983	Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1983/1984.	L L : 10 hal	
25	No.25 Tahun 1983 31 Mei 1983	Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1983/1984 (SKB Mendagri, Menkeu, Men P&K, Agama dan Meneg/Ketua Bappenas).		
26	No.26 Tahun 1983 31 Mei 1983	Penetapan Kembali Pejabat-pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani DIK, DIP dan Usulan Revisi serta Anggaran Belanja Tambahan Depdagri.		
27	No.27 Tahun 1983 31 Mei 1983 No.365/KMK.011/1983 No.181/KPTS/1983 No.035/KEP/5/1983	Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Tahun 1983/1984.	L L : 25 hal	
28	No.28 Tahun 1983 31 Mei 1983	Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1983/1984.		*
29	No.29 Tahun 1983 31 Mei 1983	Pembentukan Panitia Kerjasama Antar Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dgn Yayasan Bina Desa dalam rangka program Kerjasama Cirdap/Angoc Mengenai Program Partisipasi Masyarakat Desa.	L L : 4 hal Lamp : 2 hal	
30	No.30 Tahun 1983 31 Mei 1983	Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.		*
31	No.31 Tahun 1983 4 Juni 1983 No.386a/Kmk.011/1983 No.HK.320/400/Kpts/6/1983 No.010/Kpts.V/1983 No.192/Kpts/1983 Kep.09/MNKLH/6/1983 Kep. 038/KET/6/1983	Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984.	L L : 20 hal	
32	No.32 Tahun 1983 4 Juni 1983	Petunjuk pelaks. bantuan kredit Pembangunan, & Pemugaran Pasar Th.1983/1984	L L : 15 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
33	No.33 Tahun 1983 11 Juni 1983	Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar (SKB Mendagri dan Men P&K)		*
34	No.34 Tahun 1983 16 Juni 1983	Bantuan Akademi Agraria Jurusan Pendaftaran Tanah di Semarang dengan Akademi Agraria Jurusan Pengurusan Hak Tanah dan Jurusan Tata Guna Tanah di Yogyakarta Menjadi Akademi Agraria.	L L :4 hal	
35	No.35 Tahun 1983 18 Juni 1983	Persetujuan Penunjukan Langsung Fa.Sadhu Karya Denpasar utk melaksanakan Proyek pembangunan gedung PWI di Prop.Dati I Bali.	L L : 4 hal	
36	No.36 Tahun 1983 23 Juni 1983	Program Kerja Departemen Dalam Negeri Th.1983/1984		*
37	No.37 Tahun 1983 5 Juli 1983	Pedoman Penilaian Prop. Dati I dalam Rangka Pemberian Tanda Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha	L L : 5 hal. Lamp 10 hal	
38	No.38 Tahun 1983 9 Juli 1983	Penyelenggaraan Penataran Perencanaan dan Pengendalian Program Terpadu Camat Kepala Wilayah Kecamatan UDKP		*
39	No.39 Tahun 1983 20 Juli 1983	Pemilihan Guru Guru Teladan Th.1983 dan Pembentukan Panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan Tahun 1983.		*
40	No.40 Tahun 1983 2 Agustus 1983	Penghapusan Tanah dan Bangunan Milik Depdagri di Jl. Sanjaya I/94 Kebayoran Baru Jaksel serta di Jl.Matraman Raya 165-167 Jakarta Timur dari Daftar Inventaris Depdagri.		*
41	No.41 Tahun 1983 8 Agustus 1983	Temu Karya Kepala Desa Juara Pertama Perlombaan Desa Tingkat Propinsi Seluruh Indonesia.		*
42	No.42 Tahun 1983 11 Agustus 1983	Penetapan Juara Nasional Guru Teladan (SKB Mendagri, Men P&K, Agama, dan Luar Negeri).		*
43	No.43 Tahun 1983 11 Agustus 1983	Pedoman Pemilihan Guru Teladan (SKB Men P&K, Mendagri, Menlu, Menag, dan MenPAN)		*
44	No.44 Tahun 1983 15 Agustus 1983	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga dan Kesenian (PORSENI) SD Tingkat Nasional Tahun 1983		*
45	No.45 Tahun 1983 19 Agustus 1983	Penyelenggaraan Kursus Kader Pimpinan Pertahanan Sipil Depdagri.		*
46	No.46 Tahun 1983 1 September 1983	Penerbitan Peredaran Film, dan Perbioskopian di Daerah dalam Rangka Peningkatan pendapatan Daerah.	L L : 4 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
47	No.47 Tahun 1983 1 September 1983	Penyelenggaraan Swkolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA) Departemen Dalam Negeri di setiap Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.	L L : 6 hal	
48	No.48 Tahun 1983 1 September 1983	Lambang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.		
49	No.49 Tahun 1983 10 Oktober 1983	Rencana Penerimaan Ipeda tanpa Sektor Pertambangan dan Perhutanan asal IHH Tiap Dati II TA.1983/1984.		*
50	No.50 Tahun 1983 10 Oktober 1983	Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 6 hal	Dicabut dg KMDN No.21 Th.2003
51	No.51 Tahun 1983 10 Oktober 1983	Pembentukan Panitia Perumus RUU tentang Perubahan UU Pemilu, Perubahan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan Perubahan UU Parpol dan Golkar, ttg Organisasi Kemasyarakatan serta tentang Referendum.		
52	No.52 Tahun 1983 17 Oktober 1983	Pembentukan Team Pembina Subsidi/ Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Yang Digunakan Untuk Pendidikan Calon Dokter Umum dan Calon Dokter Spesialis dan RSU di Tingkat II.		*
53	No.53 Tahun 1983 19 Oktober 1983	Surat Keputusan Bersama ttg Perubahan dan Penambahan Pada SKB Memperdag, Mendagri, Menkeu.	L L : 26 hal	
54	No.54 Tahun 1983 27 Oktober 1983	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kab./Kotamadya.	L L : 12 hal	
55	No.55 Tahun 1983 27 Oktober 1983	Organisasi dan Tata Kerja Catatan Sipil Prop.D.KI	L L : 4 hal	
56	No.56 Tahun 1983 29 Oktober 1983	Pembentukan Team Penertiban dan Evaluasi Yayasan Dana.	L L : 6 hal	
57	No.57 Tahun 1983 29 Oktober 1983	Penyelenggaraan Workshop on People Participation di Jakarta		*
58	No.58 Tahun 1983 4 Nopember 1983	Susunan Team Pertimbangan Keuda.	L L : 8 hal	
59	No.59 Tahun 1983 4 Nopember 1983	Pembentukan Seksi Tata Guna Tanah pada Kantor Agraria Kab./Kotamadya tertentu.	L L : 22 hal	
60	No.60 Tahun 1983 15 Nopember 1983	Penetapan Jumlah Desa dan Kelurahan di Seluruh Indonesia untuk Th.1984/1985.		*
61	No.61 Tahun 1983 15 Nopember 1983	Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Depdagri.	L L : 2 hal	Dicabut dg KMDN No.167 Th.1996

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
62	No.62 Tahun 1983 16 Nopember 1983	Penetapan Dokter dan Paramedis Teladan di Puskesmas Th.1979,1980,1981 & 1982.		*
63	No.63 Tahun 1983 17 Nopember 1983	Ralat Kepmendagri No. 59 Tahun 1983 ttg Pembentukan Tim Pemeriksaan dan Evaluasi Yayasan Dana Landreform sbb: Drs.Soedirman Brotosandjojo dari Itjen Sebagai Anggota Tim.	L L : 8 hal	
64	No.64 Tahun 1983 17 Nopember 1983	Pembentukan Team Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi Instansi-instansi Vertikal Depdagri.		*
65	No.65 Tahun 1983 30 Nopember 1983	Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan Mendagri dan Stempel Dinas.	L L : 6 hal	
66	No.66 Tahun 1983 6 Desember 1983	Pendidikan dan Latihan Penjenjangan di Lingkungan Depdagri.	L L : 14 hal	
67	No.67 Tahun 1983 6 Desember 1983	Pembentukan Tim Pembinaan Umum Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tingkat Pusat.		*
68	No.68 Tahun 1983 6 Desember 1983	Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Wilayah Kotatiff BATAM	L L : 6 hal	
69	No.69 Tahun 1983 8 Desember 1983	Pembentukan Sekretariat Panitia Perumus Rancangan Undang-Undang.		*
70	No.70 Tahun 1983 8 Desember 1983	Penunjukan Menempati Perumahan Dinas di Lingkungan Depdagri.		*
71	No.71 Tahun 1983 8 Desember 1983	Pembentukan Panitia Pembangunan Perumahan Departemen Dalam Negeri.		*
72	No.72 Tahun 1983 8 Desember 1983	Pedoman Pemberian Uang Sumabangan sebagai penghargaan atas Kepala Desa dan Pangkat Desa dan Pangkat Desa yang meninggal Dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugas Negara.	L L : 4 hal	
73	No.73 Tahun 1983 10 Desember 1983	Pelaksanaan pemberian Piagam Tanda Kesetiaan, Ketaatan dan Pengabdian Jasa Kepala Desa dan Pangkat Desa.	L L : 6 hal	
74	No.74 Tahun 1983 20 Desember 1983	Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dalam Lingkungan DDN.	L L : 10 hal	Dicabut dg KMDN No.10 Th.2003
75	No.75 Tahun 1983 20 Desember 1983	Organisasi dan Tata Kerja Biro Umum Setjen. DDN.	L L : 10 hal	Dicabut dg Kepmen No.92 Th.1992
76	No.76 Tahun 1983 20 Desember 1983	Pembentukan Team Pengelolaan Pelaks. Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tk.Pusat Th.1983/1984.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
77	No.77 Tahun 1983	KOSONG		*
78	No.79 Tahun 1983 26 Desember 1983	Pelaksanaan pengangkatan Guru dan Penjaga SD Negeri TA.1983/1984.	L L : 12 hal	
79	No.79 Tahun 1983 26 Desember 1983	Pelaksanaan Pengangkatan Guru Agama SD Negeri Tahun Anggaran 1983/1984.	L L : 12 hal	
80	No.80 Tahun 1983 31 Desember 1983	Pembentukan Sekretaris Team Koordinasi antar Departemen untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Prop.Dati.I Tim tim.	L L : 6 hal	
*	No.584-651 Th.1983	Pedoman Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah.		Dicabut dg KMDN No.57 Th.1999
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1983 4 Januari 1983	Pelaksanaan Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak Bumi Tahun 1983.	L L : 8 hal	
2	No. 2 Tahun 1983 28 Februari 1983	Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan Pemda Tingkat Prop. Dati I dan Pemda Tingkat Kab./Kotamadya Dati II.	L L : 3 hal Lamp : 6 hal	
3	No. 3 Tahun 1983 17 Maret 1983	Pengamanan Pelaksanaan Sensus Pertanian 1983.	L L : 1 hal	
4	No. 4 Tahun 1983 17 Maret 1983	Koordinasi, Pengawasan dan Pengamanan Harga Dasar Jagung Kuning, Kedele dan Kacang Hijau.	L L : 4 hal	
5	No. 5 Tahun 1983 17 Maret 1983	Koordinasi, Pengawasan dan Penngamanan Harga Dasar Jagung Kuning, Kedele dan Kacang Hijau.	L L : 3 hal	
6	No. 6 Tahun 1983 7 April 1983	Penetapan Desa & Kelurahan Percontohan Pelaksanaan UU No. 5 Th.1979	L L : 2 hal Lamp : 6 hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
7	No. 7 Tahun 1983 23 April 1983	Pelaksanaan PP No. 45,46 ,47,48 dan 49 Tahun 1982 ttg Perubahan Batas Wil. Kotamadya Dati II Probolinggo Pasuruan, Mojokerto, Blitar dan Madiun.	L L : 4 hal	
8	No. 8 Tahun 1983 17 Maret 1983	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Th.1983/1984 di Lingk. DDN.		
9	No. 9 Tahun 1983 23 April 1983	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Prasarana Fisik Th.1983/1984 di Lingk. DDN.		
10	No.10 Tahun 1983 23 April 1983	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Mobilisasi Polisi Pamong Praja Th.1983/1984 di Lingkungan Depdagri.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
11	No.11 Tahun 1983 23 April 1983	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek TA.1983/1984 di Depdagri.		*
12	No.12 Tahun 1983 23 April 1983	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Tim-Tim TA.1983/1984 di Depdagri.		*
13	No.13 Tahun 1983 23 April 1983	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pamong Praja Tim-Tim TA.1983/1984 di Depdagri.		*
14	No.14 Tahun 1983 23 April 1983	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembinaan Teritorial Tim-Tim TA.1983/1984 di Depdagri.		*
15	No.15 Tahun 1983 23 April 1983	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Desa TA.1983/1984 di Depdagri.		
16	No.16 Tahun 1983 6 Mei 1983	Petunjuk Pelaks. KMDN No.261 Th.1982 ttg Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi di Lingkungan Organisasi Pemda dan Wilayah.	L L : 3 hal Lamp : 13 hal	
17	No.17 Tahun 1983 23 Juni 1983	Intensifikasi Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana di Daerah Menjelang Akhir Pelita III.	L L : 4 hal	
18	No.18 Tahun 1983 29 Juni 1983	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa TA.1983/1984.	L L : 5 hal Lamp : 17 hal	
19	No.19 Tahun 1983 30 Juni 1983	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Dati I TA.1983/1984.		*
20	No.20 Tahun 1983 30 Juni 1983	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Penunjang Jalan Kab. Dati II TA.83/84.		*
21	No.21 Tahun 1983 30 Juni 1983	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Dati II TA.1983/1984.		*
22	No.22 Tahun 1983 30 Juni 1983	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung SD TA.1983/1984.		*
23	No.23 Tahun 1983 30 Juni 1983	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan TA.83/84.		*
24	No.24 Tahun 1983 30 Juni 1983	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar TA.1983/1984.		*
25	No.25 Tahun 1983 30 Juni 1983	Petunjuk Lebih Lanjut Mengenai Administrasi Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Th.1983/1984.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
26	No.26 Tahun 1983 22 Juli 1983	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan TA.1983/1984 di Lingkungan Depdagri.		*
27	No.27 Tahun 1983 25 Juli 1983	Usia Perkawinan dalam rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.		*
28	No.28 Tahun 1983 28 Juli 1983	Pelaksanaan Pemilihan Guru Teladan Th.1983. (Ins. Bersama Men P+K, Mendagri, Menlu, dan Menag.).		*
29	No.29 Tahun 1983 2 Agustus 1983	Penelitian Pemberian Tanda Tangan Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Kepada Pemerintah Daerah Tk.II.		*
30	No.30 Tahun 1983 8 Agustus 1983	Perubahan Petunjuk Operasional Pelaks. Bagpro Penyempurnaan Prasarana Fisik Pamong Praja Timor Timur TA.1982/1983.		*
31	No.31 Tahun 1983 22 Agustus 1983 No.6/M/1983	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1983. (InBer Men P+K dan MDN)		*
32	No.32 Tahun 1983 27 Agustus 1983	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Desa, Pembangunan Dati II, I, Pembangunan SD, Sarana Kesehatan & Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten di Prop. Timor Timur 1983/1984.		*
33	No.33 Tahun 1983 10 September 1983	Pengawasan Penggunaan Pestisida Diklorodiferril Triklorelan (DDT). (Ins Bersama Mendagri, Menkes & Mentan).		*
34	No.34 Tahun 1983 16 September 1983	Pembentukan Koperasi Primer Prajamukti I s/d V di Lingkungan Depdagri.		*
35	No.35 Tahun 1983 18 Oktober 1983	Isn kepada Sekjen, Irjen, Para Dirjen, Para Kepala Badan pada Depdagri utk mentaati ketentuan Juklak Menhankam ttg Penggunaan ADC/SPRI Karyawan ABRI pada Pejabat-pejabat utk lingk. Satuan Kerja Masing-masing.		*
36	No.36 Tahun 1983 8 Nopember 1983	Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Seksi Tata Guna Tanah pada Kantor Agraria Kabupaten/ Kotamadya tertentu.		*
37	No.37 Tahun 1983 9 Nopember 1983	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pajak.		*
38	No.38 Tahun 1983 9 Nopember 1983	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan TA.1983/1984 di Lingkungan Depdagri.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>TAHUN 1984</b>			
	<b>PERMENDAGRI</b>			
1	No. 1 Tahun 1984 25 Januari 1984	Tata Cara pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Himp.Perat/Kep/Ins. MDN Th.1984 (I) Hal.:71 - 95	
2	No. 2 Tahun 1984 28 Januari 1984	Penyediaan dan Pemberian Hak Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah yg diselenggarakan dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara.	Himp.Perat/Kep/Ins. MDN Th.1984 (I) Hal.:97 - 103	
3	No. 3 Tahun 1984 19 April 1984	Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan yg Mengadakan Penanaman Modal menurut UU No.1 Th.1967 dan UU No.6 Th.1968.	L L : 48 hal	Diubah dg Permen No.12 Th.1984
4	No. 4 Tahun 1984 3 Desember 1984	Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/ Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.	L L : hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
5	No. 5 Tahun 1984 3 Desember 1984	Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban & keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa	L L : hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
6	No. 6 Tahun 1984 3 Desember 1984	Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.	L L : hal	*
7	No. 7 Tahun 1984 3 Desember 1984	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.	L L : hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
8	No. 8 Tahun 1984 3 Desember 1984	Penghargaan dan Tata cara Kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.	L L : hal	*
9	No. 9 Tahun 1984 3 Desember 1984	Kerjasama dan penyelesaian Perselisihan antar Desa/Kelurahan.	L L : hal	*
10	No.10 Tahun 1984 3 Desember 1984	Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan.	L L : hal	*
11	No.11 Tahun 1984 3 Desember 1984	Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan.	L L : hal	*
12	No.12 Tahun 1984 15 Desember 1984	Penyempurnaan Permendagri No.3/1984 ttg Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan yg Mengadakan Penanaman Modal menurut UU No.1 Th.1967 dan UU No. 6 Th.1968.	L L : hal	*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>KEPMENDAGRI</b>			
1	No. 1 Tahun 1984 14 Januari 1984	Pembentukan Tim Khusus Keuangan Departemen Dalam Negeri.		*
2	No. 2 Tahun 1984 24 Januari 1984	Penetapan Pemimpin dan Bendaharawan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataran Guru Agama SD Tingkat Pusat.		*
3	No. 3 Tahun 1984 23 Januari 1984 No.26/Kpts/1984	Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih (SKB Mendagri & Menteri PU).		
4	No. 4 Tahun 1984 23 Januari 1984 No.27/Kpts/1984	Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum tehnik Operasi dan Pemeliharaan (SKB Mendagri & Menteri PU).	L L : 9 hal	
5	No. 5 Tahun 1984 23 Januari 1984 No.28/Kpts/1984	Pedoman2 Organisasi, Sistem Akuntansi, tehnik perawatan, Struktur dan Perhitungan biaya untuk menentukan tarif pelayanan air minum kepada langganan pengelolaan air bersih ibukota kecamatan dan pengelolaan kran umum air bersih bagi perusahaan daerah air minum dan Badan Pengelola air minum.	L L : 4 hal	
6	No. 6 Tahun 1984 28 Januari 1984	Penyediaan dan Pemberian Hak Tanah utk keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan sederhana/perumahan murah yg diselenggarakan dengan fasilitas kredit pemilikan rumah dari Bank Tabungan Negara.	L L : 8 hal	Dicabut dg KMDN No.70 Th.1984
7	No. 7 Tahun 1984 28 Januari 1984	Pembentukan Tim Penyusunan Penyempurnaan Struktur Organisasi Depdagri.		
8	No.8 Tahun 1984 2 Pebruari 1984	Penyelenggaraan Penataran Kewaspadaan Nasional di Lingkungan Depdagri.		
9	No.9 Tahun 1984 20 Pebruari 1984	Pembentukan Panitia RAKER terbatas Gubernur KDH TK I Seluruh Indonesia.		
10	No.10 Tahun 1984 20 Pebruari 1984	Pembebasan Tugas Bapus Kopda kepada a.n. R. Soeprijo Kamto Koessoemo.		
11	No.11 Tahun 1984 28 Pebruari 1984	Pembentukan Badan Pembina Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia.	L L : 6 hal	
12	No.12 Tahun 1984 29 Pebruari 1984 No.46/Menkes/SKB/I/1984 No.01/Menpan/1984	Kenaikan Pangkat Istimewa Dokter dan Para Medis Teladan Tahun 1983 (Kepber Menkes, Mendagri, Menpan).	L L : 4 hal	
13	No.13 Tahun 1984 8 Maret 1984	Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Ganti (Absentee) Obyek distribusi Landreform.	L L : 6 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
14	No.14 Tahun 1984 9 Maret 1984	Pembentukan Team Pengendalian & Monitoring Proyek2 Penyempurnaan Prasarana Phisik Pemerintah di Lingk. Depdagri.	L L : 10 hal	
15	No.15 Tahun 1984 12 Maret 1984	Perubahan atas KMDN No.234 Th.1976 ttg Pedoman Ketentuan-ketentuan Status, Pengangkatan, Pemberhentian, Penghasilan Dewan Pengawas & Direksi Bank Pembangunan Daerah, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Bank Pembangunan Daerah Peraturan gaji Pegawai Bank Pembangunan Daerah.	L L : 16 hal	
16	No.16 Tahun 1984 12 Maret 1984	Penyelenggaraan pelatihan Dasar Resimen Mahasiswa Bagi Para Mahasiswa Akademi Agraria Depdagri Th.1984/1985 Angkatan I di Yogyakarta.		*
17	No.17 Tahun 1984 15 Maret 1984	Penyelenggaraan Konsultasi Teknis Para Kepala Dit.Agraria Prov. seluruh Indonesia.		
18	No.18 Tahun 1984 21 Maret 1984	Penunjukan Peserta Penataran Kewaspadaan Nasional Angkatan I bagi Pejabat di Lingkungan Depdagri.	L L : 3 hal Lamp : 5 hal	
18A	No.18A Tahun 1984 31 Maret 1984	Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Ke IV Depdagri 1984/1985 dan 1988/1989.	L L : 3 hal	
19	No.19 Tahun 1984 4 April 1984 No.059/KPTS-II/1984 No.124/KPTS/1984	Penanganan Konservasi Tanah dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas.	L L : 9 hal	
20	No.20 Tahun 1984 4 April 1984	Pembentukan Seksi Tata Guna Tanah pada Kantor Agraria Kab./Kotamadya.	L L : 3 hal	
21	No.21 Tahun 1984 13 April 1984	Mengakhiri Penunjukan Gubernur KDH Tk.I NTB sebagai Pejabat Bupati KDH Tk.II Lombok Tengah dan Mengangkat Kol.CZI. Parwoto Wiryapranowo, NRI.18562 sebagai Bupati KDH Tk.II Lombok Tengah.		*
22	No.22 Tahun 1984 13 April 1984	Mengangkat Kol.INF.H. Suparwadi, NRP. 19728 sebagai Bupati KDH.Tingkat.II Lombok Timur.		*
23	No.23 Tahun 1984 13 April 1984	Mengangkat H.Madilaoe ADT. NIP. 610005624, sbg Bupati KDH Tk.II Sumbawa.		*
24	No.24 Tahun 1984 13 April 1984	Perubahan Laporan SK Mendagri No.9 Th.1984 Ttg Pembentukan RAKER terbatas Gub. Kdh.Tk.I Seluruh Indonesia.		*
25	No.25 Tahun 1984 13 April 1984	Kelengkapan Susunan Keanggotaan Organizing Committee.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
26	No.26 Tahun 1984 31 Maret 1984	Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Ke IV DDN 1984/1985-1988/1989.		*
27	No.27 Tahun 1984 4 April 1984	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).		*
28	No.28 Tahun 1984 4 April 1984	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.		Diubah dg KMDN No.9 Th.1987. Dicabut dg KMDN No.53 Th.2000
29	No.29 Tahun 1984 11 April 1984 No.0184a/P/1984 No.SK.37/BU/1U/84/01 No.05/MENDAN/1984	Pemilihan Guru Teladan Tahun 1984 dan Pembentukan panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan Tahun 1984 (SKB Men P&K, Mendagri, Menlu, Menag dan MenPAN).	L L : 10 hal Lamp : 13 hal	
30	No.30 Tahun 1984 14 April 1984	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Kas Daerah, DKI Jakarta.	L L : 14 hal Lamp : 1 hal	
31	No.31 Tahun 1984 2 Mei 1984 No.0209a/K/1984 No.379a/KMK.011/1984	Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SKB Mendagri, Men P&K dan Menkeu).	L L : 8 hal	*
32	No.32 Tahun 1984 2 Mei 1984	Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri TA.1984/1985.		*
33	No.33 Tahun 1984 2 Mei 1984	Pembentukan Asistensi Mendagri utk mengenai Permasalahan yg Berkaitan dg RUU ttg Perubahan UU Pemilu ttg Perubahan Bahan Susunan & Kedudukan MPR, DPR & DPRD ttg perubahan UU Parpol & Golkar Organisasi Kemasyarakatan serta ttg Referendum.		*
34	No.34 Tahun 1984 2 Mei 1984	Pembentukan Seksi Landreform pada kantor agraria Kotamadya.	L L : 4 hal Lamp : 1 hal	
35	No.35 Tahun 1984 7 Mei 1984	Pembentukan Seksi Landreform pada Agraria Barito Timur Daerah Pembantu Bupati Barito Selatan Wil. Barito Timur di Tamiang Layang.	L L : 4 hal	
36	No.36 Tahun 1984 21 Mei 1984	Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.	L L : 4 hal	Dicabut dg KMDN No.42 Th.1999
37	No.37 Tahun 1984 23 Mei 1984	Program Kerja Departemen Dalam Negeri TA.1984/1985.		*
38	No.38 Tahun 1984	BATAL		*
39	No.39 Tahun 1984	KOSONG		*
40	No.40 Tahun 1984 5 Juli Tahun 1984	Pemberhentian dan Pengangkatan sebagai Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Pusat.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
41	No.41 Tahun 1984 11 Juli Tahun 1984	Penunjukan Langsung Untuk Pekerjaan Pengolahan Peta Dasar Secara Matematik, Pengolahan Data Statistik dan Analisa Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan Hasil Pengelolaan untuk Proyek.		*
42	No.42 Tahun 1984 17 Juli Tahun 1984	Penyelenggaraan Kursus Kader Pimpinan Pertahanan Sipil Depdagri.		*
43	No.43 Tahun 1984 17 Juli Tahun 1984	Perubahan dan Penggantian Keanggotaan Team Screening Departemen Dalam Negeri Hari Sugiman (Sospol) sbg Ketua dan Soewandi (Sospo) sbg Sekretaris.		*
44	No.44 Tahun 1984 17 Juli Tahun 1984	Ganti Rugi Bangunan Tambahan Rumah Jabatan di Jl. Margasatwa No.9 Cilandak Jakarta Selatan.		*
45	No.45 Tahun 1984 17 Juli Tahun 1984	Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar.		*
46	No.46 Tahun 1984 20 Juli Tahun 1984	Penyelenggaraan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Depdagri (Sespa).		*
47	No.47 Tahun 1984 27 Juli 1984	Kedudukan "DANA SIMPAN PINJAM" Dep.Dalam Negeri didalam koperasi Primer Prajamukti I.	L L : 3 hal	
48	No.48 Tahun 1984 31 Juli 1984	Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah atas Beberapa Komite Non Minyak dan Gas Bumi.		
49	No.49 Tahun 1984 6 Agustus 1984	Pembentukan Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan & Jasa serta Pemborongan Pekerjaan di lingk. DDN.		
50	No.50 Tahun 1984 10 Agustus 1984 No.0348/P/1984 No.93/.. /VIII/84/01 No.73 Tahun 1984 No.62/Menpan/1984	Pembentukan Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan dan Jasa serta Pemborongan Pekerjaan di lingk. DDN. (SKB Men P&K, Mendagri, Menlu, Menag dan MenPAN).		*
51	No.51 Tahun 1984 11 Agustus 1984	Pedoman Organisasi & Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota DKI Jakarta.		
52	No.52 Tahun 1984 11 Agustus 1984	Perpanjangan masa kerja & penyempurnaan Anggota Sub Team Kerja Pemberian Penghargaan Bagi Pejuang Pembebasan Irian Barat Dari Penjajahan Belanda.		
53	No.53 Tahun 1984 11 Agustus 1984	Penetapan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.	L L : 2 hal Lamp : 1 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
54	No.54 Tahun 1984 8 Agustus 1984	Hari Peringatan Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1984.		
55	No.55 Tahun 1984 16 Agustus 1984	SKB. Menteri Kesehatan Mendagri, Menpan, ttg Upah Istimewa Dokter dan Paramedis Teladan Tahun 1984.		
56	No.56 Tahun 1984 16 Agustus 1984	Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa kpd Pejabat-Pejabat di Lingkungan Depdagri bagi Keanggotaan PNS dalam Partai Politik atau Golongan Karya.	L L : 5 hal	
57	No.57 Tahun 1984 16 Agustus 1984	Penunjukan Pejabat-pejabat tertentu untuk menandatangani petikan surat izin dan mengesahkan penerimaan surat Pemberitahuan untuk menjadi anggota Parpol atau Golkar di lingkungan Depdagri.	L L : 5 hal	
58	No.58 Tahun 1984 24 Agustus 1984	Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi gaji dan pensiun bagi daerah otonom.	L L : 12 hal	
59	No.59 Tahun 1984 28 Agustus 1984	Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Wilayah.	L L : 8 hal Lamp : 2 hal	Dicabut dg KMDN No.27 Th.2000
60	No.60 Tahun 1984 3 September 1984 0408a/U/1984 319/Menkes/SKB/VI/1984 74 Tahun 1984	Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (Kepber Mendikbud, Menkes, Menag dan Mendagri).	L L : 4 hal	Dicabut dg KMDN No.26 Th.2003
61	No.61 Tahun 1984 3 September 1984	Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (SKB. Men P&K, Menkes, Menag, dan MDN).		
62	No.62 Tahun 1984 7 September 1984	Pembentukan Team pengendali Pelaksanaan 8 (delapan) sukses.	L L : 2 hal Lamp : 6 hal	
63	No.63 Tahun 1984 10 September 1984	Piagam Penghargaan Pembangunan Desa.	L L : 5 hal	
64	No.64 Tahun 1984 13 September 1984	Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi.	L L : 5 hal	Dicabut dg KMDN No.19 Th.1992.
65	No.65 Tahun 1984 17 September 1984	Susunan Tim Pelaksana Harian Tim Pengendali Pengadaan Barang Peralatan dan Jasa serta Pemborongan Pekerjaan di Lingk. DDN.	L L : 5 hal	
66	No.66 Tahun 1984 20 September 1984	Pelaksanaan Pemberlakuan sepenuhnya UU No.5 Tahun 1960 di Prop.DIY.	L L : 3 hal	
67	No.67 Tahun 1984 20 September 1984	Pembentukan Kantor Agraria Kab. Sleman Bantul Kulon progo Gunung Kidul dan Kantor Agraria Kotamadya Yogyakarta.	L L : 3 hal Lamp : 1 hal	
68	No.68 Tahun 1984 24 September 1984	Pemberlakuan Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1972 ttg Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah di Prop. DIY.	L L : 3 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
69	No.69 Tahun 1984 24 September 1984	Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak atas Tanah Milik Perorangan Berdasarkan Perda DIY No. 5 Th.1954 di Prop. DIY.	L L : 3 hal	
70	No.70 Tahun 1984 28 September 1984	Pencabutan Kepmendagri No.6 Th.1984 ttg Penyediaan Pemberian Hak Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah yg diselenggarakan dg Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara.	L L : 3 hal	
71	No.71 Tahun 1984 28 September 1984 Skb-125/M/Kpts/X/84 0447a/M/1984	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Sekolah. (SKB Menkop, Men P+K dan Mendagri).		*
72	No.72 Tahun 1984	KOSONG		*
73	No.73 Tahun 1984 7 Oktober 1984	Pelaksanaan Keppres RI No. 5 Th.1982 ttg penunjukan tempat berdiam sementara bagi orang asing yg masuk kedalam atau tinggal diwilayah RI secara tidak syah dan belum dapat dikeluarkan.(Kep Ber Menkeh & MDN).	L L : 7 hal	
74	No.74 Tahun 1984 8 Desember 1984 No.671/Menkes/SKB/XII/84 No.74/MENPAN/1984	Penyelesaian kenaikan pangkat tenaga para medis yang diperbantukan/dipekerjakan pd daerah otonomi atau instansi lain (Kep Ber Menkes, Mendagri dan MenPAN).	L L : 5 hal	
75	No.75 Tahun 1984 31 Oktober 1984	Rencana Penerimaan Ipeda Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tiap Dati II TA.1984/1985.		*
76	No.76 Tahun 1984 31 Oktober 1984	Bantuan Biaya Penyelesaian Pembahasan 5 Paket Ranc. UU menjadi UU.		*
77	No.77 Tahun 1984 5 Nopember 1984 No.431/Kpts/1984	Tata cara Pelaksanaan Inventarisasi dan Pengukuran dlm rangka pembebasan Tanah Proyek <sup>2</sup> Dep. PU. (Kep Ber Men.PU & MDN).	L L : 8 hal	
78	No.78 Tahun 1984 5 Nopember 1984	Bantuan Belanja Rutin 1984/1985 Daerah otonom untuk biaya Up grading pimpinan Proyek dan bendaharawan proyek/rutin.	L L : 3 hal	
79	No.79 Tahun 1984 5 Nopember 1984	Pembentukan Sub Direktorat Landreform pada Direktorat Agraria Prop. Irja.		
80	No.80 Tahun 1984 7 Nopember 1984	Penunjukan Pejabat-2 dilingk. Depdagri yg diberi kuasa untuk atas nama Mendagri menandatangani formulir nota persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara utk permintaan persetujuan mutasi.	L L : 5 hal	Dicabut dg KMDN No.26 Th.2003
81	No.81 Tahun 1984 17 Nopember 1984	Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Kecamatan.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
82	No.82 Tahun 1984 17 Nopember 1984	Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan	L L : 6 hal Lamp : 1 hal	
83	No.83 Tahun 1984 17 Nopember 1984	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan.	L L : 10 hal Lamp : 1 hal	
84	No.84 Tahun 1984 23 Nopember 1984 0537/p/1984 68/Menpan/1984	Penyelesaian ..... dan Pengangkatan Guru SD Negeri dan Penjaga Sekolah.		*
85	No.85 Tahun 1984 8 Desember 1984	Penggantian Keanggotaan panitia Penga-daan tanah Pusat untuk Keperluan Perum Pembangunan Perumahan Nasional.	L L : 3 hal	
86	No.86 Tahun 1984 4 Desember 1984	Pedoman Organisasi & Tata Kerja Kantor Pelistrikan Desa Propinsi Dati I Jateng.	L L : 11 hal Lamp : 2 hal	
89	No.89 Tahun 1984 13 Desember 1984	Persetujuan Penunjukan langsung kepada PT.Barata Indonesia (PERSERO) sebagai pelaksana pengadaan traktor doser tipe TD-80 untuk keperluan Kab/Kodya Dati II ee Indonesia.	L L : 4 hal	
90	No.90 Tahun 1984 14 Desember 1984	Penunjukan Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kubah II Gedung Administrasi dan Gedung Perpustakaan pada Kampus Akademi Agraria di Yogyakarta.		*
91	No.91 Tahun 1984 26 Desember 1984	Penggunaan Dana Cadangan Menteri Sisa Dana Th.1982/1983 dan 1983/1984 untuk Membangun 6 Rumah Jabatan dan Bantuan Rehabilitasi Bangunan Umum IIP dan Kompleks Perumahan Pegawai DDN di Pondok Labu.		*
92	No.91 Tahun 1984 26 Desember 1984	Penyisihan dan Penghapusan sisa Dana Cadangan Menteri TA.1982/1983 dan 1983/1984 dari Perhitungan Dana Cadangan Menteri TA.1982/1983 dan 1983/1984.		*
93	No.93 Tahun 1984 31 Desember 1984	Pembentukan POKJA Intern Depdagri.	L L : 4 hal Lamp : 2 hal	
94	No.94 Tahun 1984 15 Desember 1984	Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN.		*
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1984 11 Januari 1984	Pelaksanaan Penyesuaian harga bahan Bakar Minyak Bumi Tahun 1984	L L : 4 hal	
2	No. 2 Tahun 1984 28 Januari 1984	Pendaftaran Uang Pesawat Penerima TV	L L : 4 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
3	No. 3 Tahun 1984 31 Januari 1984	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembinaan Teritorial Timor Timur TA. 1983/1984 Depdagri.	L L : 12 hal	
4	No. 4 Tahun 1984 31 Januari 1984	Intensifikasi Pemasukan IPEDA	L L : 4 hal	
5	No. 5 Tahun 1984 14 Februari 1984	Koordinasi, Pengawasan dan Pengamanan Pengadaan Pangan Dalam Negeri	L L : 4 hal	
6	No. 6 Tahun 1984 24 Februari 1984	Penyelenggaraan Perjalanan Umroh	L L : 4 hal Lamp : 4 hal	
7	No. 7 Tahun 1984 5 Maret 1984	Pedoman Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit di Daerah (Ins Ber Menaker & MDN).	L L : 5 hal	
8	No. 8 Tahun 1984 23 Maret 1984	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek proyek Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985 di Lingkungan Depdagri.	L L : 2 hal	
9	No. 9 Tahun 1984 26 Maret 1984	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek proyek Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985 Di Lingkungan Depdagri.	L L : 2 hal Lamp : 38 hal	
10	No.10 Tahun 1984 4 April 1984	Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Seksi Tata Guna Tanah pada Kantor Agraria Kab. Kotamadya tertentu.	L L : 4 hal Lamp : 4 hal	
11	No.11 Tahun 1984 10 April 1984	Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa.	L L : 2 hal Lamp : 29 hal	Dicabut dg Inmen No.18 Th.1990
12	No.12 Tahun 1984 11 April 1984	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985 di Lingkungan Depdagri.	L L : 2 hal Lamp : 14 hal	
13	No.13 Tahun 1984 11 April 1984	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan TA.1984/1985 di Lingk. Depdagri.	L L : 2 hal Lamp : 14 hal	
14	No.14 Tahun 1984 19 April 1984	Penunjukan Pelaksana Penyuluhan, Bimbingan dan Penataran Bagi Guru Agama SD Th.1982/1983.		*
15	No.15 Tahun 1984 28 April 1984	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan TA. 1984/1985 di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 2 hal L L : 11 hal	
16	No.16 Tahun 1984 2 Mei 1984	Hal-hal yang di Pengadilan yang Belum atau Sudah Memperoleh Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.	L L : 4 hal	Dicabut dg KMDN No.104 Th.1991
17	No.17 Tahun 1984 20 Mei 1984	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II	L L : 3 hal Lamp : 30 hal	
18	No.18 Tahun 1984 24 Mei 1984	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung SD.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
19	No.19 Tahun 1984 24 Mei 1984	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan	L L : 3 hal Lamp : 31 hal	
20	No.20 Tahun 1984 24 Mei 1984	Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Dati.I	L L : 4 hal Lamp : 24 hal	
21	No.21 Tahun 1984 24 Mei 1984	Penunjuk Administrasi Pelaksanaan Bantuan Penghijauan Dan Reboisasi.	L L : 4 hal Lamp : 55 hal	
22	No.22 Tahun 1984 24 Mei 1984	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Penunjang Jalan Kab. Dati II.	L L : 3 hal Lamp : 26 hal	
23	No.23 Tahun 1984 26 Mei 1984 INS.11/MEN/1984	Hubungan Kerja Antara Gubernur Kepala Dati I dan Kepala Kanwil Depnaker.	L L : 3 hal	
24	No.24 Tahun 1984 7 Juni 1984	Pelaksanaan Keputusan Mendagri No. 45 Tahun 1983 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kab./Kotamadya.	L L : 5 hal	
25	No.25 Tahun 1984 -	Pelaksanaan Keputusan Mendagri No. 55 Tahun 1983 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Prop. DKI Jakarta.	L L : 5 hal	
26	No.26 Tahun 1984 19 Juni 1984	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.	L L : 5 hal Lamp : 24 hal	Diubah dg Inmen No.7 Th.1991
27	No.27 Tahun 1984 22 Juni 1984	Pembentukan Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa.	L L : 6 hal	
28	No.28 Tahun 1984 23 Juli 1984	Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa / Kelurahan.	L L : 4 hal Lamp : 6 hal	Dicabut dg KMDN No.3 Th.2001
29	No.29 Tahun 1984 23 Agustus 1984	Pembelian Tiket Pesawat Terbang Perjalanan Dinas Karyawan dilingkungan Depdagri.	L L : 3 hal	
30	No.30 Tahun 1984 30 Agustus 1984	Usaha Peningkatan Produksi Perkebunan.	L L : 4 hal	
31	No.31 Tahun 1984 14 September 1984	Penyelenggaraan Penataran P-4 di wilayah Kabupaten Dati II kotamadya Dati II dan Kota Administratif seluruh Indonesia.	L L : 4 hal Lamp : 8 hal	
32	No.32 Tahun 1984 27 September 1984	Pelaksanaan Bulan Bakti Agraria.	L L : 2 hal Lamp : 2 hal	
33	No.33 Tahun 1984 10 Oktober 1984	Peningkatan atas pelaksanaan keputusan Presiden No. 50 Tahun 1981 melalui pola Perusahaan Inti Rakyat Perunggasan.	L L : 3 hal	
34	No.34 Tahun 1984 17 Oktober 1984	Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Desa, Bantuan Pembangunan Dati II, Bantuan Pembangunan Dati I, bantuan SD, Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dan Bantuan Penunjang Jalan Kab. Dati II di Prop. Dati I Timor Timur Th.1984/1985.	kosong	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
35	No.35 Tahun 1984 10 Nopember 1984	Usaha Kesejahteraan Anak.	L L : 5 hal	
36	No.36 Tahun 1984 3 Desember 1984	Pedoman Pembentukan Team Pengendalian Pengadaan Barang/peralatan dan jasa serta pemborongan pekerjaan.	L L : 6 hal	
37	No.37 Tahun 1984 3 Desember 1984	Proyek Pengangkatan Prasarana Fisik Pamong Praja Prop. Timor Timur TA. 1984/1985 dilingkungan Depdagri	L L : 2 hal Lamp : 11 hal	
38	No.38 Tahun 1984 31 Desember 1984	Kewajiban Mengajukan Pengampunan Pajak dlm rangka Pelaks. Keppres No. 26 Th.1984.	L L : 4 hal	
<b>TAHUN 1985</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 1985 27 Juli 1985	Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan <sup>2</sup> yg Mengadakan Penanaman Modal menurut UU No.1 Th.1967 dan UU No.6 Th.1968.		*
2	No.2 Tahun 1985 1 Agustus 1985	Tata Cara Pengadaan Tanah utk keperluan Proyek Pembangunan di Wil. Kecamatan.		*
3	No.3 Tahun 1985 19 September 1985	Tata Cara Pensertifikatan Tanah bagi Program dan Proyek Departemen Dalam Negeri.		*
4	No.4 Tahun 1985 31 Desember 1985	Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.		*
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1985 22 Januari 1985	Pengesahan Penjualan Rumah Gol.III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik/ yg dikuasai Pemerintah Kabupaten Dati.II Bima.	L L : 5 hal Lamp : 1 hal	
2	No. 2 Tahun 1985 28 Januari 1985	Bantuan Terhadap Saudara J.A. Papare dari Angg. Belanja Rutin 84/85 Daerah Otonom.	L L : 3 hal	
3	No. 3 Tahun 1985 28 Januari 1985	Penyelenggaraan Latihan Dasar Menwa bagi para Mahasiswa Akademi Agraria Depdagri Angkt.II Th.84/85 di Yogyakarta.	L L : 3 hal	
4	No. 4 Tahun 1985 5 Februari 1985	Pembentukan Panitia Rapat Kerja Terbatas Gubernur Kepala Dati. I Seluruh Indonesia.	L L : 2 hal Lamp : 1 hal	
5	No. 5 Tahun 1985 7 Februari 1985	Penghapusan Tanah & Bangunan beserta Prasarananya Milik Depdagri Cq. Ditjen. Agraria di Jl. Dipati Ukur No.26 dan di Jl. Dalem Kaum No.123 Kotamadya Bandung Cq. Ditjen. Agraria.	L L : 2 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
6	No. 6 Tahun 1985 7 Februari 1985	Penggunaan Dana Cadangan Menteri Sisa Dana Th.'82/83 yg disisihkan utk keperluan Pengadaan Buku Bank dan Wiraswasta.	L L : 2 hal	
7	No. 7 Tahun 1985 11 Februari 1985	Pengesahan Program Pembangunan Sosial Politik 5 Tahun di Dati I Riau.	L L : 2 hal	
8	No. 8 Tahun 1985 11 Februari 1985	Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Pemerintah Propinsi Dati I di Jakarta, Cabang Dinas Dati I dan Kantor Catatan Sipil Kab./Kotamadya.	L L : 7 hal Lamp : 8 hal	
9	No. 9 Tahun 1985 18 Februari 1985	Penghapusan sekolah lanjutan Pemerintahan Umum Tk.II di Bandung, Yogyakarta, Ujung Pandang, Banjarbaru & Medan & Pengalihan ke Pendidikan dan Latihan Propinsi.	L L : 3 hal	
10	No.10 Tahun 1985 18 Februari 1985	Anggauta Pembantu Seksi-seksi Organizing Committee (Keputusan Ketua Umum Panitia Raker Gubernur KDH Tk.I Seluruh Indonesia).	L L : 2 hal Lamp : 4 hal	
11A	No.11A Tahun 1985 18 Februari 1985	Penggunaan Dana Cadangan Menteri Sisa Dana Tahun 1982/1983 dan 1983/1984 yg Disisihkan utk Keperluan Penyempurnaan Kompleks Diklat Depdagri di Bogor.	L L : 2 hal	
11	No.11 Tahun 1985 18 Februari 1985	Tanda Anggota Pertahanan Sipil.	L L : 3 hal	
12	No.12 Tahun 1985 26 Februari 1985	Pengikutsertaan Pada Pameran Produksi Indonesia Tahun 1985.	L L : 4 hal	
13	No.13 Tahun 1985 9 Maret 1985	Penghapusan Gedung Aula Dit.Agraria Prop. Jateng di Komplek Kantor Dit.Agraria Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 23 Semarang dari Daftar Inventaris Depdagri Cq.Ditjen. Agraria.	L L : 3 hal	
14	No.14 Tahun 1985 13 Maret 1985	Penunjukan Peserta Penataran Kewaspadaan Nasional Bagi Pejabat di Lingk. Depdagri.	L L : 2 hal Lamp : 3 hal	
15	No.15 Tahun 1985 3 Maret 1985	Pengangkatan Sekretaris Team Pelaksana Pembangunan Pusat Prop. Dati I Timor Timur.	L L : 2 hal	
16	No.16 Tahun 1985 13 Maret 1985	Penetapan Panitia dan Lokasi Penyelenggaraan Orientasi/Coaching bagi para Pegawai yang Ditempatkan di Prop.Dati I Timor Timur.	L L : 2 hal	
17	No.17 Tahun 1985 28 Maret 1985	Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Th.1985/1986.		
18	No.18 Tahun 1985 28 Maret 1985	Petunjuk Pelaks. Diklat Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah.	L L : 8 hal	
19	No.19 Tahun 1985 15 April 1985	Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok PNS Pusat Dalam Lingk. Depdagri.	L L : 3 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
20	No.20 Tahun 1985 15 April 1985	Pemberian Piagam Penghargaan Kepada Pencipta Lagu Mars Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.	L L : 2 hal	
21	No.21 Tahun 1985 25 April 1985	Penunjukan Peserta penataran Kewaspadaan Nasional Bagi Pejabat di Lingk. Depdagri.	L L : 2 hal Lamp : 3 hal	
21A	No.21A Tahun 1985 9 Maret 1985	Pengalihan Status Kepegawaian dari PNS pada PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia menjadi Pegawai PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.	L L : 5 hal	
22	No.22 Tahun 1985 22 Mei 1985 185/M/SK/5/1985 242A/MenKes/SKB//1985 756A/Kpb/V/1985	Garam Beryodium	L L : 5 hal	Dicabut KMDN No.46 Th.1995
23	No.23 Tahun 1985 29 Mei 1985	Pembentukan Kelompok Pelaksana Proyek Santiaji Pemerintahan.	L L : 3 hal Lamp : 2 hal	
24	No.24 Tahun 1985 29 Mei 1985	Pembentukan Kelompok Pelaksana Proyek Pembinaan Hansip dan Menwa.	L L : 3 hal Lamp : 1 hal	
25	No.25 Tahun 1985 29 Mei 1985	Penyempurnaan Kelompok Kerja Pengawasan di Lingk. Itjen Depdagri.	L L : 3 hal Lamp : 2 hal	
26	No.26 Tahun 1985 29 Mei 1985	Pembentukan Kelompok Pelaksana Proyek Perencanaan Sosial Politik.	L L : 3 hal Lamp : 2 hal	
27	No.27 Tahun 1985 29 Mei 1985	Pembentukan Kelompok Pelaksana Proyek Pemantapan Hubungan antar Lembaga Ditjen. Sosial Politik.	L L : 3 hal Lamp : 3 hal	
28	No.28 Tahun 1985 30 Mei 1985	Team Dokumentasi dalam Rangka Hubungan Fungsional antar Depdagri dan DPR-RI Khususnya Komisi II.	L L : 3 hal Lamp : 1 hal	
29	No.29 Tahun 1985 30 Mei 1985	Perpanjangan Masa Kerja dan Penggantian Anggota Sub Team Kerja Pemberian Penghargaan Bagi Pejuang Pembebasan Irian Barat dari Penjajahan Belanda.	L L : 2 hal Lamp : 2 hal	
30	No.30 Tahun 1985 7 Juni 1985	Penyempurnaan Team Pengendali Pelaksanaan Operasi Tertib di Lingkungan Inspektorat Jenderal Depdagri.	L L : 3 hal Lamp : 1 hal	
31	No.31 Tahun 1985 15 Juni 1985	Pembentukan Team Penyusunan Pendayagunaan Daftar Isian Pegawai Depdagri.	L L : 3 hal Lamp : 2 hal	
32	No.32 Tahun 1985 24 Juni 1985 No.0260/P/1985 No.053/BU/VI/85/01 No.54 A Tahun 1985 No.58/MENPAN/1985	Pemilihan Guru Teladan Tahun 1985 dan Pembentukan Panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan Tahun 1985 (Kep Ber Mendikbud, Mendagri, Menlu, Menag dan Menpan)	L L : 7 hal Lamp : 9 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
33	No.33 Tahun 1985 24 Juni 1985	Pembentukan Team Pelaksana dan Staf Administrasi Serta Perencana Pembantu Pimpro Proyek Peningkatan Daya Guna Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Wilayah Dati I Tahun 1985/1986.	L L : 5 hal Lamp : 1 hal	
34	No.34 Tahun 1985 4 Juli 1985 572/KMK.04/1985	Rencana Penerimaan Ipeda Sektor Pedesaan dan perkotaan Tiap Dati II TA. 1985/1986.	L L : 3 hal Lamp : 19 hal	
35	No.35 Tahun 1985 1 Agustus 1985	Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Dati I Timor Timur.	L L : 6 hal	
36	No.36 Tahun 1985 8 Agustus 1985	Pendelegasian Wewenang Penngangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 2 hal	Dicabut dg KMDN No.81 Th.1990
37	No.37 Tahun 1985 8 Agustus 1985	Kenaikan Pangkat Istimewa Dokter dan Paramedis Teladan di Puskesmas.		*
38	No.38 Tahun 1985	KOSONG		
39	No.39 Tahun 1985 15 Agustus 1985	Penetapan Guru Teladan Tahun 1985		*
40	No.40 Tahun 1985 17 September 1985	Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Daftar dalam rangka penelitian dan penilaian Warganegara Republik Indonesia yg terlibat G.30.S/PKI yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dlm Pemilu.	L L : 4 hal	
41	No.41 Tahun 1985 4 Nopember 1985	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal (Kepber Menhub & Mendagri)	L L : 14 hal	
42	No.42 Tahun 1985 4 Nopember 1985	Bantuan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.	L L : 4 hal	
43	No.43 Tahun 1985 9 Nopember 1985	Pedoman Penyusunan Jadwal Retensi Arsip.	L L : 2 hal	
44	No.44 Tahun 1985 16 Nopember 1985	Pedoman Uraian Tugas Sub Bagian pada Sekwilda Tk.I dan Sekretariat DPRD Tk.I.		
45	No.45 Tahun 1985 26 Nopember 1985	Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pertemuan Ciedap.	L L : 16 hal	
46	No.46 Tahun 1985 3 Desember 1985	Pembagian dan Prosedure Penyaluran Iuran hasil Hutan.	L L : 4 hal	
47	No.47 Tahun 1985 3 Desember 1985	Pembentukan Team Pembina Pengembangan Kredit Pedesaan Tingkat Pusat.	L L : 4 hal	
48	No.48 Tahun 1985 17 Desember 1985	Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya KMDN No.68/1984 ttg Pemberlakuan Permendagri No.6/1972 ttg Pelimpahan Wewenang Pemberian hak atas tanah di Prop. DIY.	L L : 6 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
49	No.49 Tahun 1985 26 Desember 1985	Komputerisasi Kepegawaian Departemen Dalam Negeri.	L L : 4 hal	Dicabut dg KMDN No.17 Th.2000
50	No.50 Tahun 1985 24 Desember 1985	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kab./Kotamadya Tipe C menjadi Kantor Catatan Sipil Kab./ Kotamadya Tipe B.	L L : 4 hal	
51	No.51 Tahun 1985 31 Desember 1985	Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.	L L : 4 hal	
*	SK.9/DJA/1985 23 Januari 1985	Penunjukan Yayasan "Ibu Wirdjodihrdjo" sebagai Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.	L L : 3 hal	
*	No.118.05-422 11 Mei 1985	Perubahan Kembali Susunan Keanggotaan Team antar Departemen Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.	L L : 2 hal Lamp : 2 hal	
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1985 8 Januari 1985	Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Prakuilifikasi	L L : 2 hal Lamp : 2 hal	
2	No. 2 Tahun 1985 21 Januari 1985	Peningkatan Pelaks. Program Keluarga Berencana Nasional di Daerah dlm Pelita IV	L L : 4 hal	
3	No. 3 Tahun 1985	Pembinaan Dekopenwil dan Dekopinda.	L L : 2 hal	
4	No. 4 Tahun 1985	Bulan Bakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.	L L : 3 hal Lamp : 9 hal	
5	No. 5 Tahun 1985 29 Januari 1985	Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Propinsi Daerah Tingkat I.	L L :3 hal Lamp : 3 hal	
6	No. 6 Tahun 1985 20 Februari 1985	Pelaksanaan Kepmendagri No.64 Th.1984 ttg Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Propinsi.	L L :3 hal	
7	No. 7 Tahun 1985 27 Februari 1985	Peningkatan Peran Serta Gubernur KDH Tk.I dan Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk.II dalam Pelaksanaan Program Bimas, KUD dan Tri Musim Tanah Th.1985/1986.	L L : 3 hal Lamp : 4 hal	
8	No. 8 Tahun 1985 6 Maret 1985	Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1983.	L L :4 hal Lamp : 10 hal	Dicabut dg Keppres No. 114 Th.1999
9	No. 9 Tahun 1985 12 Maret 1985	Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI ABRI masuk desa.	L L : 5 hal	
10	No.10 Tahun 1985 27 Februari 1985	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan TA.1985/1986 di Lingkungan Depdagri untuk 25 Propinsi.		
11	No.11 Tahun 1985 19 Maret 1985	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan TA.1985/1986 di Pusat.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
12	No.12 Tahun 1985 19 Maret 1985	Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah dlm rangka Program Pengembangan Wilayah.		*
13	No.13 Tahun 1985 12 Maret 1985	Petunjuk Pelaks. Kepmendagri No.8 Th.1985 ttg Ketentuan Bentuk & Penggunaan Stempel Dinas Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Pemerintah Prop. Dati I dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten /Kotamadya	L L : 3 hal Lamp : 4 hal	
14	No.14 Tahun 1985	KOSONG		*
15	No.15 Tahun 1985 19 Maret 1985	Petunjuk Operasional Pelaks. Proyek Proyek Pembangunan TA. 85/86 di Lingk.Depdagri.	L L : 5 hal Lamp : 3 hal	
16	No.16 Tahun 1985 19 Maret 1985	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Proyek Pembangunan TA.1985/1986 di Lingkungan Dit. PUOD.		
17	No.17 Tahun 1985 19 Maret 1985	Peningkatan Administrasi Kepegawaian.		*
18	No.18 Tahun 1985 19 Maret 1985	Penetapan Proyek Kelembagaan Tatalaksana dan Pengembangan Peraturan Per-UU-an.		*
19	No.19 Tahun 1985 19 Maret 1985	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.257 Th.1982 ttg Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Depdagri.	L L : 8 hal	Dicabut dg Kepmen No.4 Th.2002
20	No.20 Tahun 1985 19 April 1985	Susunan Ekonomi 1986.	L L : 2 hal	
21	No.21 Tahun 1985 20 April 1985	Pelaksanaan Impres No. 4 Tahun 1985 ttg Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk menunjang Kegiatan Ekonomi.	L L : 2 hal	
22	No.22 Tahun 1985 20 April 1985	Peningkatan Kegiatan Panjatapda untuk Kelancaran Arus Barang di Daerah.	L L : 4 hal L amp : 2 hal	
23	No.23 Tahun 1985 22 April 1985 214/MENKES/INST. B/IV/1985 112/Hk. 011/A/1985	Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan & Kepala Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (Insber Menkes, BKKBN dan MDN).	L L : 4 hal	
24	No.24 Tahun 1985 9 Mei 1985	Larangan Perubahan Fungsi Tanah Bengkok Taman Kota, Kebun Binatang dan Lapangan Olah Raga.	L L : 2 hal	
25	No.25 Tahun 1985 15 Mei 1985	Pelaksanaan Kepmendagri No.82 Th.1984 ttg Pola Organisasi Pemerintahan Wil. Dalam Negeri No.83 Th.1984 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan.	L L : 8 hal	
26	No.26 Tahun 1985 28 Juni 1985	Petunjuk Pelaks. lebih lanjut bantuan Pembangunan di Prop. Dati I Timtim Th. 85/86.	L L : 24 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
26A	No.26A Tahun 1985 29 Mei 1985	Pembentukan Kelompok Pelaksana Proyek Perencanaan Sosial Politik.	L L : 6 hal	
27	No.27 Tahun 1985 1 Juli 1985	Penyempurnaan Inmendagri No.18 Th.1984 ttg Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah.	L L : 6 hal	
28	No.28 Tahun 1985 ....April 1985	Penyempurnaan Inmendagri No.9 Th.1985 ttg Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.	L L : 36 hal	
29	No.29 Tahun 1985 1 Juli 1985	Penyelenggaraan Penataran P-4 diwilayah Kabupaten Dati II Kotamadya Dati II, dan Kotamadya seluruh Indonesia.	L L : 30 hal	
30	No.30 Tahun 1985 5 Agustus 1985	Penegakan Hukum/Peraturan dalam rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan	L L : 10 hal	
31	No.31 Tahun 1985 3 September 1985	Kewenangan Penyidikan Thdp Pelanggaran Lalu Lintas dan Sangkutan Jalan Raya.	L L : 4 hal	
32	No.32 Tahun 1985 9 Oktober 1985	Penyempurnaan Inmendagri No.22 Th.1984 ttg Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Dati II.	L L : 4 hal	
33	No.33 Tahun 1985 9 Oktober 1985	Penyempurnaan Inmendagri No.17 Th.1984 ttg Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Dati II.		*
34	No.34 Tahun 1985 11 Nopember 1985	Pelaksanaan Kepmendagri No.43 Th.1985 ttg Pedoman Penyusunan Jadwal Retensi Arsip.		*
35	No.35 Tahun 1985 11 Nopember 1985	Pembinaan dan Pengembangan KUD.	L L : 26 hal	
36	No.36 Tahun 1985 12 Nopember 1985	Pembinaan Petani Ternak Perah.	L L : 4 hal	
37	No.37 Tahun 1985 16 Nopember 1985	Petunjuk Pelaksanaan Kep. Bersama Menteri Perindustrian, Menkes, Mendag & Mendagri No.185/M/MK/1985, No.242/ MENKES/SKB/V/1985, No.756 A/Kpb/ V/85, No.22 Th.1985 tanggal 22 Mei 1985 ttg Garam Beryodium.	L L : 4 hal	
38	No.38 Tahun 1985 28 Nopember 1985	Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mendagri No.44 Tahun 1985 ttg Pedoman Uraian Tugas Sub. Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dati I.	L L : 8 hal	
39	No.39 Tahun 1985 11 Desember 1985	Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan dan Penataran Guru Agama Sekolah Dasar.	L L : 6 hal	
40	No.40 Tahun 1985 31 Desember 1985	Pelaksanaan UU No.12 Th.1985 ttg Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah.	L L : 10 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
<b>TAHUN 1986</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1986 12 Juli 1986	Tata cara penyediaan lahan dan Pemberian Hak atas tanah/dalam rangka pengembangan perkebunan dalam pola perusahaan inti rakyat yang dikaitkan dengan program Transmigrasi.	L L : 6 hal	
2		KOSONG		
3	No. 3 Tahun 1986 1 Oktober 1986	Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga	L L : 9 hal Penj : 10 hal	
4	No. 4 Tahun 1986 1 Oktober 1986	Tanda Pengenal Komisaris Partai Politik dan Golkar.	L L : 3 hal Lamp : 2 hal	
5	No. 5 Tahun 1986 1 Oktober 1986	Ruang Lingkup Tata cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta papan nama dan lambang Organisasi Kemasyarakatan.	L L : 6 hal Lamp : 2 hal	Dicabut dg Permen No.33 Th.2012
6	No. 6 Tahun 1986 15 Nopember 1986	Pencabutan Permendagri No.3 Th.1978 ttg Fatwa Tata Guna Tanah.	L L : 3 hal	
7	No. 7 Tahun 1986 29 Nopember 1986	Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia.	L L : 3 hal	
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1986 6 Januari 1986	Penyelenggaraan Orientasi Kewaspadaan Nasional Dharma Wanita.		*
2	No. 2 Tahun 1986 6 Januari 1986	Pembentukan Tim Pembiayaan Pengembangan Kredit Desa.		*
3	No. 3 Tahun 1986 6 Januari 1986	Penyelenggaraan Orientasi Kewaspadaan Nasional Dharma Wanita.		*
4	No. 4 Tahun 1986 16 Januari 1986	Pembentukan Panitia Rapat Kerja Sekwilda Tk.I & Ketua Bappeda Tk.I Seluruh Indonesia.		*
5	No. 5 Tahun 1986 22 Januari 1986	Pembentukan Panitia Rapat Kerja Sekwilda Tk.I & Ketua Bappeda Tk.I Seluruh Indonesia.		*
6	No. 6 Tahun 1986 23 Januari 1986	Tata cara Penyampaian dan Penandatanganan Naskah Dinas Departemen Dalam Negeri.	L L : 8 hal	Dicabut dg KMDN No.98 Th.1992
7	No. 7 Tahun 1986 25 Januari 1986	Pembentukan Team Peneliti Penelitian Sosial Budaya Masyarakat Desa di Propinsi.		*
8	No. 8 Tahun 1986 19 Februari 1986	Tata cara dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Tugas Belajar dan Mahasiswa Ikatan Dinas pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan Akademi Agraria	L L : 9 hal	Dicabut dg Kepmen No.27 Th.1988

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
9	No. 9 Tahun 1986 19 Februari 1986	Tata cara dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa tugas belajar DDN pada IIP dan Perguruan Tinggi Negeri.	L L : 8 hal	
10	No.10 Tahun 1986 19 Februari 1986	Pedoman Tata Upacara Wisuda APDN Akademi Agraria dan IIP Depdagri.		*
11	No.11 Tahun 1986 20 Februari 1986 KM 32/AL 101/PHB-1986	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Dumai.	L L : 6 hal	
12	No.12 Tahun 1986 20 Februari 1986 KM 32/AL 101/PHB-1986	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang.	L L : 6 hal	
13	No.13 Tahun 1986 20 Februari 1986 KM 31/AL 101/PHB-1986	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten.	L L : 6 hal	
14	No.14 Tahun 1986 5 Maret 1986	Pengesahan Berita Acara Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan Pasar Th.1983/1984 Untuk Kabupaten-kabupaten Dati II/Propinsi Dati I Sumatera Selatan.		*
15	No.15 Tahun 1986 15 Maret 1986	Pembnetukan Kelompok Kerja & Sekretariat Kelompok Kerja Penyusunan Hasil Pelaks. Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Th.1985/1986.		*
16	No.16 Tahun 1986 15 Maret 1986	Penetapan Tolok Ukur Pembentukan Lembaga Asisten Sekwilda Tk.II dan Asisten Sekwilda Tk.II.		
16A	No.16A Tahun 1986 17 Maret 1986	Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan & Pemugaran Pasar Th.83/84 untuk Dati II pada Propinsi Dati I Sumbar.		*
17	No.17 Tahun 1986 21 Maret 1986	Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi Tanahnya yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Dati II Bondowoso.		*
18	No.18 Tahun 1986 21 Maret 1986	Penyelenggaraan Ujian Akhir Bagi IIP APDN.		*
19	No.19 Tahun 1986 2 April 1986	Penelitian Pengembangan Program Pembinaan Kesejahteraan PKK		*
20	No.20 Tahun 1986 3 April 1986	Penambahan Pengadaan Peralatan Telekomunikasi SSB Depdagri		*
21	No.21 Tahun 1986 5 April 1986	Penetapan Wilayah Dalam Daerah Tk.II yg Belum Berstatus Kecamatan Sebagai Wilayah Setingkat Dengan Kecamatan untuk Keperluan Pemilu.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
22	No.22 Tahun 1986	Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.		*
23	No.23 Tahun 1986 12 April 1986	Ketentuan Umum mengenai Penyidik Peg. Negeri Sipil Di Lingk. Pemerintah Daerah.		*
24	No.24 Tahun 1986 12 April 1986	Pembentukan Asisten Sekretaris Wil. Dati II dan Asisten Sekretaris Kodya Dati II.	L L : 4 hal	
25	No.25 Tahun 1986 14 Mei 1986 0318a/P/1986 257a/KMK.011/1986	Alokasi Subsidi /Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri TA. 1986/1987 (Kepber Mendikbud, Menkeu & Mendagri)	L L : 4 hal Lamp : 13 hal	
26	No.26 Tahun 1986	KOSONG		*
27	No.27 Tahun 1986 23 April 1986	Pedoman Penilaian Berkala/Tahunan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.	L L : 12 hal	
28	No.28 Tahun 1986 28 April 1986	Penggantian Sekretaris Team Pelaksanaan Pembangunan Pusat Prop. Tk.I Timor Timur		*
29	No.29 Tahun 1986 7 Mei 1986	Memperlakukan Keputusan Mendagri No.48 Tahun 1984 atas Komoditi Cokelat.	L L : 2 hal	
30	No.30 Tahun 1986	BATAL		*
31	No.31 Tahun 1986 15 Mei 1986	Bantuan Untuk Penyelesaian Pembangunan Tahap III Kampus Akademi Agraria dan Gedung Badan Diklat, Rehabilitasi Gedung Pemuda serta Pengadaan Alat-alat Komunikasi I.K.S		*
32	No.32 Tahun 1986 21 Mei 1986	Bantuan Biaya utk Keperluan Pembaharuan Politik.		*
33	No.33 Tahun 1986 21 Mei 1986	Pembentukan Team Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Bekas Tahanan Dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI Th.1986/1987.		
34	No.34 Tahun 1986 21 Mei 1986	Pembentukan Kelompok Pelaksana Adnistrasi Proyek Pengamanan Politik.		
35	No.35 Tahun 1986 21 Mei 1986	Pembentukan Kelompok Pelaksana Proyek Pembinaan Hansip Dan Wanra.		
36	No.36 Tahun 1986 21 Mei 1986	Pembentukan Kelompok Pelaksana Bagian Proyek Pembinaan Dan Pengawasan Bekas Tahanan Dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI.		
37	No.37 Tahun 1986 21 Mei 1986	Pembentukan Kelompok Pelaksana Proyek		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
38	No.38 Tahun 1986 21 Mei 1986	Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Proyek Pembinaan Masyarakat		
39	No.39 Tahun 1986 21 Mei 1986	Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Proyek Pemantapan Hubungan Lembaga Ditjen. Sospol dan Pembentukan Team Dokumentasi Hasil Rapat Kerja dan dg Pendapat Mendagri Sampai komponen Lingkungan DDN dg Komisi A. DPR RI.		
39A	No.39A Tahun 1986 21 Mei 1986	Program Kerja Departemen Dalam Negeri Th.1986/1987		*
40	No.40 Tahun 1986 26 Mei 1986	Pembentukan Tim Pelaksana Dan Staf Sekretariat Proyek Perencanaan Umum Dengan Bangda Tahun 1986/1987.		
41	No.41 Tahun 1986 26 Mei 1986	Pelayanan Kesehatan Cacat Veteran (Kepber Menkes dan Mendagri)	L L : 4 hal	
42	No.42 Tahun 1986 1 Juli 1986	Pemilihan Guru Teladan Th.1986 & Pembentukan Panitia Pemilihan Guru Teladan Th.' 86.		*
43	No.43 Tahun 1986 16 Juli 1986	Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Proyek Pendidikan Calon Tenaga Pelajar pada IIP.		*
44	No.44 Tahun 1986 16 Juli 1986	Pembentukan Tim/Panitia Penyelenggara-an Proyek Pembangunan IIP.		
44A	No.44A Tahun 1986 16 Juli 1986	Bantuan Biaya Untuk Keperluan Pembinaan Politik.		*
45	No.45 Tahun 1986 16 Juli 1986	Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Peran Serta Masyarakat.		
46	No.46 Tahun 1986 16 Juli 1986	Pengesahan Penjualan Rumah-rumah Dinas Gol III Milik Pemda Tk.I Kalsel Beserta Ganti Rugi Atas Tanah di Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru.		
47	No.47 Tahun 1986 24 Juli 1986	Pengesahan Penjualan Rumah-rumah Dinas Gol.II & III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Prop. Dati I Lampung		*
48	No.48 Tahun 1986 7 Agustus 1986	Pelaksanaan Pendataan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintahan Daerah/Wilayah	L L : 3 hal Lamp : 9 hal	
49	No.49 Tahun 1986 7 Agustus 1986	Penataran Guru Teladan Tingkat Nasional Th.1986		
50	No.50 Tahun 1986 15 Agustus 1986	Pembentukan Panitia Pembahasan DUP Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten Th.1986/1987		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
50A	No.50A Tahun 1986 15 Agustus 1986	Bantuan Biaya Untuk Keperluan Pembinaan Politik.		*
51	No.51 Tahun 1986 18 Agustus 1986	Kenaikan Pangkat Istimewa Dokter dan Paramedis Teladan di Puskesmas 1986		*
52	No.52 Tahun 1986	Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.		*
52A	No.52A Tahun 1986	Bantuan Biaya Untuk Keperluan Pembinaan Politik.		*
53	No.53 Tahun 1986 14 Oktober 1986	Uraian Tugas Sub Bagian, Pemeriksa, Seksi dan Sub Bidang di Lingkungan Depdagri.		*
54	No.54 Tahun 1986 15 Oktober 1986	Persetujuan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Induk Pembangunan Gedung PKK Prov. Dati I Kalteng No.38/ Proy. Pembangun Gedung PKK/86 Tgl. 1 Maret 1986.	L L : 4 hal	
55	No.55 Tahun 1986 22 Oktober 1986	Pengesahan Penjualan Rumah Gol III Beserta Ganti Rugi atas tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Dati I Bengkulu.	L L : 5 hal	
56	No.56 Tahun 1986 24 Oktober 1986	Pembentukan Tim panitia technical & cost Proposal (Tim Negoisasi) utk Pekerjaan Layanan jasa Konsultan Proyek sekretariat proyek manajemen unit program Inpres Penerangan Jalan Kabupaten.		
57	No.57 Tahun 1986 30 Oktober 1986	Pengesahan Penghapusan Bangunan Kantor Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang.	L L : 4 hal Lamp : 1 hal	
58	No.58 Tahun 1986 30 Oktober 1986	Pengesahan Tukar Menukar Tanah dg Bangunan Beserta Perlengkapannya dan Pelepasan Tanah Kavling Perumahan dg ganti Rugi Milik Pemerintah Kab.Dati II Sragen.	L L : 6 hal Lamp : 3 hal	
59	No.59 Tahun 1986 15 Nopember 1986 695/Kpts/KP.120/11/1986	Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.	L L : 12 hal Lamp : 1 hal	
60	No.60 Tahun 1986 25 Nopember 1986	Pedoman Organisasi & Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik DKI Jakarta.	L L : 11 hal Lamp : 1 hal	
60A	No.60A Tahun 1986 15 Nopember 1986	Penilai Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara.		
61	No.61 Tahun 1986 22 Desember 1986	Persetujuan dan Pengesahan Dewan Pimpinan, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Program Kerja Persetujuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERSAMI) untuk masa Bhakti 1986-1989.	L L : 3 hal Lamp : 1 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
62	No.62 Tahun 1986 22 Desember 1986	Bantuan iaya Untuk Keperluan Pembinaan Politik.		*
*	No.584-17 Th.1986	Ketentuan-ketentuan Mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian & Peraturan Gaji pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah.		Dicabut dg KMDN No.58 Th.1999
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 1986 9 Januari 1986	Pra Petunjuk Penyusunan APBD tahun Anggaran 1986/1987	L L : 4 hal	
2	No.2 Tahun 1986 13 Pebruari 1986	Peningkatan Pelaks. Keppres No.10 Th.1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dlm Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.		
3	No.3 Tahun 1986 27 Pebruari 1986	Bantuan Pegawai dan Perlengkapan Bagi Koperasi di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.		
4	No.4 Tahun 1986 27 Pebruari 1986	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan TA.1986/1987 di Lingkungan Depdagri (ttt. Sekjen)		
5	No.5 Tahun 1986 27 Pebruari 1986	Pelaksanaan proyek-proyek pembangunan TA.1986/1987 di Depdagri.		
6	No.6 Tahun 1986 28 Februari 1986	Pelaksanaan Pengosongan Tanah	L L : 2 hal	
7	No.7 Tahun 1986 28 Pebruari 1986	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan TA.1986/1987 di Lingkungan Depdagri (ttt. Itjen)		
8	No.8 Tahun 1986 26 Maret 1986	Penyelenggaraan Penataran P-4 di Wilayah Kab. Dati II dan Kodya Seluruh Indonesia.	L L : 3 hal Lamp : 6 hal	
9	No.9 Tahun 1986 9 April 1986	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan sarana kesehatan.	L L : 3 hal Lamp : 28 hal	
10	No.10 Tahun 1986 9 April 1986	Penyempurnaan Inmendagri No.27 Th.1986 j.o No. 18 Tahun 1986 ttg Petunjuk Pelaks. lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung SD.	L L : 3 hal Lamp : 24 hal	
11	No.11 Tahun 1986	KOSONG		
12	No.12 Tahun 1986 28 April 1986	Koordinasi, Pengawasan dan Pengamanan Pengadaan Pangan dalam Negeri.	L L : 3 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
13	No.13 Tahun 1986 28 April 1986	Pelaks. PP No.6 Th.1986 ttg Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Jambi & Kab. Dati II Batanghari.	L L : 4 hal	
14	No.14 Tahun 1986 28 April 1986	Pelaks. PP No.10/1986 ttg Perubahan Batas Wil.Kodya Dati II Binjai dan Kab. Dati II Deli Serdang	L L : 4 hal	
15	No.15 Tahun 1986 28 April 1986	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1986 ttg Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Tegal dan Kab. Dati II Tegal.	L L : 4 hal	
16	No.16 Tahun 1986 28 April 1986	Pelaks. PP No.15 Th.1986 ttg Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pematang Siantar dan Kabupaten Dati II Simalungun.	L L : 4 hal	
17	No.17 Tahun 1986 28 April 1986	Penyelenggaraan Proyek Penanganan Jalan dalam rangka Pembangunan Daerah Tingkat I dengan Bantuan Luar Negeri.	L L : 4 hal Lamp : 4 hal	
18	No.18 Tahun 1986 7 Agustus 1986	Penyempurnaan Inmendagri No.20 Th.1984 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Dati.I Bantuan Luar Negeri.		
19	No.19 Tahun 1986 9 September 1986	Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Dati I.		
20	No.20 Tahun 1986 17 September 1986	Penertiban Pungutan di Daerah untuk Peningkatan Ekspor non migas dan Peningkatan Penanaman Modal.	L L : 3 hal Lamp : 4 hal	
21	No.21 Tahun 1986 27 September 1986	Upaya Mendorong Ekspor Non Migas serta memperlancar Penanaman Modal Daerah.	L L : 3 hal	
22	No.22 Tahun 1986 12 September 1986	Tindak Lanjut atas Kebijakanaksanaan Pemerintah Mengenai Devaluasi	L L : 6 hal	
23	No.23 Tahun 1986 14 Oktober 1986	Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah.	L L : 4 hal	
24	No.24 Tahun 1986 20 Oktober 1986	Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Dati I dan Dati II	L L : 7 hal	
25	No.25 Tahun 1986 8 Nopember 1986	Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada Tanaman Padi	L L : 3 hal	
26	No.26 Tahun 1986	Kosong		
27	No.27 Tahun 1986 25 Nopember 1986	Pelaks. PP No.46 Th.1986 ttg Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Bengkulu, Kab. Dati II Bengkulu Utara dan Dati II Bengkulu Selatan.	L L : 4 hal	
28	No.28 Tahun 1986 25 Nopember 1986	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1986 ttg Pembentukan Kotib Klaten	L L : 3 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
29	No.29 Tahun 1986 25 Nopember 1986	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1986 ttg Pembentukan Kota Cilegon	L L : 3 hal	
30	No.30 Tahun 1986 25 Nopember 1986	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1986 ttg Pembentukan Kotib Metro	L L : 3 hal	
31	No.31 Tahun 1986 25 Nopember 1986	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.33 Th.1986 ttg Pembentukan Kotib Pariaman.	L L : 3 hal	
32	No.32 Tahun 1986 25 Nopember 1986	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1986 ttg Pembentukan Kotib Palopo	L L : 3 hal	
33	No.33 Tahun 1986 25 Nopember 1986	Pelaksanaan PP No.32 Tahun 1986 ttg Pembentukan Kotib. Lhokseumawe.	L L : 3 hal	
34	No.34 Tahun 1986 1 Desember 1986	Pelaks. KMDN No.7 Th.1986 ttg Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia.	L L : 4 hal Lamp : 11 hal	
35	No.35 Tahun 1986 20 Desember 1986	Koordinasi Pengawasan Pengamanan dasar gabah dan palawija.	L L : 3 hal	
<b>TAHUN 1987</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1987 5 Januari 1987	Penyerahan Prasarana Lingk. Utilitas Umum dan fasilitas Sosial Perumahan kpd Pemda.		Dicabut dg Permen No.9 Th.2009
2	No. 2 Tahun 1987 5 Oktober 1987	Pedoman Penyusunan Rencana Kota.		*
3	No. 3 Tahun 1987 16 Nopember 1987	Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.		*
4	No. 4 Tahun 1987 23 Desember 1987	Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka Waktu Terhadap Pemberlakuan Undang2.		*
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1987 3 Januari 1987	Pelimpahan Uang Yayasan Dana Landreform Kepada Bendaharawan Umum Departemen Dalam Negeri		*
2	No. 2 Tahun 1987 14 Januari 1987	Pejabat Penilai Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara		*
3	No. 3 Tahun 1987	KOSONG		*
4	68/MENKES/SKB/II/1987 21 Februari 1987 No. 4 Tahun 1987 21 Februari 1987	Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Mendagri Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti.	L L : 7 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
5	No. 5 Tahun 1987 21 Februari 1987	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Agraria Kotamadya Batam.	L L : 8 hal Lamp : 1 hal	
6	No. 6 Tahun 1987 24 Februari 1987	Perubahan Kepmendagri No.45 Th.1987 ttg Pembentukan Kelompok Kerja pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Daerah.	L L : 2 hal	
7	No. 7 Tahun 1987	KOSONG		*
8	No. 8 Tahun 1987 2 Maret 1987	Susunan Personalia Tim Peneliti Tanda-tanda Kehormatan Depdagri.	L L : 2 hal	
9	No. 9 Tahun 1987 26 Maret 1987	Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.28 Th.1984	L L : 2 hal	
10	No.10 Tahun 1987 24 Maret 1987	Pembentukan Team Pengarah Studi Pengembangan Pegawai dan Kelambagaan Perkotaan	L L : 3 hal Lamp : 1 hal	
11	No.11 Tahun 1987 4 Maret 1987	Team Perumusan Kebijaksanaan Pertahanan bagi Pembangunan Perumahan.	L L : 4 hal	
12	No.12 Tahun 1987 20 April 1987 0222a/K/1987 355/KMK.011/1987	Kepber Mendagri, Mendikbud dan Menkeu: ttg Alokasi Subsidi /bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri TA.1987/1988.	L L : 4 hal Lamp : 97 hal	
13	No.13 Tahun 1987 21 April 1987	Penetapan Pengurus Koprim Prajamukti I Kantor Pusat Depdagri Periode 1987-1989.		*
14	No.14 Tahun 1987 27 April 1987	Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkaderan Pembangunan Desa.	L L : 4 hal Lamp : 1 hal	
15	No.15 Tahun 1987 18 Mei 1987	Pembentukan dan Pengangkatan dari Keanggotaan Pengurus Penggerak PKK Pusat.		*
16	No.16 Tahun 1987 22 Mei 1987	Pembentukan Tim Pembina Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1987/1988.	L L : 3 hal Lamp : 2 hal	
17	No.17 Tahun 1987 22 Mei 1987	Pembentukan Tim Pengolah Data Inpres Bantuan Pembangunan Desa Th.1987/1988.		*
18	No.18 Tahun 1987 9 Juni 1987	Penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Manajemen Depdagri & Pemda.		Dicabut dg KMDN No.7 Th.1990
19	No.19 Tahun 1987 19 Juni 1987	Pembentukan Team Komputerisasi Depdagri.	L L : 5 hal Lamp : 1 hal	
20	No.20 Tahun 1987 26 Juni 1987	Program Kerja Departemen Dalam Negeri Th.1987/1988.		*
21	No.21 Tahun 1987 29 Juni 1987	Pemilihan Guru Teladan 1987 dan Pembentukan Panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan Th.1987 (SKB Mendikbud, Mendagri dan Menpan).		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
22	No.22 Tahun 1987 29 Juni 1987	Penghapusan Balai Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Masyarakat Desa & Pengalihan ke Balai Pengkaderan Pembangunan Desa serta Dit. Pembangunan Desa.	L L : 3 hal	
23	No.23 Tahun 1987 4 Juni 1987	Pemugaran Gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Pasar Minggu Jakarta Selatan.	L L : 2 hal	
24	No.24 Tahun 1987 17 Juli 1987	Kepber Mendagri dan Menkeu ttg Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Jenis Objek Persawahan, peladangan, ndustri/Jasa/ Dagang, Perumahan, Peternakan dan Perikanan tiap Dati II TA.86/87 dan 87/88.	L L : 3 hal	Diubah dg KMDN No.5 Th.1988.
25	No.25 Tahun 1987 20 Juli 1987	Biaya Pembinaan Politik.		*
26	No.26 Tahun 1987 20 Juli 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Sayit Abas.	L L : 2 hal	
27	No.27 Tahun 1987 20 Juli 1987	Pembebasan Utk Sementara Waktu dari jabatan organik an. La Ode Moh.Saleh,SH	L L : 2 hal	
28	No.28 Tahun 1987 20 Juli 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Drs. Suharjono	L L : 2 hal	
29	No.29 Tahun 1987 20 Juli 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Drs. Al. Solisty	L L : 2 hal	
30	No.30 Tahun 1987 20 Juli 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Dra.Ny.Sudiantini	L L : 2 hal	
31	No.31 Tahun 1987 20 Juli 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Ir.H.Abdullah Puteh.	L L : 2 hal	
32	No.32 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Drs.I Wayan Dhana	L L : 2 hal	
33	No.33 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. J.G.Wowa, SH	L L : 2 hal	
34	No.34 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Clementino Dos Reis Amaral.	L L : 2 hal	
35	No.35 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Drs.Hulatina Pardede.	L L : 2 hal	
36	No.36 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Drs.Johny Alwi Banya	L L : 2 hal	
37	No.37 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jab. Organik an. Uмба Horambun Kopida.	L L : 2 hal	
38	No.38 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Ny.Petronella M. Inacia.	L L : 2 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
39	No.39 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Drs.Moch.Suyadjadi	L L : 2 hal	
40	No.40 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Drs.Sudarmanto	L L : 2 hal	
41	No.41 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Achmad Dawali,BA	L L : 2 hal	
42	No.42 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.H.Danlan Am Syah	L L : 2 hal	
43	No.43 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.H.Ahmat Nazar	L L : 2 hal	
44	No.44 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan utk sementara waktu dari jabatan Organik an. Drs.H.Boman Pasaribu,SH	L L : 2 hal	
45	No.45 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan utk Sementara Waktu dari Jabatan Organik an.Drs.H.Muhammad Umar	L L : 2 hal	
46	No.46 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Drs.Soerjadi	L L : 2 hal	
47	No.47 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.H.Kandumai	L L : 2 hal	
48	No.48 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Ec. Soekotjo Sardi	L L : 2 hal	
49	No.49 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Nanang Sudjana SmHk	L L : 2 hal	
50	No.50 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. H.Abang Koena Somawidjaya	L L : 2 hal	
51	No.51 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Drs.H.Muchsin Riyadi.	L L : 2 hal	
52	No.52 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Ir.KPH.Probokusumo	L L : 2 hal	
53	No.53 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Drs.H. Putrawijaya	L L : 2 hal	
54	No.54 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Ibrahim Salam,BA	L L : 2 hal	
55	No.55 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Drs.Hm.Dani Nampi	L L : 2 hal	
56	No.56 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Drs. H.Hasanudin	L L : 2 hal	
57	No.57 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Drs.H.Ismail Suko	L L : 2 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
58	No.58 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Drs.Ardi Partadinata	L L : 2 hal	
59	No.59 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Ir Umba Hehagkunda	L L : 2 hal	
60	No.60 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Fransiskus Skena	L L : 2 hal	
61	No.61 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an. Mohamad Zainudin Wora Sanaha	L L : 2 hal	
62	No.62 Tahun 1987 20 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik an.Drs.H.M. Syah Zukiran	L L : 2 hal	
63	No. 63 Tahun 1987 23 Juli 1987	Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan kepentingan Pelabuhan Panjang (Kep Ber Mendagri & Menhub)	LL : 6 hal	
64	No. 64 Tahun 1987 1 Agustus 1987	Pembebasan Untuk Sementara Waktu Dari Jabatan Organik PNS di lingkungan DDN	L L : 2 hal	
65	No. 65 Tahun 1987 1 Agustus 1987	Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	L L : 7 hal Lamp : 1 hal	
66	No. 66 Tahun 1987 1 Agustus 1987	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kota di DKI Jakarta	L L : 17 hal Lamp : 1 hal	
67	No. 67 Tahun 1987 1 Agustus 1987	Bantuan Biaya untuk kepala-kepala Suku Adat di Irian Jaya		*
68	No. 68 Tahun 1987 1 Agustus 1987	Bantuan Program Pembangunan Dati I dan Dati II		*
69	No. 69 Tahun 1987 1 Agustus 1987	Bantuan Biaya Siswa Alumni .....		*
70	No. 70 Tahun 1987 2 Agustus 1987	Bantuan Biaya Kunjungan Menteri Australia.		*
71	No. 71 Tahun 1987 2 Agustus 1987	Bantuan Dana Untuk Pembinaan Politik dan Luar Negeri.		*
72	No. 72 Tahun 1987 13 Agustus 1987	Permohonan Bantuan Untuk Merehabilitasi Kampus IIP.		*
73	No. 73 Tahun 1987 15 Agustus 1987	Keputusan Bersama Mendagri, Mendikbud Menlu, Menag, dan MENPAN ttg Penetapan Guru Teladan 1987.	L L : 4 hal Lamp : 26 hal	
74	No. 74 Tahun 1987 14 Agustus 1987	Bantuan Biaya Cenderamata Bagi Para Teladan.		*
75	No. 75 Tahun 1987 14 Agustus 1987	Bantuan Untuk Kepala Suku Kabupaten Wamena Irian Jaya.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
76	No. 76 Tahun 1987 15 Agustus 1987	Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Salinan dan Petikan Surat-surat Keputusan Kepegawaian.		*
77	No. 77 Tahun 1987 15 Agustus 1987	Biaya-biaya Keperluan Bantuan Mendagri.		*
78	No. 78 Tahun 1987 15 Agustus 1987	Pembelian Cinderamata.		*
79	No. 79 Tahun 1987 15 Agustus 1987	Kepber Menkes, Mendagri dan Menpan ttg Kenaikan Pangkat Istimewa Dokter dan Paramedis Teladan di Puskesmas Th.1987.		*
80	No. 80 Tahun 1987 15 Agustus 1987	Bantuan Dana Untuk Seminar <i>Menengah Keatas Agung Kajarta Wacana Bhakti</i> .		*
81	No. 81 Tahun 1987 7 September 1987	Pengangkatan Anggota Presidium Dharma Wanita.		*
82	No. 82 Tahun 1987 7 September 1987	Bantuan Dana untuk Pembinaan Politik.		*
83	No. 83 Tahun 1987 7 September 1987	Bantuan Biaya Pekan Konsultasi Nasional Lembaga Da'wah.		*
84	No. 84 Tahun 1987 7 September 1987	Bantuan Untuk Pembelian Tandamata Komisi II DPRRI dan Pemuda-Pemuda nya Kembali ke Jayapura dll.		*
85	No. 85 Tahun 1987 21 September 1987	Perubahan Sistem Pendidikan Pada Akademi Agraria	L L : 3 hal	
86	No. 86 Tahun 1987 17 September 1987	Kep.Ber Mendagri, Menkes & Menpan ttg Penempatan & Penugasan Tenaga Dokter pada Unit Pelayanan Kesehatan Daerah.	L L : 4 hal	
87	No. 87 Tahun 1987 28 September 1987	Keputusan Bersama Mendagri, Menkes ttg Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.	L L : 4 hal	
88	No. 88 Tahun 1987 28 September 1987	Pemberian Bantuan-bantuan		*
89	No. 89 Tahun 1987 6 Oktober 1987	Pembentukan Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Depdagri.	L L : 2 hal	
90	No. 90 Tahun 1987 12 Oktober 1987	Pengelolaan Blanko Kartu Tanda Penduduk Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah.	L L : 4 hal Lamp : 11 hal	
91	No. 91 Tahun 1987 14 Oktober 1987	Penyediaan Dana Operasional Untuk Para Sekretaris Komponen di lingk. Depdagri.	L L : 2 hal	
92	No. 92 Tahun 1987 14 Oktober 1987	Bantuan Biaya Untuk Pembelian Alat Pertukangan	L L : 2 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
93	No. 93 Tahun 1987 14 Oktober 1987	Bantuan Dana Untuk SPP Mahasiswa IIP	L L : 2 hal	
94	No. 94 Tahun 1987 14 Oktober 1987	Bantuan Biaya untuk Pembinaan Politik	L L : 3 hal	
95	No. 95 Tahun 1987 14 Oktober 1987	Bantuan Biaya Konsultasi Nasional Bappeda Tk.I seluruh Indonesia		*
96	No. 96 Tahun 1987 14 Oktober 1987	Penyediaan Bantuan Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Mendagri		*
97	No. 97 Tahun 1987 14 Oktober 1987	Bantuan Biaya Pencetakan		*
98	No. 98 Tahun 1987 14 Oktober 1987	Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan		*
99-101		KOSONG		* Sie Gaji
102	No. 102 Tahun 1987 14 Oktober 1987	Bantuan untuk Biaya Perjalanan		*
103	No. 103 Tahun 1987 19 Oktober 1987	Bantuan untuk Biaya Penyusunan Sejarah dan Museum		*
104		KOSONG		
105	No. 105 Tahun 1987 19 Oktober 1987	Bantuan Uang Kompensasi an. Drs. Galib Lasahida	L L : 2 hal	
106	No. 106 Tahun 1987 19 Oktober 1987	Bantuan Uang Kompensasi an.Drs.Hasan Basri Darmawidjaja BcHk.	L L : 2 hal	
107	No. 107 Tahun 1987 27 Oktober 1987	Penyempurnaan Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar.	L L : 3 hal	
108	No. 108 Tahun 1987 5 Nopember 1987	Biaya Operasional		*
109	No. 109 Tahun 1987 16 Nopember 1987	Pembelian Bantuan Kepada Pendamping Tim Kesenian ke Negeri Belanda	L L : 2 hal	
110	No. 110 Tahun 1987 16 Nopember 1987	Bantuan Untuk Pona Suku Adat Wamena		*
111	No. 111 Tahun 1987 16 Nopember 1987	Bantuan Biaya Operasional Pimpinan		*
112	No. 112 Tahun 1987 16 Nopember 1987	Bantuan Tambahan Biaya Tugas Belajar		*
113	No. 113 Tahun 1987 16 Nopember 1987	Bantuan Dana Untuk Yayasan Cendrawasih		*
114	No. 114 Tahun 1987 16 Nopember 1987	Bantuan Biaya untuk Pengembalian Pelintas Batas di PNG		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
115	No. 115 Tahun 1987 16 Nopember 1987	Bantuan Biaya Untuk Irjen		*
116	No. 116 Tahun 1987	KOSONG		*
117	No. 117 Tahun 1987 26 Nopember 1987	Pembentukan Panitia Rapat Kerja Gubernur Kepala Dati I Seluruh Indonesia di Jakarta	L L : 2 hal Lamp : 9 hal	
118	No. 118 Tahun 1987 26 Nopember 1987	Pedoman Penilaian atas Hasil Karya Prop. Dati I dlm Pelaks. Pelita IV bagi Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha .	L L : 2 hal Lamp : 9 hal	
119	No. 119 Tahun 1987 9 Desember 1987	Kelengkapan Susunan Keanggotaan Organizing Committee		*
120	No. 120 Tahun 1987 10 Desember 1987	Organisasi Kemasyarakatan Pelajar Islam Indonesia	L L : 2 hal	
121	No. 121 Tahun 1987 10 Desember 1987	Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Marhaenis		*
122	No. 122 Tahun 1987 14 Desember 1987	Bantuan Biaya Langganan Surat Kabar/Majalah	L L : 2 hal	
123	No. 123 Tahun 1987 14 Desember 1987	Bantuan Dana Untuk Pengesahan Peraturan Daerah	L L : 2 hal	
124	No. 124 Tahun 1987 15 Desember 1987	Pengendalian Terpadu Pembinaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		*
125	No. 125 Tahun 1987 19 Desember 1987	Bantuan Biaya Untuk Pemeriksaan Khusus		*
126	No. 126 Tahun 1987 19 Desember 1987	Bantuan Dana Untuk Menyambut Hari Raya Natal	L L : 2 hal	
127	No. 127 Tahun 1987 19 Desember 1987	Bantuan Baiaya untuk Pembinaan politik Dalam Negeri	L L : 3 hal	
	128 - 157	TIDAK TERPAKAI		
158	No. 158 Tahun 1987 21 Desember 1987	Bantuan Biaya untuk Pembinaan politik Dalam Negeri	L L : 3 hal	
159	No. 159 Tahun 1987 24 Desember 1987	Bantuan Biaya untuk Keluar Negeri.		*
160	No. 160 Tahun 1987 29 Desember 1987	Bantuan Biaya Untuk Evaluasi Ruang Sidang Banda Kekurangan Biaya Konsultasi Nasional Bappeda		*
161	No. 161 Tahun 1987 29 Desember 1987	Bantuan Biaya untuk Pembangunan Rumah .....		*
162	No. 162 Tahun 1987 29 Desember 1987	Bantuan Dana Bencana Alam di NTT		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
163	No. 163 Tahun 1987 30 Desember 1987	KOSONG		* Sie Gaji
164	No. 164 Tahun 1987 30 Desember 1987	Bantuan Untuk PWRI Komplek Depdagri Pondok Gede		*
165	No. 165 Tahun 1987 30 Desember 1987	Bantuan Untuk Tim Pemerintah Desa		*
*	No.974.545-1504 Th.1987	Pedoman Tarif Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Bahan Galian Golongan C.		Dicabut dg KMDN No.73 Th.1992
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1987 16 Januari 1987	Pra Petunjuk Penyusunan APBD Th.1987/1988.		*
2	No. 2 Tahun 1987 25 Pebruari 1987	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Th.1987/1988 Kaltim.		*
3	No. 3 Tahun 1987 25 Pebruari 1987	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Th.1987/1988 Yogyakarta.		*
4	No. 4 Tahun 1987 25 Pebruari 1987	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Th.1987/1988 NTT.		*
5	No. 5 Tahun 1987 25 Pebruari 1987	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek- proyek Pembangunan TA.1987/1988 di lingkungan Depdagri (Sulawesi Tengah)		*
6	No. 6 Tahun 1987 25 Pebruari 1987	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Th.1987/1988 Irja.		*
7	No. 7 Tahun 1987 5 Maret 1987	Peningkatan Kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal.	L L : 4 hal	*
8	No. 8 Tahun 1987 10 Maret 1987	Usaha Peningkatan Produksi Pertanian.	L L : 4 hal	*
9	No. 9 Tahun 1987 21 Maret 1987	Penyelenggaraan Penataran P-4 di Wilayah Kabupaten Dati II Kotamadya Dati II dan Kotamadya Seluruh Indonesia		*
9A	No. 9A Tahun 1987 1 Mei 1987	Petunjuk Operasional Kegiatan Proyek Pembangunan sarana Olah Raga pada Akademi Agraria di Yogyakarta.		*
10	No.10 Tahun 1987 8 Mei 1987	Penyempurnaan Instruksi Mendagri No.10 Tahun 1986 ttg Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar.	L L : 3 hal Lamp : 26 hal	*
11	No.11 Tahun 1987 8 Mei 1987	Penyusunan Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Daerah.	L L : 3 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
12	No.12 Tahun 1987 25 Mei 1987	Petunjuk Operasional Kegiatan Proyek Pembangunan Perkantoran Depdagri di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan Tahun 1987/1988 dengan Dana Jasa Giro Ex Yayasan Dana Landreform.	L L : 2 hal Lamp : 8 hal	
13	No.13 Tahun 1987 29 Juni 1987	Pelaksanaan Keputusan Mendagri No. 22 Tahun 1987 ttg Organisasi dan Tata Kerja Balai pengkaderan Pembangunan Desa.	L L : 3 hal	
14	No.14 Tahun 1987 6 Juli 1987	Upaya Khusus Peningkatan Produksi Gula. (Instruksi Bersama Mentan dan Mendagri)	-	
14A	No.14A Tahun 1987 6 Juli 1987	Petunjuk Operasional kpd Proyek Pemugaran Gedung Pembinaan PKK.	-	
15	No.15 Tahun 1987 9 Juli 1987	Pelaksanaan Program-program Jangka Pendek Mengakhiri Repelita IV Depdagri .	L L : 30 hal	
15A	No.15A Tahun 1987 15 Juli 1987	Petunjuk Operasional Kegiatan Rehabilitasi Wisma pada Diklat Wilayah III Yogya.	L L : 30 hal	
16	No.16 Tahun 1987 19 Agustus 1987	Kader Pembangunan Desa	L L : 3 hal Lamp : 7 hal	
17	No.17 Tahun 1987 1 September 1987	Pelaksanaan Bulan Bhakti Agraria	L L : 2 hal Lamp : 1 hal	
18	No.18 Tahun 1987 7 September 1987	Pelaksanaan PP No.15 Th.1987 ttg Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Malang dan Kab. Dati II Malang.	L L : 4 hal	
19	No.19 Tahun 1987 7 September 1987	Pelaksanaan PP No.16 Th.1987 ttg Bandung dengan Kabupaten Dati II Bandung.	L L : 5 hal	
20	No.20 Tahun 1987 16 September 1987	Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Lebih Lanjut Kepmendagri No.22/1986 ttg Organisasi dan Tata Kerja Depdagri.	L L : 3 hal	
21	No.21 Tahun 1987 5 Oktober 1987	Pendataan Anak Usia 7-12 Tahun.	L L : 4 hal Lamp : 4 hal	
22	No.22 Tahun 1987 5 Oktober 1987	Pelaksanaan PP No. 19/1987 ttg Perubahan Batas Wilayah Kota madya Dati II Tanjung Balai dan Kabupaten Dati II Asahan.	L L : 4 hal	
23	No.23 Tahun 1987 15 Oktober 1987	Pelaksanaan PP No.19 Th.1987 ttg Peraturan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekan Baru dan Kab.Dati II Kampar.	L L : 5 hal	
24	No.24 Tahun 1987 31 Oktober 1987	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No. 5 Tahun 1987 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kantor Agraria Kotamadya Batam.	L L : 5 hal	
25	No.25 Tahun 1987 19 Nopember 1987	Pedoman Penertiban Penambangan Emas tanpa izin di beberapa Daerah Indonesia.	L L : 3 hal Lamp : 4 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
26	No.26 Tahun 1987 27 Nopember 1987	Penetapan Batas Wil. Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan Kab. Dati II Kutai dan Kab. Dati II Pasir.	L L : 5 hal	
27	No.27 Tahun 1987 23 Desember 1987	Penyederhanaan Perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata.	L L : 3 hal	
*	No.03/Inst/KB.4 6 Juli 1987	Keputusan Bersama Mendagri dan Mentan ttg Upaya Khusus Peningkatan Produksi Gula	L L : 4 hal Lamp : 7 hal	
*	No.972.556-463 1 Juni 1987	Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Pengembangan & Pemeliharaan Obyek Pariwisata Daerah.	L L : 3 hal Lamp : 22 hal	
43	No.903-035 1 Januari 1987	Pra Petunjuk Penyusunan APBD TA.1988/1989.	L L :10 hal	
<b>TAHUN 1988</b>				
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1988 7 Januari 1988	Tata Cara Pengangkatan Widyaiswara di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 5 hal	
2-3		KOSONG		
4	No. 4 Tahun 1988 7 Januari 1988	Bantuan Biaya Untuk Pembelian Mesin Tik IBM Biro Kepegawaian Depdagri.		*
5	No. 5 Tahun 1988 15 Januari 1988	Ralat atas Lampiran Keputusan Bersama Menkeu dan Mendagri No.437/KMK.04/ 1987 dan No. 24 Th.1987 tgl. 14 Juli 1987.		*
5A	No. 5A Tahun 1988 20 Februari 1988	Pemberian Kuasa Kepada Pejabat-pejabat di Lingk. Sekretariat Jenderal Depdagri untuk & atas Nama Sekjen. menanda-tangani Surat Keputusan, Salinan & Petikan Surat Keputusan Mutasi di Bidang Kepegawaian.	L L : 3 hal Lamp : 2 hal	Dicabut dg Kepmen No.14 Th.2000
6	No. 6 Tahun 1988 22 Februari 1988	Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Depdagri.	L L : 6 hal	Dicabut dg KMDN No.4 Th.2002
7	No. 7 Tahun 1988 1 Maret 1988	Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota DPRD Tk.I dan Anggota DPRD Tk.II yang Berhenti Antar Waktu .	L L : 13 hal Lamp : 4 hal	Dicabut dg KMDN No.36 Th.1992
8	No. 8 Tahun 1988 1 Maret 1988	Pedoman Teknis Tata Cara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bagi Proyek Proyek PMA dan PMDN.	L L : 6 hal Lamp : 1 hal	Dicabut dg KMDN No.29 Th.1992
9	No. 9 Tahun 1988 1 Maret 1988	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum.	L L : 6 hal Lamp : 6 hal	
10	No.10 Tahun 1988 1 Maret 1988	Petujuk Pelaksanaan PP No.7 Th.1987 ttg Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kpd Daerah.	L L : 6 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
11	No.11 Tahun 1988 29 Februari 1988	Pola Tarif Rawat Jalan Tingkat Pertama & Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas & Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti.	L L : 8 hal	
12	No.12 Tahun 1988 12 Maret 1988	Pembentukan Tim Evaluasi Pilot Proyek Pemisahan Jabatan Ketua LMD dan Ketua Umum LKMD dari Jabatan Kepala Desa / Kepala Kelurahan Tingkat Pusat.	L L : 2 hal Lamp : 2 hal	
13	No.13 Tahun 1988 14 Maret 1988	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kab./Kotamadya Tipe C Menjadi Kantor Catatan Sipil Kab./Kotamadya Tipe B.	L L : 2 hal Lamp : 2 hal	
14	No.14 Tahun 1988 14 Maret 1988	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.1 Th.1988 ttg Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.		*
15		BATAL		*
16	No.16 Tahun 1988 8 April 1988	Peresmian Anggota Presidium Dharma Wanita Masa Bhakti 1988 - 1993.		*
17	No.17 Tahun 1988 8 April 1988	Peresmian Pimpinan Presidium Dharma Wanita Masa Bhakti 1988 - 1993.		*
18	No.18 Tahun 1988 5 Mei 1988	Persetujuan Proyek Cargo Terminal dan Pergudangan di Kotamadya Dati II Ujung Pandang Prop. Dati I Sulsel sebagai Proyek Tahun Jamak.		*
19	No.19 Tahun 1988 26 Mei 1988	Sistem Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah & Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi & Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Dati II.	L L : 3 hal Lamp : 4 hal	
20	No.20 Tahun 1988 10 Juni 1988	Standarisasi Administrasi pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan	L L : 4 hal	
21	No.21 Tahun 1988 10 Juni 1988	Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan.	L L : 7 hal	
22	No.22 Tahun 1988 10 Juni 1988	Alokasi Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri TA. 1988/1989.		*
23	No.23 Tahun 1988 20 Juni 1988	Tata cara Pengadaan Barang & Jasa dlm Lingk. Depdagri dan Pemeritah Daerah.	L L : 11 hal Lamp : 2 hal	
24	No.24 Tahun 1988 20 Juni 1988	Pembentukan BP7 Daerah Tingkat II Baucau, Ermera dan Bobonaro di Dati I Timor Timur.		Dicabut dg KMDN No.42 Th.1999
25	No.25 Tahun 1988 29 Juni 1988	Sistem Kode Pos Indonesia (Kep. Bersama dg Menparpostel)	L L : 4 hal Lamp : 1 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
26	No.26 Tahun 1988 30 Juni 1988	Program Kerja Depdagri Th 1988/1989.		*
27	No.27 Tahun 1988 11 Juli 1988	Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Ikatan Dinas dan Tugas Belajar pada Akademi Agraria.	L L : 7 hal	
28	No.28 Tahun 1988 23 Juli 1988	Pemilihan Guru Teladan Tahun 1988 dan Pembentukan Panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan Tahun 1988.		*
29	No.29 Tahun 1988 23 Juli 1988	Pembentukan Organisasi & Tatakerja Proyek Managemen Unit Program Inpres Penunjang Jalan Kabupaten Berbantuan Luar Negeri.	L L : 7 hal	
30	No.30 Tahun 1988 30 Juli 1988	Pengesahan Anggaran Dasar Dharma Wanita.		*
31	No.31 Tahun 1988 1 Agustus 1988	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Jateng No.9 Th.1988 ttg Pembentukan SOTK Dinas Pertimbangan Prop. Dati I Jateng.	L L : 10 hal	
32	No.32 Tahun 1988 1 Agustus 1988	Pengesahan Perda Prov. Dati I Jawa Tengah No.4 Th.1988 ttg Pembentukan SOTK Cab. Dinas Perikanan Prov. Dati I Jawa Tengah.	L L : 3 hal	
33	No.33 Tahun 1988 1 Agustus 1988	Pengesahan Perda Prop.Dati I Jateng No.5 Th.1988 ttg Perubahan I Perda Prop. Dati I Jateng No.17/1981 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Prop. Dati I Jateng.		*
34	No.34 Tahun 1988 1 Agustus 1988	Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Negara Berdasarkan PP No.46 Th.1971.		*
35		KOSONG		
36	No.36 Tahun 1988 15 Agustus 1988	Penetapan Guru Teladan Tahun 1988.		*
37	No.37 Tahun 1988 19 Agustus 1988	Kenaikan Pangkat Istimewa Dokter dan paramedis Teladan di Puskesmas Th.1988.		*
38	No.38 Tahun 1988 22 Agustus 1988	Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.	L L : 2 hal	
39	No.39 Tahun 1988 15 September 1988	Susunan Anggota Steering Committee dan Organizing Committee The Workshop on Kampung Improvement and Integrated New Settlement Development - ESCAP di Surabaya dan Jakarta Th.1988.		*
40	No.40 Tahun 1988 26 September 1988	Kriteria Penilaian dlm Rangka Pemberian tanda kehormatan Prarasamya Purnakarya Nugraha Pelita IV Tingkat Depdagri.	L L : 2 hal Lamp : 8 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
41	No.41 Tahun 1988 26 September 1988	Penyelenggaraan Wisuda Terpusat Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan Akademi Agraria Jakarta.	L L : 2 hal	
42	No.42 Tahun 1988 26 September 1988	Pembentukan Wil. Kerja Pembantu Bupati Wajo, Pembantu Bupati Tana Toraja, Pembantu Bupati Enrekang dan Pembantu Bupati Pangkepene dan Kepulauan dlm Wilayah Prop. Dati I Sulsel.		*
43	No.43 Tahun 1988 15 September 1988	Batas-batas Daerah Lingk. Kerja Daerah Lingk. Kepentingan Pelabuhan Jambi, Muara Sabak, Kuala Tungkal dan Talang Duku.		*
44	No.44 Tahun 1988 15 September 1988	Pembentukan Wilayah-Wilayah Kerja Pembantu Bupati Aceh Timur dalam Wilayah Prop. D.I. Aceh.		*
45	No.45 Tahun 1988 6 Oktober 1988	Pendidikan Pengetahuan Dasar Kemiliteran bagi calon Mahasiswa IIP.	L L : 2 hal	
46	No.46 Tahun 1988 10 Oktober 1988	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pontianak.		*
47	No.47 Tahun 1988 24 Oktober 1988	Penggunaan Sarana Pertambangan dan Energi dan Sarana Kehutanan.	L L : 5 hal	
48	No.48 Tahun 1988 24 Oktober 1988	Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.	L L : 7 hal	
49	No.49 Tahun 1988 26 Oktober 1988	Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II.	L L : 3 hal Lamp : 2 hal	
50	No.50 Tahun 1988 12 Nopember 1988	Penyertaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan APDN Terpusat.	L L : 2 hal	
51	No.51 Tahun 1988 17 Nopember 1988	Pengesahan Perda Dati I NTT No.3/1988 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I NTT No.14/1981 ttg Pembentukan Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Dati I NTT.		*
52	No.52 Tahun 1988 17 Nopember 1988	Pengesahan Perda Dati I NTT No.4 Th.1988 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I NTT No.5 Th.1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kehutanan Prop. Dati I NTT.		*
53	No.53 Tahun 1988 17 Nopember 1988	Pengesahan Perda Dati I NTT No.2 Th.1988 ttg Perubahan Pertama Perda No.13 Th.1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pariwisata Prop. Dati I NTT.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
54	No.54 Tahun 1988 17 Nopember 1988	Pengesahan Perda Dati I NTT No.5 Th.1988 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I NTT No.6 Th.1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan Prop. Dati I NTT.		*
55	No.55 Tahun 1988 17 Nopember 1988	Pengesahan Perda Daerah Prop. Dati I Sumsel No.11 Th.1988 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi & Tata Kerja Cabang Dinas Pertambangan Prop. Dati I Sumsel.		*
56	No.56 Tahun 1988 19 Nopember 1988	Pembentukan Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten Jayapura, Baik Numfor, Manokwari, Merauke, Paniai dan Sorong di Wilayah Prop. Dati I Irian Jaya.	L L : 3 hal	
57	No.57 Tahun 1988 21 Nopember 1988	Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Timtim No.5 Th.1987 ttg Pembentukan SOTK Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Timor Timur.	L L : 3 hal	Tidak berlaku lagi
58	No.58 Tahun 1988 26 Nopember 1988	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Cirebon.		*
59	No.59 Tahun 1988 26 Nopember 1988	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 ttg Pedoman Penyusunan Rencana Kota.	L L : 36 hal	
60	No.60 Tahun 1988 1 Desember 1988	Penunjukan Anggota Panitia, Personalia Sekretariat dan Pemberian Honorarium Panitia Repatriasi Suku Maluku.	L L : 36 hal	*
61	No.61 Tahun 1988 7 Desember 1988	Pengesahan Perda Prop.Dati I Sumut No.4 Th.1988 ttg Perubahan Kedua Perda Prop. Dati I Sumut No.1 Th.1981 ttg Susunan Organisasi & tatakerja Setwilda Tk.I Sumut dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Sumut.	L L : 36 hal	*
62	No.62 Tahun 1988 10 Desember 1988	Stempel, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.		*
88	No.88 Tahun 1988	Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Aparatur Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.		Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1988 21 Januari 1988	Pembentukan Panitia Tk. Prop. Dati I utk Penelitian Pemberian tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Kabupaten/ Walikota/Dati II.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
2	No. 2 Tahun 1988 26 Februari 1988	Pedoman Koordinasi Terpadu dlm pelaks. Pembinaan Usaha Kesejahteraan Anak di Daerah.	L L : 2 hal	
3	No. 3 Tahun 1988 1 Maret 1988	Petunjuk Pelaksanaan Lebih lanjut Bantuan Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung SD.		*
4	No. 4 Tahun 1988 1 Maret 1988	Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.	L L : 3 hal Lamp : 25 hal	
5	No. 5 Tahun 1988 29 Pebruari 1988	Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peredaran Kupon Sumbangan.		*
6	No. 6 Tahun 1988 7 Maret 1988	Petunjuk Operasional Pelaksana Proyek-proyek Pembangunan TA.1988/1989 di Lingkungan Depdagri.		*
7	No. 7 Tahun 1988 8 Maret 1988	Petunjuk Operasional Pelaksana Proyek-proyek Pembangunan TA.1988/1989 di Lingkungan Depdagri.		*
8	No. 8 Tahun 1988 22 Maret 1988	Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perumahan Daerah Tingkat II.	L L : 4 hal Lamp : 1 hal	
9	No. 9 Tahun 1988 2 April 1988	Penyelenggaraan Penataran P4 di Daerah Seluruh Indonesia.		*
10	No.10 Tahun 1988 23 Mei 1988	Pelaksanaan KMDN No.19 Th.1988 ttg Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kab./Kotamadya Dati II.	L L : 3 hal Lamp : 3 hal	
11	No.11 Tahun 1988 15 Agustus 1988	Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak Pribadi Dikaitkan dalam Syarat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Struktural.	L L : 2 hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.2004
12	No.12 Tahun 1988 1 September 1988	Pengamanan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 1990.	L L : 2 hal	
13	No.13 Tahun 1988 16 September 1988	Pelaksanaan Kep. Mendagri No.131 Th.1978 ttg Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembantu Gubernur.	L L : 3 hal Lamp : 6 hal	
13A	No.13A Tahun 1988 1 Oktober 1988	Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah satu atap dalam Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).	L L : 4 hal Lamp : 7 hal	
14	No.14 Tahun 1988 6 Oktober 1988	Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.	L L : 3 hal Lamp : 6 hal	Dicabut dg Permen No.1 Th.2007

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
15	No.15 Tahun 1988 6 Oktober 1988	Pedoman Penyediaan Tanah Areal Hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan untuk Pembangunan.	L L : 5 hal	
16	No.16 Tahun 1988 19 Oktober 1988	Pedoman penyediaan tanah areal hutan tata Guna Hutan Kesepakatan utk pembangunan.		
17	No.17 Tahun 1988 14 Nopember 1988	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	L L : 2 hal Lamp : 4 hal	
18	No.18 Tahun 1988 14 Nopember 1988	Penyuluhan/Penerapan Hukum Terpadu Program Jaksas Masuk Desa (JMD) dg wadah Lembaga Ketahanan Masy. Desa (LKMD)	L L : 5 hal	
19	No.19 Tahun 1988 5 Desember 1988	Pengawasan Terhadap Pertunjukan Artis Hiburan Asing di Daerah	L L : 4 hal	
20	No.20 Tahun 1988 15 Desember 1988	Petunjuk Pelaks. KMDN No.62 Th.1988 ttg Stempel, Kop Naskah Dinas & Papan Nama Instansi di Lingk. Pemda Khusus Ibukota.		*
21	No.21 Tahun 1988 15 Desember 1988	Petunjuk Pelaks. Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Perpustakaan Umum.	L L : 4 hal Lamp : 4 hal	
22	No.22 Tahun 1988	BATAL		
23	No.23 Tahun 1988 30 Desember 1988	Pengawasan thdp penyelenggaraan peredaran Bukti Sumbangan Sosial Berhadiah.	L L : 4 hal Lamp : 4 hal	
-	No.411.24-059	Pekan Orientasi LMD	L L : - hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
-	No.140-233 Th.1988	Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 5 Th.1979	L L : - hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
-	No.411.6-693	Pemantapan Fungsi dan Peningkatan Peranan LMD	L L : - hal	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
-	No.474.1-311 5 April 1988	Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran.	L L : 3 hal	
<b>TAHUN 1989</b>				
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1989 23 Januari 1989	Penyaluran Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan/ Masya.		*
2	No. 2 Tahun 1989 14 Februari 1989	Pengesahan Perda Prov. Dati I Sulut No.9 Th.1988 ttg Pembentukan SOTK Dinas Pertambangan Propinsi Dati I Sulut.		*
3	No. 3 Tahun 1989 6 Maret 1989	Penyusunan Sejarah Perkembangan Departemen Dalam Negeri.	L L : 3 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
4	No. 4 Tahun 1989 18 Februari 1989	Penataran Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan para Isteri peserta pendidikan dan Latihan Penjenjangan Sespa dan SEPADYA di Lingkungan Depdagri.	Himp. PPU-DDN 1989 Hal.: 61 - 63	
5	No. 5 Tahun 1989 18 Februari 1989	Pendidikan dan Latihan Penjenjangan di Lingkungan Depdagri.	Himp. PPU-DDN 1989 Hal.: 64 - 67	
6	No. 6 Tahun 1989 25 Pebruari 1989	Penetapan Nilai & Ranking (Peringkat) Hasil Karya Prov. Dati I sel. Indonesia dlm Pelaks. Pelita IV dalam Rangka Penganu-gerahan Tanda Kehormatan Parasamya Nugraha.		*
7	No. 7 Tahun 1989 2 Maret 1989	Pengesahan Perda Tk.I Kaltim No.8/1988 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cab. Dinas Pembantu Dati.I Kaltim.	L L : 4 hal	*
8	No. 8 Tahun 1989 2 Maret 1989	Pengesahan Perda Prov. Dati.I Sulsel No.9 Th.1988 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dati I Sulsel.	L L : .. hal	*
9	No. 9 Tahun 1989 6 Maret 1989	Penyusunan Sejarah Perkembangan Departemen Dalam Negeri.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 68 - 70	
10	No.10 Tahun 1989 6 Maret 1989	Pengesahan Perda Prop.Dati I Jabar No.13 Th.1988 ttg SOTK Dinas Pertambangan Daerah Prop. Dati I Jabar.		*
11	No.11 Tahun 1989 13 Maret 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Timtim No.04 Th.1988 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I Timor Timur.		Tidak Berlaku lagi *
12	No.12 Tahun 1989 14 Maret 1989	Penyempurnaan Susunan Pengasuh Majalah Mimbar Depdagri.		*
13	No.13 Tahun 1989 30 Maret 1989	Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Depdagri.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 71 - 76	Dicabut dg KMDN No.104 Th.1995
14	No.14 Tahun 1989 30 Maret 1989	Petunjuk Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 77 - 78	Dicabut dg KMDN No.105 Th.1995
15	No.15 Tahun 1989 30 Maret 1989	Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Prov. Dati I Jateng.	L L : .. hal	*
16	No.16 Tahun 1989 10 April 1989	Pengesahan Perda Prop.Dati I Jabar No.10 Th.1988 ttg Perubahan yg Pertama Perda Prop.Dati I Jabar No.8 Th.1981 ttg Pembentukan SOTK Dinas P & K Prop. Dati I Jabar.	L L : .. hal	*
17	No.17 Tahun 1989 11 April 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irja No.5 Th.1988 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Irja No.7 Th.1981 ttg Pembentukan, SOTK Dinas Peternakan Prop. Dati I Irja.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
18	No.18 Tahun 1989 15 April 1989	Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa		*
19	No.19 Tahun 1989 27 April 1989	Alokasi Subsidi / Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan SDN TA.1989/1990		*
20	No.20 Tahun 1989 27 April 1989 SKB MDN, P & K dan Menkeu	Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri		*
21	No.21 Tahun 1989 10 Mei 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Barat No.13 Th.1988 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertambangan Daerah Prop. Dati I Jabar.		*
22	No.22 Tahun 1989 10 Mei 1989	Tata Laksana Penertiban dan Pengendalian Pembangunan di Kawasan Puncak.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 79 - 90	
23	No.23 Tahun 1989 15 Mei 1989	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 91 - 107	
24	No.24 Tahun 1989 25 Mei 1989	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.2 Th.1989 ttg Pembentukan, SOTK Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 108 - 111	
25	No.25 Tahun 1989 29 Mei 1989	Uraian Tugas Urusan pada Balai Pengkaderan Pembangunan Desa.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 112 - 120	
26	No.26 Tahun 1989 7 Juni 1989	Pedoman pelaksanaan PP No.9 Th.1987 ttg Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.	Himp.(II) PPU-DDN 1989 Hal.: 89 - 96	
27	No.27 Tahun 1989 7 Juni 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulsel No.8 Th.1988 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Sulsel No.10 Th.1981 ttg Organisasi dan Tata Kerja Setwilda dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Sulsel.		*
28	No.28 Tahun 1989 12 Juni 1989	Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke V Depdagri Tahun 1989/1990-1993/1994.	Himp.(II) PPU-DDN 1989 Hal.: 97 - 98	
29	No.29 Tahun 1989 12 Juni 1989	Penetapan Nilai & Ranking (Peringkat) 10 Prop. Dati I Terbaik setelah Penelitian/Penilai Tahap II Pelaks. Pelita IV Daerah dalam rangka Penganugerahan Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha.		*
30	No.30 Tahun 1989 10 Juli 1989	Organisasi dan Tatakerja Badan Penanaman Modal Daerah.	Himp.(II) PPU-DDN 1989 Hal.: 99 - 108	
31	No.31 Tahun 1989 14 Juni 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kaltim No.06 Th.1988 tTg Pembentukan Susunan Ortaka Dinas P & K Prop. Dati I Kaltim.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
32	No.32 Tahun 1989 14 Juni 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kaltim No.07 Th.1988 ttg Pembentukan SOTK Cabang Dinas P & K Prop. Dati I Kaltim.		*
33	No.33 Tahun 1989 19 Juni 1989	Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti		*
34	No.34 Tahun 1989 19 Juni 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng No. 9 Thn 1988 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Kalteng No.8/1981 ttg Pembentukan SOTK Dinas Peternakan Prop.Dati I Kalteng		*
35	No.35 Tahun 1989 24 Juni 1989	Penyelenggaraan Diklat Pertahanan Keamanan Negara Bagi Aparat Depdagri.		*
36	No.36 Tahun 1989 11 Juli 1989	Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Depdagri dari Dana APBD		*
37	No.37 Tahun 1989 24 Juli 1989	Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana bagi Jajaran Pertahanan Sipil di Daerah.		*
37A	No.37A Tahun 1989 25 Juli 1989	Pemilihan Guru Teladan Th.1989 dan Pembentukan Panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan Th.1989 .		*
38	No.38 Tahun 1989 28 Juli 1989	Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Depdagri		*
39	No.39 Tahun 1989 7 Agustus 1989	Ketentuan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa pada APDN		*
40	No.40 Tahun 1989 7 Agustus 1989	Pengesahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung No.53/BG IV/HK/1989 ttg Kontrak Bagi Tempat Usaha dlm Rangka Pembangunan Kios Terminal Pembantu Panjang Kotamadya Dati II Bandar Lampung		*
41	No.41 Tahun 1989 9 Agustus 1989	Pembiayaan dan Pelaksanaan Penyusunan data Awal Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan		*
42	No.42 Tahun 1989 10 Agustus 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jabar No.11 Th.1988 ttg Perubahan yg Pertama Perda Prop. Dati I Jabar No.8 Th.1984 tentang Pembentukan SOTK C. Dinas Lalu Lintas & Angkutan Jalan Raya Prop. Dati I Jabar		*
43	No.43 Tahun 1989 15 Agustus 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No.3 Th.1989 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Sulut No.6 Th.1980 ttg SOTK Dinas Peternakan Prop. Dati I Sulut.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
44	No.44 Tahun 1989 15 Agustus 1989	Penetapan Guru Teladan Nasional 1989		*
45	No.45 Tahun 1989 24 Agustus 1989	Kenaikan Pangkat Istimewa Dokter dan Paramedis Teladan di Puskesmas Th.1989 (SKB Menkes, Mendagri & Menpan)		*
46	No.46 Tahun 1989 30 Agustus 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No.2 Th.1989 ttg Perubahan Pertama Perda Prop.Dati I Sulut No.4 Th.1980 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dati I Sulut.		*
47	No.47 Tahun 1989 30 Agustus 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bali No.12 Th.1988 ttg Pembentukan, SOTK Dinas Kebudayaan Prop. Dati I Bali.		*
48	No.48 Tahun 1989 1 September 1989	Pedoman Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah		*
49	No.49 Tahun 1989 4 September 1989	Pedoman Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II.		*
50	No.50 Tahun 1989 13 September 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bali No.2 Th.1989 ttg Susunan Organisasi & Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tk.I Bali dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Bali.		*
51	No.51 Tahun 1989 20 September 1989	Penugasan Para Peserta Pelatihan Tenaga Analis Jabatan di Lingk. Depdagri.		*
52	No.52 Tahun 1989 21 September 1989	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Pematang Siantar No.3 Th.1988 ttg Rencana Induk Kota dengan Kedalaman Materi Rencana Bagian Kota Kotamadya Dati II Pematang Siantar.		*
53	No.53 Tahun 1989 21 September 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Lampung No.8 Th.1989 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Lampung No.2 Th.1977 ttg Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Prop. Dati I Lampung.		*
54	No.54 Tahun 1989 21 September 1989	Pengesahan Perda ttg Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Himp.(II) PPU-DDN 1989 Hal.: 109 - 110	
55	No.55 Tahun 1989 25 September 1989	Pengesahan Perda Kabupaten Dati II Semarang No.2 Th.1987 ttg Rencana Induk Kota Ungaran Th.1987.		*
56	No.56 Tahun 1989 25 September 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No.5 Th.1988 ttg Pembentukan, SOTK Dinas Pertambangan Prop. Dati I Bengkulu.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
57	No.57 Tahun 1989 11 Oktober 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng No.2 Th.1989 tentang Pembentukan, SOTK Dinas Pertambangan Prop. Dati I Kalteng.		*
58		KOSONG		
59	No.59 Tahun 1989 23 Oktober 1989	Peningkatan Usaha-usaha Pembangunan Desa melalui Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Terpadu.	Himp.(II) PPU-DDN 1989 Hal.: 111 - 115	
60	No.60 Tahun 1989 27 Oktober 1989	Pembentukan, Pembinaan & Pengesahan usul Pemukiman Transmigrasi		*
61	No.61 Tahun 1989 9 Nopember 1989	Pengesahan Perda Propinsi Dati I NTB No.3 Th.1989 tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Prop. Dati I NTB.		*
62	No.62 Tahun 1989 9 Nopember 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No.5 Th.1989 ttg Susunan Organisasi & Tata kerja Dinas Pertambangan Prop.Dati I NTB.		*
63	No.63 Tahun 1989 9 Nopember 1989	Iuran Pelayanan Irigasi di Daerah-daerah Percobaan.		*
64	No.64 Tahun 1989 9 Nopember 1989	Pembentukan Kelompok Kerja Penyempurnaan Organisasi dan Pengembangan Personil di Lingkungan DPUK.		*
65	No.65 Tahun 1989 9 Nopember 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.16 Th.1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Prop. Dati I Sumut.		*
66	No.66 Tahun 1989 9 Nopember 1989	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumut No.11/1989 ttg Susunan Organisasi & Tata kerja Dinas Kehutanan Prop. Dati I Sumut.		*
67	No.67 Tahun 1989 11 Nopember 1989 679.A/Kpts-V/1989	Gerakan Penghijauan Nasional	Himp.(II) PPU-DDN 1989 Hal.: 126 - 130	
68	No.68 Tahun 1989 11 Nopember 1989	Pasar Desa		Dicabut dg KMDN No.91 Th.1991
69	No.69 Tahun 1989 11 Nopember 1989	Susunan Organisasi Pasar Desa		Dicabut dg KMDN No.91 Th.1991
70	No.70 Tahun 1989 13 Nopember 1989 KM.139/PW.004/MPPT-89 No.0712A/U/1989	Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata Budaya	Himp.(II) PPU-DDN 1989 Hal.: 131 - 137	Dicabut dg Kepber Menpar, Mendikbud & MDN No.1 Th.1999
71	No.71 Tahun 1989 11 Desember 1989	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekalongan dan Kotamadya Magelang dari Tipe C menjadi Tipe B		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
72	No.72 Tahun 1989 11 Desember 1989	Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II.	Himp.(II) PPU-DDN 1989 Hal.: 181 - 144	
73	No.73 Tahun 1989 18 Desember 1989	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Magelang No.13 Th.1988 ttg Rencana Detail Tata Ruang Kota dengan Sebagian Rencana Teknik Ruang Kota Kotamadya Dati II Magelang.		*
74	No.74 Tahun 1989 18 Desember 1989	Perubahan yang Pertama Kepmendagri No.120-793 Th.1988 ttg Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.		*
284	No.284 Tahun 1989 27 Oktober 1989 62/MEN/1989	Pembentukan, Pembinaan & Penyerahaan Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigran.	L L : 5 hal	
*	No.431-609 Th.1989 9 Agustus 1089	Lagu Mars Lembaga Musyawarah Desa		Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
*	No.903-251 Th.1989	Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah ttg Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas.		Dicabut dg KMDN No.3 Th.1999
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1989 2 Januari 1989	Pembuatan, Pengisian dan Pelaporan Data Monografi Kecamatan.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 121 - 177	
2	No. 2 Tahun 1989 7 Januari 1989	Pengawasan atas Pemotongan Gaji Pegawai Negeri Sipil di Daerah.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 178 - 179	
3	No. 3 Tahun 1989 17 Januari 1989	Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan.		*
4	No. 4 Tahun 1989 17 Januari 1989	Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Manado.		*
5	No. 5 Tahun 1989 17 Januari 1989	Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Palembang.		*
6	No. 6 Tahun 1989 2 Februari 1989	Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 180 - 182	
7	No. 7 Tahun 1989 4 Februari 1989	Pengaturan dan Pengendalian Secara Proposional Pembengunan Rumah Tinggal di Wilayah Perkotaan.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 183 - 189	
8	No. 8 Tahun 1989 8 Maret 1989	Pelayanan Kesehatan Terhadap Veteran dan Cacat Veteran Republik Indonesia.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 190 - 192	
9-10		KOSONG		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
11	No.11 Tahun 1989 18 Maret 1989 Ins-007/J.A/1989	Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, Penangkapan/Penahanan Pejabat/Pegawai Pemerintah Wilayah/Daerah Dalam Jaringan Depdagri RI.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 193 - 195	
12	No.12 Tahun 1989 20 Maret 1989	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek2 Pembangunan TA.1989/1990 di Lingk. DDN.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 196 - 199	
13	No.13 Tahun 1989 3 April 1989	Keanggotaan Gubernur KDH Tk.I dan Staf Pemerintahan Daerah dlm Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional di Tingkat Daerah. (BAKORSTANADA).	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 200 - 202	
14	No.14 Tahun 1989	KOSONG		*
15	No.15 Tahun 1989 3 April 1989	Penyelenggaraan Penataran P-4 di Daerah Seluruh Indonesia TA.1989/1990.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 203 - 209	
16	No.16 Tahun 1989 3 April 1989	Penyampaian Informasi Pembangunan dalam Rangka Peningkt. Gerakan peranserta Masy. dan Pemantapan Fungsi Camat dlm Pengendalian Pembangunan di Wil. Kecamatan.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 210 - 218	
17	No.17 Tahun 1989 30 Mei 1989	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan.	Himp.PPU-DDN 1989 Hal.: 219 - 221	
17A	No.17A Tahun 1989 27 Juli 1989	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.		*
18	No.18 Tahun 1989 2 Agustus 1989	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No.6 Th.1988 ttg Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.	Himp.(II) PPU-DDN 1989 Hal.: 145 - 152	
19	No.19 Tahun 1989 7 Agustus 1989	Sumbangan Wajib Biaya Operasional Akademik dan Non Akademik Mahasiswa Pra APDN Nasional di Malang dan Semarang Berikut Pengelolaannya.	Himp.(II) PPU-DDN 1989 Hal.: 153 - 156	
20	No.20 Tahun 1989 8 Agustus 1989	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kampus APDN (APDN) di Jatinangor Jawa Barat TA.1989/1990.	Himp.(II) PPU-DDN 1989 Hal.: 157 - 169	
21	No.21 Tahun 1989 23 Agustus 1989	Penyuksesan Pekan Olahraga Nasional serta Pengambilan dan Perjalanan Api Pekan Olahraga Nasional XII Th.1989.		*
22	No.22 Tahun 1989 28 September 1989	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah.	Himp.(II) PPU-DDN 1989 Hal.: 170 - 172	
23	No.23 Tahun 1989 28 September 1989	Pembuatan Monografi Desa dan Kelurahan.		*
24	No.24 Tahun 1989 28 September 1989	Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
25	No.25 Tahun 1989 28 September 1989	Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemda Tingkat I kpd Pemerintah Tk.II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dati II Kecamatan.	Himp.II PPU-DDN 1989 Hal.: 173 - 175	
26	No.26 Tahun 1989 19 Oktober 1989	Upaya Peningkatan Pengembalian Kredit Usaha Tani (KUT)	Himp.II PPU-DDN 1989 Hal.: 176 - 178	
27	No.27 Tahun 1989 19 Oktober 1989	Tindakan Administratif Terhadap Pelanggaran Disiplin Jam Kerja dan Daftar Hadir Pegawai Negeri pada Kantor Pusat Depdagri.	Himp.II PPU-DDN 1989 Hal.: 179 - 181	
28	No.28 Tahun 1989 23 Oktober 1989	Penyusunan Program Kerja Tahunan Desa/Kelurahan.	Himp.II PPU-DDN 1989 Hal.: 182 - 187	
29	No.29 Tahun 1989 23 Oktober 1989	Peningkatan Pembinaan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.	Himp.II PPU-DDN 1989 Hal.: 188 - 196	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
30	No.30 Tahun 1989 11 Nopember 1989	Pelaksanaan KMDN No.63 Th.1989 ttg Iuran Pelayanan Irigasi di Daerah2 Percobaan.		*
31	No.31 Tahun 1989 11 Nopember 1989	Pembentukan Pasar Desa	Himp.II PPU-DDN 1989 Hal.: 197 - 198	Dicabut dg KMDN No.91 Th.1991
32	No.32 Tahun 1989 11 Nopember 1989	Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Daerah.	Himp.II PPU-DDN 1989 Hal.: 199 - 201	
33	No.33 Tahun 1989 4 Desember 1989	Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi	Himp.II PPU-DDN 1989 Hal.: 202 - 203	
34	No.34 Tahun 1989 11 Desember 1989	Pedoman Peningkatan Kemandirian, Kualitas & Kemampuan Org. Kekuatan Sosial Politik	Himp.II PPU-DDN 1989 Hal.: 204 - 207	
35	No.35 Tahun 1989 21 Desember 1989	Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1982 ttg 8 Sukses	Himp.II PPU-DDN 1989 Hal.: 208 - 215	
36	No.36 Tahun 1989 27 Desember 1989	Koordinasi, Pengawasan dan Pengamanan Harga Dasar Gabah dan Palawija	Himp.II PPU-DDN 1989 Hal.: 216 - 217	
-	No.411.24-244	Pelaksanaan Pekan Orientasi LMD	-	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
<b>TAHUN 1990</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1990 5 Februari 1990	Kedudukan Keuangan Ketua, Wkii Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 77 - 88	Dicabut dg Permen No.5 Th.1996
2	No. 2 Tahun 1990 5 Februari 1990	Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 89 - 93	
3	No. 3 Tahun 1990 16 Maret 1990	Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 94 - 113	Dicabut dg Permen No.1 Th.2004

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
4	No. 4 Tahun 1990 16 Maret 1990	Tata Cara kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 114 - 124	Dicabut dg Permen No.4 Th.2000
5	No. 5 Tahun 1990 12 Juni 1990	Kedudukan dan Tatacara Pengangkatan Wakil Kepala Daerah.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 125 - 133	
6	No. 6 Tahun 1990 26 Juni 1990	Tatacara Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Dilingkungan Depdagri	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 134 - 191	Dicabut dg Permen No.9 Th.1996
7	No. 7 Tahun 1990 15 Agustus 1990	Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 91 - 99	
8	No. 8 Tahun 1990 18 Desember 1990	Pengelolaan Keuangan Kelurahan.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 99 - 140	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1990 2 Januari 1990	Pedoman Pembentukan, Organisasi & Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop. D.I. Aceh.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 192 - 202	
2	No. 2 Tahun 1990 2 Januari 1990	Pedoman Penyus. Anggaran, Tata Usaha Keuangan, Pengawasan & Perhitungan Angg. Dana Pendidikan Utusan Daerah IIP Depdagri.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 203 - 210	
3	No. 3 Tahun 1990 25 Januari 1990	Pengesahan Perda Kab. Dati II Tangerang No.4 Th.1989 ttg Rencana Umum Tata Ruang Kota Serpong Kab. Dati II Tangerang.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 211 - 220	
4	No. 4 Tahun 1990 25 Januari 1990	Penghargaan Bagi Aparat Pemerintah Desa yang berprestasi dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 221 - 223	Dicabut dg Permen No.4 Th.2000
5	No. 5 Tahun 1990 25 Januari 1990	Penerapan Sistem Manajemen Operasi dan pemeliharaan Prasarana Kota dlm penyus. dan pelaksanaan APBD bidang prasarana & sarana kota TA.1991/1990 di daerah uji coba.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 224 - 227	
6	No. 6 Tahun 1990 25 Januari 1990	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jambi No.2 Th.1989 ttg Pembentukan, SOTK Dinas Pertambangan Prop. Dati I Jambi.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 228 - 230	
7	No. 7 Tahun 1990 1 Februari 1990	Pencabutan Kepmendagri No.18 Th.1987 ttg Penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Manajemen Depdagri dan Pemerintah Daerah.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 231 - 232	
8	No. 8 Tahun 1990 1 Februari 1990	Penetapan Peserta Pendidikan dan Latihan Penjenjangan Sekolah Pimpinan Adminis-trasi Tingkat Lanjutan (SEPALA) Depdagri Angkatan II dan III di Pendidikan dan Latihan Prop.Jawa Barat Th.1989/1990.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 233 - 239	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
9	No. 9 Tahun 1990 1 Februari 1990	Penetapan Peserta Diklat Penjurangan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA) Depdagri Angkt. XIX di Jakarta Th.1989/1990	L L : hal	*
10	No.10 Tahun 1990 1 Februari 1990	Pengelolaan Dana Cadangan Menteri.	L L : .. hal	*
11	No.11 Tahun 1990 13 Februari 1990	Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 240 - 242	Dicabut dg KMDN No.61 Th.1992.
12	No.12 Tahun 1990 13 Februari 1990	Pelaksanaan Perjalanan Dinas.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 243 - 251	
13	No.13 Tahun 1990 14 Februari 1990	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Celukan Bawang.		*
14	No.14 Tahun 1990 14 Februari 1990	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banjarmasin.		*
15	No.15 Tahun 1990 14 Februari 1990	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Benoa.		*
16	No.16 Tahun 1990 14 Februari 1990	Pelaksanaan Pemberian Piagam Tanda Kesetiaan, Ketaatan, Jasa & Pengabdian Kepada Aparat Pemerintahan Desa yang telah Berjasa dan Berprestasi Dalam Pelaksanaan Tugasnya.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 252 - 258	
17	No.17 Tahun 1990 14 Februari 1990	Pelaksanaan Pemberian Uang Sumbangan sbg Penghargaan atas jasa Kepala Desa & Perangkat Desa yg meninggal Dunia di dlm dan sewaktu menjalankan Tugas Negara.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 259 - 261	
18	No.18 Tahun 1990 15 Februari 1990	Pengesahan Perda Dati I Jateng No 6/1988 ttg Pembentukan, Susunan Org. dan Tata kerja Dinas P.U. Cipta Karya Dati.I Jateng.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 262 - 264	
19	No.19 Tahun 1990 15 Februari 1990	Pengesahan Perda Dati.I Jateng No.7/1988 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas P.U. Bina Marga Prov. DatiI Jawa Tengah.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 265 - 267	
20	No.20 Tahun 1990 15 Februari 1990	Pengesahan Perda Dati I Jateng No.8/1988 ttg Pembentukan, SOTK Dinas P.U. Pengairan Prop. Dati I Jawa Tengah.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 268 - 270	
21	No.21 Tahun 1990 19 Februari 1990	Ketentuan-ketentuqn Prosedur, Tatacara dan Persyaratan dlm Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawasan Bank Pembangunan Daerah.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 271 - 290	Dicabut dg KMDN No.58 Th.1999

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
22	No.22 Tahun 1990 20 Februari 1990	Penngesahan Program Kerja & Rencana Anggaran Penerimaan & Pengeluaran Tim Pembina Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Tahun 1990/1991.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 291 - 293	
23	No.23 Tahun 1990 21 Februari 1990	Pengesahan Perda Dati I Kaltim No.10 Th.1989 ttg Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/Dati I Kaltim dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Kaltim.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 294 - 296	
24	No.24 Tahun 1990 26 Februari 1990	Pengesahan Perda Dati I Kalimantan Timur No.3 Th.1989 ttg Pembentukan SOTK Dinas Pertambangan Prop. Dati I Kalimantan Timur.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 297 - 299	
25	No.25 Tahun 1990 23 Maret 1990	Alokasi Bantuan Dana Penyelenggaraan APBN yang bersifat Nasional dari APBD Propinsi Dati I TA.1990/1991.		Dibatalkan dg Inmen No.25 Th.1990
26	No.26 Tahun 1990 26 Maret 1990	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Semarang tentang Rencana Induk Kota.		*
27	No.27 Tahun 1990 20 September 1990	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kampus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang bersifat Nasional di Jatinangor Jabar TA.1990/1991.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 141 - 169	
28	No.28 Tahun 1990 10 April 1990	Kartu Induk Aparat Pemerintahan Desa / Kelurahan.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 300 - 304	
29	No.29 Tahun 1990 10 April 1990	Pemakaian Logo dan Tanda Pengenal Keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 305 - 310	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
30	No.30 Tahun 1990 12 April 1990	Pengesahan Perda Dati I Jabar No.10 Th.1989 ttg Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Tenaga Kerja Dati I Jabar.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 311 - 313	
31	No.31 Tahun 1990 16 April 1990	Pengesahan Perda Dati II Tanjung Balai No.5 Th.1987 ttg Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Balai Th.1986-2009.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 314 - 316	
32	No.32 Tahun 1990	KOSONG		
33	No.33 Tahun 1990 23 April 1990	Pengesahan Perda Dati II Jambi No.2/1988 ttg Renc. Bagian Wil. Kota/Renc. Detail Tata Ruang Kota Jambi Th.1985-2005.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 317 - 320	
34	No.34 Tahun 1990 23 April 1990	Penetapan Besarnya Subsidi/Bantuan pembiayaan Penyelenggaraan SDN TA.90/91(SKB).		*
35	No.35 Tahun 1990 29 April 1990	Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 : D.P.R.D	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 321 - 324	
36	No.36 Tahun 1990 3 Mei 1990	Pembentukan Focal Point Monitoring Data Ketenagakerjaan Sektoral Depdagri.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 325 - 329	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
37	No.37 Tahun 1990 3 Mei 1990	Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah & Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan PBB di 100 Kab. Dati II.	Himp. PPU-DDN 1990 Hal.: 330 - 337	
38	No.38 Tahun 1990 7 Mei 1990	Pengesahan Perda Dati I Bali No.3 Th.1989 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prop. Dati I Bali.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 338 - 340	
39	No.39 Tahun 1990 7 Mei 1990	Pembentukan Koordinasi Wajib Belajar SLTP Tingkat Nasional (SKB Mendagri dan Mendikbud).	-	*
40	No.40 Tahun 1990 14 Mei 1990	Pengesahan Perda ttg Pembentukan, Susunan Organisasi & Tatakerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perpustakaan Umum Dinas Dikbud Prop. D.I.Aceh Pengembangan Registrasi Penduduk.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 341 - 343	
41	No.41 Tahun 1990 17 Mei 1990	Pengesahan Perda Dati I Riau No.2/1989 ttg Pembentukan Susunan Organisasi & Tata kerja Dinas Pertambangan Dati I Riau.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 344 - 346	
42	No.42 Tahun 1990 26 Mei 1990	Pengesahan Perda Dati I Sumbar No.5/1989 ttg Pembentukan, SOTK Dinas Pertambangan Prop. Dati I Sumatera Barat.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 347 - 349	
43	No.43 Tahun 1990 9 Juni 1990	Pengesahan Perda Dati I Sumbar No.3/1989 ttg Penetapan Perubahan Pertama Perda Dati I Sumbar No.2 Th.1983 ttg Pembentukan SOTK Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dati I Sumatera Barat.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 350 - 353	
44	No.44 Tahun 1990 9 Juni 1990	Pengesahan perda Dati I Sulut No.1/1989 ttg Pembentukan, SOTK Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Dati I Sulut.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 354 - 356	
45	No.45 Tahun 1990 14 Juni 1990	Dewan Kepangkatan Departemen Dalam Negeri.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 357 - 364	
46	No.46 Tahun 1990 14 Juni 1990	Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/ Daerah Tk.II dan Asisten Sakretaris Kotamadya Dati.II.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 365 - 370	
47	No.47 Tahun 1990 18 Juni 1990	Pengesahan Perda Dati I Bali No.13/1988 ttg Pembentukan, SOTK Dinas Kebersihan & Pertamanan Prop. Dati I Bali.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 371 - 373	
48	No.48 Tahun 1990 18 Tahun 1990	Perubahan Pasal 7 ayat 2 Lampiran KMDN No. 404/1977 ttg Pedoman Penyusunan Perda Tk.II ttg Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk & Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 374 - 375	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
49	No.49 Tahun 1990 20 Juni 1990	Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tk.I dan Dati. II Kepada Pemerintah Desa.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 376 - 379	
50	No.50 Tahun 1990 20 Juni 1990	Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak & Retribusi Daerah kpd Pemerintah Desa.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 380 - 383	
51	No.51 Tahun 1990 20 Juni 1990	Pembentukan Wilayah2 Kerja Pembantu Gubernur dalam Wilayah Prop.Dati I Jambi.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 384 - 386	
52	No.52 Tahun 1990 20 Juni 1990	Pembentukan Wilayah-wilayah Kerja Pembantu Bupati dalam Wilayah Prop. Daerah Istimewa Aceh.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 387 - 390	
53	No. 53 Tahun 1990 20 Juni 1990	Pembentukan Wlayah-wilayah Kerja Pembantu dalam Wilayah Prop. Dati I Sumatera Selatan.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 391 - 397	
54	No.54 Tahun 1990 20 Juni 1990	Penghentian Pungutan Pemerintah Daerah atas Retribusi Karantina Hewan dan Ikan.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 398 - 400	
55	No.55 Tahun 1990 20 Juni 1990	Pembentukan dan Penataan Wilayah Kerja Pembantu Walikotamadya Surabaya dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 401 - 404	
55A	No.55A Tahun 1990 22 Juni 1990	Pemilihan Guru Teladan Tahun 1990 dan Pembentukan Panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan Tahun 1990	L L : 4 hal	*
56	No.56 Tahun 1990 16 Juli 1990	Pengesahan Perda Prop. D.I.Y No.12/1989 ttg SOTK Sekretariat Wil. /Daerah Prop. D.I Yogyakarta & Sekretariat DPR Daerah Prop.D.I Yogyakarta.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 170 - 176	
57	No.57 Tahun 1990 16 Juli 1990	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalimantan Barat No.1/1990 ttg SOTK Sekretariat Wil./ Daerah & Set. DPRD Prop.Dati I Kalbar.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 177 - 217	
58	No.58 Tahun 1990 18 Juli 1990	Program Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 1990/1991.		*
59	No.59 Tahun 1990 6 Agustus 1990	Pengesahan Perda Dati I Jambi No.1 Th.1989 ttg Pembentukan SOTK Dinas Pariwisata Prop. Dati I Jambi.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 218 - 221	
60	No.60 Tahun 1990 6 Agustus 1990	Pengesahan Perda Dati I Jateng No.6/1990 ttg Pembentukan SOTK Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Jawa Tengah.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 222 - 225	
61	No.61 Tahun 1990 18 Juli 1990	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Maluku No.06 Th.1989 ttg Pembentukan SOTK Dinas Pertambangan.		*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
62		KOSONG		*
63	No.63 Tahun 1990 13 Agustus 1990	Kenaikan Pangkat Istimewa Dokter dan Paramedis Teladan di Puskesmas Th.1990.		*
64	No.64 Tahun 1990 15 Agustus 1990	Penetapan Guru Teladan Tingkat Nasional Tahun 1990.		*
65	No.65 Tahun 1990 13 Juli 1990	Rencana Induk Pendidikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 226 - 284	
66	No.66 Tahun 1990 8 Agustus 1990	Kurikulum Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 285 - 305	
67	No.67 Tahun 1990 8 Agustus 1990	Pedoman Pengajaran, Pelatihan & Pengasuhan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 306 - 334	
68	No.68 Tahun 1990 16 Agustus 1990	Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus (Kode Kehormatan Tata Krama dan Peraturan Khusus) Akademi Pemerintahan Dlm Negeri.		*
69	No.69 Tahun 1990 20 Agustus 1990	Pengesahan Perda Dati I Kalimantan Timur No.5 Th.1989 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum H.A. Wahab Syachranie Samarinda.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 335 - 340	
70	No.70 Tahun 1990 20 Agustus 1990	Pengesahan Perda Dati I Kalimantan Timur No. 6 Th.1989 ttg Pembentukan Susunan Oragnisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Balik Papan.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 341 - 346	
71	No.71 Tahun 1990 20 Agustus 1990	Pengesahan Perda Dati I Kaltim No.7/1989 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Tarakan.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 347 - 352	
72	No.72 Tahun 1990 20 Agustus 1990	Pengesahan Perda Dati I Kalimantan Timur No.8/1989 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Khusus Kusta Tenggara.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 353 - 357	
73	No.73 Tahun 1990 3 September 1990	Pengesahan Perda Dati I Sumatera Selatan No.1/1990 ttg Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati I Sumatera Selatan.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 358 - 366	
74	No.74 Tahun 1990 10 September 1990	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengkajian Perkotaan & Lingkungan DKI Jakarta.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 367 - 380	
75	No.75 Tahun 1990 10 September 1990	Tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tk. II di 100 Kabupaten Dati II.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 381 - 388	
76	No.76 Tahun 1990 10 September 1990	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Dati.II.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 389 - 402	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
77	No.77 Tahun 1990 10 September 1990	Pengesahan Perda Dati II Sumsel No.4 Th.1990 ttg Perubahan Pertama Perda Dati.I Sumsel No.11/1988 ttg Pembentukan SOTK Cabang Dinas Pertambangan Dati I Sumsel.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 403 - 406	
78	No.78 Tahun 1990 18 September 1990	Pelaksanaan Uji Coba luran Pelayanan Irigasi Di Kabupaten Dati II Cimalungun.		*
79	No.79 Tahun 1990 15 September 1990 067/U/1990 126A/1990	Pelaksanaan Perpindahan Wilayah Kerja Bagi Pegawai Negari Sipil yang Bertrans migrasi.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 407 - 413	
80	No.80 Tahun 1990 15 September 1990	Pengesahan Perda Dati I Sulut No.2/1990 ttg Pembentukan SOTK Dinas P.U.Dati I Sulut.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 414 - 416	
81	No.81 Tahun 1990 27 September 1990	Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Lingkungan Depdagri.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 417 - 425	
82	No.82 Tahun 1990	Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.	-	Dicabut dg KMDN No.72 Th.1999
83	No.83 Tahun 1990 2 Oktober 1990	Lambang Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.	-	Dicabut dg Permen No.68 Th.2013
84	No.84 Tahun 1990 2 Oktober 1990	Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Mahasiswa APDN.	-	*
85	No.85 Tahun 1990 4 Oktober 1990	Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan PP tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kpd Dati I dan Dati II.	-	*
86	No.86 Tahun 1990 15 Oktober 1990	Tata Cara Pemusnahan Pelumas Bekas dan Pengawasannya.	-	*
87	No.87 Tahun 1990 17 Oktober 1990	Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN).	-	*
88	No. 88 Tahun 1990 17 September 1990	Pengesahan Perda Dati I Bali No.2/1990 ttg Pembentukan SOTK Dinas Pertambangan Dati I Bali.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 426 - 429	
89	No.89 Tahun 1990 18 Oktober 1990	Batas-batas Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Palembang dan Sungai Lais.	-	*
90	No.90 Tahun 1990 18 Oktober 1990	Penataan dan Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kuningan dalam Wilayah Dati I Jawa Barat.	-	*
91	No.91 Tahun 1990 18 Oktober 1990	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalsel No.6 Th.1990 ttg Pembentukan SOTK Dinas Pertambangan Prop.Dati I Kalsel.	-	*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
92	No.92 Tahun 1990 25 Oktober 1990	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No.11 Th.1989 ttg Pembentukan Susunan Org. & Tatakerja Dinas Pertanian Prop.Dati I Riau.	-	*
93	No.93 Tahun 1990 29 Oktober 1990	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daerah Lingk. Kepentingan Pelabuhan Balikpapan.	-	*
94	No.94 Tahun 1990 3 Nopember 1990	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.9/1989 ttg Pembentukan SOTK Dinas Pertambangan Prop. Dati I NTT.	-	*
95	No.95 Tahun 1990 10 Nopember 1990 KM.109 Tahun 1990	Pelaksanaan PP No. 22 Th.1990 ttg Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dlm Bidang LLAJ kepada Dati I & Dati II.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 430 - 440	*
96	No.96 Tahun 1990 11 Desember 1990	Kelompok Kerja Perumus Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Perumahan.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 441 - 445	
97	No.97 Tahun 1990 13 Desember 1990	Perubahan Kepmendagri No.300 Th.1982 tentang Organisasi dan Tatakerja Staf Ahli Menteri di Lingkungan Depdagri.	-	*
98	No.98 Tahun 1990 19 Desember 1990	Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan bagian Dati I & Dati II serta Pemberian Sumbangan/ Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 446 - 454	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
99	No.99 Tahun 1990 19 Desember 1990	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotamadya Tipe C menjadi Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kotamadya Tipe B.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 455 - 459	
100	No.100 Tahun 1990 27 Desember 1990	Pengesahan Perda Kab Dati II Aceh Barat No. 7 Thn 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Meulaboh Kab Dati II Aceh Barat Th.1986 - 2008.	-	*
101	No.101 Tahun 1990 27 Desember 1990	Sistem dan Prosedur Perpajakan, retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 91 Kab. Daerah Tingkat II.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 460 - 465	
102	No.102 Tahun 1990 29 Desember 1990	Sistim dan Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah & Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/ Kotamadya Dati II seluruh Wil Indonesia.	-	*
103	No.103 Tahun 1990 2 Nopember 1990	Pengesahan Keputusan Gubernur KDH Tk.I Jambi No.362 Th.1990 ttg Pembentukan Ortaka Kantor Pembantu Gubernur Wil. Barat Timur Prop.Dati I Jambi .	-	*

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
104	No.104 Tahun 1990 30 Nopember 1990	Pedoman Pemberian Honorium bagi Dosen/ Pelatih/Pengasuh serta honorium Karya Tulis Ilmiah dan Vakasi Ujian Semester dan Vakasi Ujian Semester/ Ujian Akhir pada APDN.	-	*
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No.1 Tahun 1990 5 Februari 1990	Pelaksanaan PP No.20 Th.1989 ttg Pembentukan Kota Administratif Bontang.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 405 - 409	
2	No.2 Tahun 1990 6 Februari 1990	Pra Petunjuk Penyusunan APBD TA. 1990/1991.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 410 - 425	
3	No.3 Tahun 1990 7 Februari 1990	Penyelesaian Tugas Tahap Penyusunan dan Perumusan Informasi Jabatan dalam Rangka Analisis Jabatan.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 426 - 427	
4	No.4 Tahun 1990 10 Maret 1990	Petunjuk Operasional Pelaksanaan proyek proyek Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991 Dilingkungan Irjen Depdagri.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 428 - 429	
5	No.5 Tahun 1990 19 Maret 1990	Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kedalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 430 - 438	
6	No.6 Tahun 1990 19 Maret 1990	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek- proyek Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991 di lingkungan Depdagri.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 439 - 441	
7	No.7 Tahun 1990 19 Maret 1990	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Perenc. Umum Depdagri TA. 1990/1991.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 442 - 443	
8	No.8 Tahun 1990 19 Maret 1990	Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 444 - 454	
9	No.9 Tahun 1990 5 April 1990	Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 455 - 474	
10	No.10 Tahun 1990 10 April 1990	Batas Usia Maksimal & Persyaratan Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 475 - 477	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
11	No.11 Tahun 1990 10 April 1990	Penanganan Kasus/Pengaduan Masyarakat Dibidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 478 - 483	
12	No.12 Tahun 1990 10 April 1990	Penyelenggaraan Penataran P4 di Daerah Seluruh Indonesia TA.1990/1991.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 484 - 499	
13	No.13 Tahun 1990 18 April 1990	Susunan Pimpinan DPRD Prop. Dati I dan DPRD Kabupaten/Kotamadya Dati.II.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 500 - 506	
14	No.14 Tahun 1990 7 Mei 1990	Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu dalam Rangka Pembangunan Daerah.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 507 - 527	Dicabut dg KMDN No.12 Th.1999

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
15	No.15 Tahun 1990	KOSONG	-	*
16	No.16 Tahun 1990 1 Juni 1990	Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Yayasan Purna Bhakti dari APBD Prop. Dati I TA.1990/1991.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 528 - 531	
17	No.17 Tahun 1990 6 Juni 1990	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No.1 Th.1989 ttg Pembentukan SOTK LLAJR Prop. Dati I Sulut.	-	Diganti dg KMDN No.44 Th.1990
18	No.18 Tahun 1990 12 Juni 1990	Pemantapan Pelaksanaan Perlombaan Desa.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 532 - 545	
19	No.19 Tahun 1990 12 Juni 1990	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Subsidi Bantuan Pengembangan dan Pemeliharaan Obyek Pariwisata Daerah.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 546 - 575	
20	No.20 Tahun 1990 18 Juni 1990	Langkah-2 Operasional Penelitian & Penilaian thdp Warganegara RI yg Terlibat G.30.S/PKI utk dapat dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya dlm Pemilihan Umum Th.1992.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 576 - 587	
21	No.21 Tahun 1990 18 Juni 1990	Penciptaan dan Pemeliharaan Situasi dan Kondisi Masyarakat dan Daerah untuk Menunjang suksesnya Pemilu 1992.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 588 - 599	
22	No.22 Tahun 1990 21 Juni 1990	Pelaksanaan Kepmendagri No.45/1990 ttg Penghentian Pungutan Pemda atas Retribusi Karantina Hewan dan Ikan.	Himp.PPU-DDN 1990 Hal.: 600 - 602	
23	No.23 Tahun 1990 20 Agustus 1990	Penyusunan dan Pemanfaatan data pokok pembangunan untuk perencanaan, pelaks. dan pemantauan pembangunan di Daerah.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 466 - 486	
24	No.24 Tahun 1990 21 Juni 1990	Penetapan Batas dan Pemetaan Wilayah Desa dan Kelurahan.	L L : 3 hal	Dicabut dg Permen No.27 Th.2006
25	No.25 Tahun 1990 21 Juni 1990	Alokasi Bantuan Dana Penyelenggaraan APDN yg Bersifat Nasional dari APBD Prop. Dati I TA.1990/1991.	L L : 3 hal Ralat : 1 hal	
26	No.26 Tahun 1990 11 September 1990	Pelaksanaan Kepmendagri No. 78/1990 ttg Pelaksanaan Uji Coba Iuran Pelayanan Irigasi di Kab. Dati II Simalungun.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 487 - 499	
27	No.27 Tahun 1990 20 September 1990	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kampus APDN (yang Bersifat Nasional di Jatinangor Jabar TA. 1990/1991).	L L : 4 hal Lamp : 10 hal	*
28	No.28 Tahun 1990 3 Oktober 1990	Peningkatan Pemasarakatan dan Pembudayaan P4 yang selaras dengan situasi dan Kondisi Masyarakat.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 500 - 513	
29	No.29 Tahun 1990 8 Oktober 1990	Penyelenggaraan Prasarana Gerakan Sadar Pangan dan Gizi untuk perbaikan Menu Makanan Rakyat.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 514 - 519	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
30	No.30 Tahun 1990 8 Oktober 1990	Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum & Fasilitas Sosial Perumahan Pemda	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 520 - 543	
31	No.31 Tahun 1990 8 Oktober 1990	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan & Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan Palembang dan Sungai Lais.		Diganti dg KMDN No.89 Th.1990
32	No.32 Tahun 1990 17 Oktober 1990	Pedoman Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang kepada Pembantu Bupati/ Walikota/madya.	Himp.(II) PPU-DDN 1990 Hal.: 544 - 557	
33	No.33 Tahun 1990 24 Desember 1990	Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja.	L L : .. hal	Dicabut dg PP No.32 Th.2004
34	No.34 Tahun 1990 27 Desember 1990	Pengelolaan Kawasan Lindung di Daerah.	L L : .. hal	
<b>TAHUN 1991</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1991 21 Juni 1991	Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pejabat Wilayah/Daerah.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 1 - 53	Dicabut dg Permen No.60 Th.2007 dan No.11 Th.2008
2	No. 2 Tahun 1991 7 Pebruari 1991	Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 54 - 83	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
3	No. 3 Tahun 1991 1 Mei 1991	Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 84 - 92	
4	No. 4 Tahun 1991 5 Mei 1991	Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 93 - 102	
5	No. 5 Tahun 1991 5 Mei 1991	Pelaksanaan Administrasi Desa dan Kelurahan.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 102 - 108	
<b>KEPMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1991 2 Januari 1991	Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Propinsi Dati I Sumatera Selatan dengan Propinsi Dati I Lampung Khususnya Antara Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir dng Kabupaten Dati II Lampung Utara.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 109-113	
2	No. 2 Tahun 1991 2 Januari 1991	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No. 6 Th.1989 ttg Susunan Organisasi dan Tata kerja Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 114-117	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
3	No. 3 Tahun 1991 3 Januari 1991	Pengesahan Garis Batas Wilayah Antara Propinsi Dati I Jawa Tengah dengan Prop. Dati I Jawa Barat Khususnya Antara Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dgn Kabupaten Dati II Ciamis.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 118-124	
4	No. 4 Tahun 1991 5 Januari 1991	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 125-132	
5	No. 5 Tahun 1991 10 Januari 1991	Pengesahan Perda Prop. DI. Yogyakarta No.14 Th.1989 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov. DI.Yogyakarta.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 133-135	
6	No. 6 Tahun 1991 10 Januari 1991	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulawesi Selatan No.6 Th.1990 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Prop. Dati I Sulsel .	Himp. PPU-DDN 1991 Hal.: 136-138	
7	No. 7 Tahun 1991 10 Januari 1991	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng No.4 Th.1990 ttg Perubahan Pertama Peraturan Dati I Kalteng No.07/1986 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Kehutanan Prop. Dati I Kalteng.Tengah.	Himp. PPU-DDN 1991 Hal.: 139-141	
8	No. 8 Tahun 1991 10 Januari 1991	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bali No.7 Th.1990 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Dati I Bali.	Himp. PPU-DDN 1991 Hal.: 142-145	
9	No. 9 Tahun 1991 14 Januari 1991	Pengesahan Perda Prop.Dati I Sulsel No.7 Th.1990 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum. Bina Marga Prop. Dati I Sulsel.	Himp. PPU-DDN 1991 Hal.: 146-148	
10	No.10 Tahun 1991 14 Januari 1991	Pengesahan Perda Prop.Dati I Sulsel No.8 Th.1990 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Prop. Dati I Sulsel.	Himp. PPU-DDN 1991 Hal.: 149-151	
11	No.11 Tahun 1991 14 Januari 1991	Pengesahan Perda Prop.Dati I Sulsel No.9 Th.1990 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prop. Dati I Sulsel.	Himp. PPU-DDN 1991 Hal.: 152-154	
12	No.12 Tahun 1991 28 Januari 1991	Tata Cara Pengangkatan dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dati II Halmahera Tengah.	Himp. PPU-DDN 1991 Hal.: 155-169	
13	No.13 Tahun 1991 28 Januari 1991	Tata Cara Pengangkatan dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Bitung.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 170-184	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
14	No.14 Tahun 1991 1 Pebruari 1991	Penelitian dan Pengembangan Potensi Swadaya di Daerah dg Pengembangan Ekonomi kerakyatan melalui wadah Koperasi.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 185-188	
15	No.15 Tahun 1991 1 Pebruari 1991	Pengesahan Perda Prop. Dati I Timtim No.03 Th.1989 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Dati I Timor Timur.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 189-193	
16	No.16 Tahun 1991 6 Pebruari 1991	Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 194-197	
17	No.17 Tahun 1991 11 Pebruari 1991	Pembentukan Asisten Sekretaris Wil. Dati II dan Asisten Sekretaris Kotamadya Dati II.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 198-202	
18	No.18 Tahun 1991 13 Pebruari 1991	Pengesahan Peraturan Bersama Prop. Dati.I Jabar dan DKI Jakarta No.5 Th.1990/ No.2 Th.1990 ttg Perubahan Pertama Peraturan Bersama Prop. Dati I Jabar dan DKI Jakarta No.1 Th.1976/No.3 Th.1976 ttg Kerjasama dlm Rangka Pembangunan Jabotabek.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 203-209	
19	No.19 Tahun 1991 14 Pebruari 1991 KP.14/AL.106/PHB-	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingk.Kepentingan Pelabuhan Pekan Baru dan Perawang.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 210-220	
20	No.20 Tahun 1991 19 Pebruari 1991 KM.15 Tahun 1991	Batas2 Daerah Lingk. Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 221-228	
21	No.21 Tahun 1991 19 Pebruari 1991	Pengesahan Perda Prop.Dati.I Jateng No.7 Th.1990 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Jateng No.4/1991 ttg SOTK Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dati I Jateng.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 229-232	
22	No.22 Tahun 1991 27 Pebruari 1991	Peraturan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 233-248	
23	No.23 Tahun 1991 28 Pebruari 1991 131-Menkes-SKB-	Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Daerah Embarkasi Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 249-257	
23A	No.23A Tahun 1991 1 Maret 1991	Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 258-261	
24	No.24 Tahun 1991 11 Maret 1991	Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 262-263	
25	No.25 Tahun 1991	KOSONG		
26	No.26 Tahun 1991	KOSONG		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
27	No.27 Tahun 1991 13 Februari 1991	Pengesahan Program Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan & Pengeluaran Tim Pembina Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Tahun 1991/1992.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 264-266	
28	No.28 Tahun 1991	KOSONG		
29	No.29 Tahun 1991 19 Maret 1991	Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 267-273	
30	No.30 Tahun 1991 25 Maret 1991	Sumbangan sebagian hasil penerimaan pajak Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 274-277	
31	No.31 Tahun 1991 10 April 1991	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Balikpapan No.10 Th.1989 ttg Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 1973-1993	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 278-281	
32	No.32 Tahun 1991 12 April 1991	Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 282-294	
33	No.33 Tahun 1991 25 April 1991	Pedoman Pembentukan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Di 14 Kota Administratif.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 295-298	
34	No.34 Tahun 1991 25 April 1991 0223a/K/1991 395a/KMK.03/1991	Penetapan Besarnya Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri TA.1991/1992.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 299-302	
35	No.35 Tahun 1991	BATAL		
36	No.36 Tahun 1991	KOSONG		
37	No.37 Tahun 1991	KOSONG		
38	No.38 Tahun 1991 3 Mei 1991	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalbar No 5 Th.1990 ttg Pembentukan SOTK Dinas Pertambangan Prop. Dati I Kalimantan Barat.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 303-306	
39	No.39 Tahun 1991 10 Mei 1991	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Dati I Riau Di Kotamadya Batam.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 307-315	
40	No.40 Tahun 1991 13 Mei 1991	Pengesahan Penghapusan Gedung Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Kalbar Jalan Rahadi Osman No.10 Pontianak.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 167-319	
41	No.41 Tahun 1991 27 Mei 1991	Pembubaran Tim Pengamat Penyelesaian Tanah Unit KORPRI. Departemen Dalam Negeri Di Desa Bojong Gede Kabupaten Dati II Bogor dan Di Desa Cibadak Kabupaten Dati II Sukabumi Prop. Dati I Jawa Barat.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 207-322	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
42	No.42 Tahun 1991 27 Mei 1991	Pencabutan Status Mahasiswa Tugas Belajar pada Institut Ilmu Pemerintah.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 323-325	
43	No.43 Tahun 1991 27 Mei 1991	Pembentukan Panitia Tetap Liason Officer Depdagri Dalam Rangka Suspimpemdagri Angkatan V dan VI Th.1990/1991.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 326-329	
44	No.44 Tahun 1991 27 Mei 1991	Penunjukan Tenaga Pelatih Di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Semester II dan IV Tahun 1990/1991.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 330-336	
45	No.45 Tahun 1991 27 Mei 1991	Pengesahan Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah No.3 Th.1989 ttg Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumh Sakit Umum Daerah Prop. Dati I Jawa Tengah.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 337-340	
46	No.46 Tahun 1991	KOSONG		
47A	No.47A Tahun 1991 3 Juni 1991 143 /KPB/VI/1991 01/SKB/M/VI/1991	Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi, dan Menteri Dalam Negeri No. 01A/KPB/I/76, No. Kep. 39/Men/76, No. MDN 18A Tahun 1976 ttg Pelaksanaan Pembelian/Pengumpulan Kopra Dari Petani Oleh Koperasi Kopra Tingkat Primer/BUUD/KUD.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 341-342	
47	No.47 Tahun 1991 6 Juni 1991	Pembentukan Tim Perencanaan, Pengendalian & Pengawasan (Rendalwas) Penyelenggaraan Kursus Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Angkt. V & VI Th.1991/1992.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 343-348	
48	No.48 Tahun 1991 8 Juni 1991	Tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 349-355	
49	No.49 Tahun 1991 8 Juni 1991	Penunjukan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II dalam Lingkungan Kantor Pusat Depdagri esbg Peserta Latihan Pra Jabatan yg Bersifat Umum Th.1991/1992.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 356-360	
50	No.50 Tahun 1991 22 Juni 1991	Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 9 Tahun 1990 ttg Rencana Detail, Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Wonocolo.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 361-362	
51	No.51 Tahun 1991 22 Juni 1991	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Surabaya No.10 Th.1990 ttg Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Karangpilang	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 363-364	
52	No.52 Tahun 1991 24 Juni 1991	Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Propinsi Dati I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Dati I Sulawesi Tengah	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 365-380	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
53	No.53 Tahun 1991 1 Juli 1991	Perubahan Lampiran Kepmendagri Tagl. 4 Oktober 1990 No. 85 ttg Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ttg Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Dati I dan Dati II	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 1 - 6	
54	No.54 Tahun 1991 1 Juli 1991	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Pengelola Monumen Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 7 - 15	
55	No.55 Tahun 1991 4 Juli 1991	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 22 Tahun 1990 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakkerja Kantor Pembantu Bupati Kepala Dati II Muara Enim.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 16 - 21	
56	No.56 Tahun 1991 4 Juli 1991	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Dati I Sumatera Selatan No.24 Th.1990 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakkerja Kantor Pembantu Bupati Kepala Dati II Musi Rawas	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 22 - 26	
57	No.57 Tahun 1991 4 Juli 1991	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 21 Tahun 1990 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakkerja Kantor Pembantu Bupati Kepala Dati II Ogan Komering Ilir.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 27 - 31	
58	No.58 Tahun 1991 4 Juli 1991	Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Dati I Sumatera Selatan No.23 Th.1990 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakkerja Kantor Pembantu Bupati Kepala Dati II Bangka.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 32 - 36	
59	No.59 Tahun 1991 15 Juli 1991	Pengesahan Perda Prop. Dati I Timor Timur No.08 Th.1990 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakkerja Dinas Pertambangan Prop. Dati I Timor Timur.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 37 - 39	
60	No.60 Tahun 1991 15 Juli 1991	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jawa Barat No.1 Th.1990 ttg Perubahan yang Pertama Perda Dati I Jabar No. 7/Dp.040/ PD/1978 ttg SOTK Dinas Pendapatan Daerah Prop.Dati I Jawa Barat.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 40 - 41	
61	No.61 Tahun 1991 15 Juli 1991	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jabar No.2 Th.1990 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Jabar No.4 Th.1984 ttg Pembentukan, SOTK Cabang Dinas Pendapatan Daerah Prop. Dati I Jawa Barat.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 42 - 44	
62	No.62 Tahun 1991	KOSONG		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
63	No.63 Tahun 1991 17 Juli 1991	Penunjukan Calon PNS Gol.I dan Gol.II Dalam Lingkungan Kantor Pusat Depdagri sebagai Peserta Tambahan Latihan Pra Jabatan yg Bersifat Umum Th.1991/1992.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 45 - 49	
64	No.64 Tahun 1991 20 Juli 1991	Pemeriksaan Pembelian Barang, Jasa dan Pemborongan pekerjaan di Lingk.Depdagri.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 50 - 55	
65	No.65 Tahun 1991 22 Juli 1991	Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 56 - 61	
66	No.66 Tahun 1991 24 Juli 1991	Penetapan Peserta Pendidikan dan Latihan Kader kursus kepemimpinan Pemerintahan dalam Negeri Angkatan V Th.1991/1992.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 62 - 66	
67	No.67 Tahun 1991 3 Agustus 1991	Program Kerja Depdagri Tahun 1991/1992.	-	
68	No.68 Tahun 1991 10 Agustus 1991	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Dokumentasi Budaya Bali Prop.Dati I Bali.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 67 - 74	
69	No.69 Tahun 1991 10 Agustus 1991	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bali No.11 Th.1990 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Dinas Pendidikan Dasar Prop.Dati I Bali	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 75 - 77	
70	No.70 Tahun 1991 10 Agustus 1991	Pengesahan Perda Prop. DI. Aceh No.4 Th.1990 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. DI.Aceh No.5 Th.1980 ttg SOTK Dinas Pendidikan & Kebudayaan Prop. DI. Aceh.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 78 - 80	
71	No.71 Tahun 1991	KOSONG	-	
72	No.72 Tahun 1991	KOSONG	-	
73	No.73 Tahun 1991 14 Agustus 1991	Pencabutan Status Madya dan Muda Praja Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 81 - 85	
74	No.74 Tahun 1991 14 Agustus 1991	Pemilihan Guru Teladan	-	
75	No.75 Tahun 1991 19 Agustus 1991	Pengesahan Perda Prop. D.I.Y No.7 Th.1990 ttg Pembentukan, Organisasi dan Takerja Dinas Pertambangan Prop. D.I.Yogyakarta.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 86 - 88	
76	No.76 Tahun 1991 19 Agustus 1991	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kab./Kotamadya Tipe C Menjadi Kantor Catatan Sipil Kab./Kotamadya Tipe B.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 89 - 96	
77		KOSONG		
78		KOSONG		
79	No.79 Tahun 1991 110/KS.003/MPPT-911	Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi RI.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 97 - 101	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
80-89		KOSONG		
90	No.90 Tahun 1991 10 September 1991	Pembagian dan Prosedur Penyaluran Iuran Hasil Hutan.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 102 - 105	
91	No.91 Tahun 1991 11 September 1991	Pasar Desa	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 106 - 113	Dicabut dg Permen No.42 Th.2007
92	No.92 Tahun 1991 11 September 1991	Pengesahan Peraturan Daerah Prop. Dati I Kalbar ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Di Singkawang dan Sintang.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 114 - 116	
93	No.93 Tahun 1991 19 September 1991	Tata Cara Pengangkatan dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Lampung Barat.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 117 - 130	
94	No.94 Tahun 1991 30 September 1991	Sebutan Wilayah Administrasi, Pemerintah dan Kepala Pemerintahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 131 - 133	
95	No.95 Tahun 1991 27 Oktober 1991	Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/ Daerah pada 15 (limabelas) Kab. Dati II.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 134 - 138	
96	No.96 Tahun 1991 14 Oktober 1991	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jabar No.8 Th.1990 ttg Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Jawa Barat No.5 Th.1981 ttg SOTK Dinas Pariwisata Prop. Dati I Jawa Barat.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 139 - 141	
97	No.97 Tahun 1991 17 Oktober 1991	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 142 - 161	
98	No.98 Tahun 1991 16 Oktober 1991	Penyelenggaraan Wisuda Terpusat Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 1991.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 162 - 167	
99	No.99 Tahun 1991 16 Oktober 1991	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 168 - 180	
100	No.100 Tahun 1991 28 Oktober 1991	Jadwal Retensi Arsip Depdagri.	-	Dicabut dg Permen No.78 Th.2012
101	No.101 Tahun 1991 4 Nopember 1991	Perubahan dan Penambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1991.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 181 - 183	
102	No.102 Tahun 1991 4 Nopember 1991	Organisasi dan Tatakerja Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 184 - 196	
103	No.103 Tahun 1991	KOSONG		
104	No.104 Tahun 1991 4 Nopember 1991	Pencabutan Inmendagri No.16 Th.1984 ttg Hal-hal yang Diajukan di Pengadilan yang Belum atau Sudah Memperoleh Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 197 - 198	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
105	No.105 Tahun 1991 12 Nopember 1991	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng No.1 Th.1989 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 199 - 201	
106	No.106 Tahun 1991 7 Nopember 1991	Pengesahan Perda Tk.I Jawa Barat No.7 Th.1990 ttg Pencabutan Perda Tk.I Jabar No.6 Th.1984 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pariwisata Prop. Dati I Jawa Barat.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 202 - 203	
107	No.107 Tahun 1991 14 Nopember 1991	Penelitian Khusus Bagi Pegawai di Jajaran Departemen Dalam Negeri.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 204 - 234	
108	No.108 Tahun 1991 20 Nopember 1991	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 235 - 242	
109	No.109 Tahun 1991 20 Nopember 1991	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 243 - 250	
110	No.110 Tahun 1991 30 Nopember 1991	Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Wilayah Propinsi.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 251 - 267	
111	No.111 Tahun 1991 30 Nopember 1991	Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya .	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 268 - 282	
112	No.112 Tahun 1991 12 Desember 1991	Pengesahan Peraturan DKI Jakarta No.6 Th.1991 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 283 - 286	
113	No.113 Tahun 1991 12 Desember 1991	Penataan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Pasir Wilayah Utara, Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah pantai dan Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kutai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 287 - 291	
114	No.114 Tahun 1991 16 Desember 1991	Penetapan Peserta Pendidikan & Latihan Kader Kursus Kepemimpinan Pemerintah-an Dalam Negeri Angk.VI Th.1991/1992.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 292 - 294	
115	No.115 Tahun 1991 16 Desember 1991	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 295 - 311	Dicabut dg KMDN No.159 Th.2004
116	No.116 Tahun 1991 16 Desember 1991	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Yogyakarta No. 5 Tahun 1991 ttg Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Dati II Yogyakarta Tahun 1990-2010.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 312 - 318	
117	No.117 Tahun 1991 17 Desember 1991	Pengesahan Perda Prop. DKI.Jakarta No.2 Th.1991 ttg Pembentukan, SOTK Dinas Pertambangan DKI. Jakarta.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 319 - 321	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
118	No.118 Tahun 1991 28 Desember 1991	Data Wilayah Administratif Pemerintahan.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 322 - 325	
119	No.119 Tahun 1991 30 Desember 1991	Pengawasan Terhadap Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam dan yang Berada di Daratan.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 326 - 334	
120	No.120 Tahun 1991 KM.90 Tahun 1991 30 Desember 1991	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Cilacap.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 335 - 346	
121	No.121 Tahun 1991 31 Desember 1991	Biaya Penggunaan Pesawat Foker 27 Milik TNI-AU dan Biaya Operasional.	-	
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1991 3 Januari 1991	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.44 Th.1990 ttg Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kab. Dati II Solok.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 385 - 408	
2	No. 2 Tahun 1991 6 Februari 1991	Pra Pedoman Penyusunan APBD TA.1991/1992.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 385 - 408	
3	No. 3 Tahun 1991 14 Februari 1991	Koordinasi, Pengawasan dan Pengamanan Harga Dasar Gabah dan Palawija.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 409 - 411	
4	No. 4 Tahun 1991 4 Maret 1991	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek proyek Pembangunan TA. 1991/1992 di Jajaran Departemen Dalam Negeri.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 412 - 414	
5	No. 5 Tahun 1991 25 Maret 1991	Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan dg Pola PIR.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 415 - 424	
6	No. 6 Tahun 1991 25 Maret 1991	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Perencanaan Umum Depdagri TA.1991/1992.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 425 - 426	
7	No. 7 Tahun 1991 28 Maret 1991	Penyempurnaan Instruksi Mendagri No.26 Th.1984 ttg Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 427 - 445	
8	No. 8 Tahun 1991 6 April 1991	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permendagri No.1 Th.1991 ttg Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Depdagri, Pejabat Wilayah/ Daerah & Kepala Desa/Kepala Kelurahan.	-	*
9	No. 9 Tahun 1991 6 April 1991	Pelaksanaan Penataran P4 Di Daerah Seluruh Indonesia TA.1991/1992.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 426 - 458	
10	No.10 Tahun 1991 14 April 1991	Alokasi Bantuan Dana Penyelenggaraan APDN yang Bersifat Nasional dari APBD Propinsi Dati I TA.1991/1992.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 459 - 462	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
11	No.11 Tahun 1991	Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dlm Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.	-	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
12	No.12 Tahun 1991	Hubungan Kerja Antara Kepala Desa/ Kepala Kelurahan Dengan Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan, LMD dan Organisasi Kemasyarakatan.	-	Dicabut dg Permen No.4 Th.1999
13	No.13 Tahun 1991 20 Juni 1991	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Subsid/Bantuan Pengembangan dan Pemilihan Obyek Pariwisata Daerah.	Himp.PPU-DDN 1991 Hal.: 463 - 467	
14	No.14 Tahun 1991 1 Juli 1991	Tata Cara Penangaan Naskah Dinas Rahasia Di Jalan Depdagri.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 347 - 357	
15	No.15 Tahun 1991 14 Agustus 1991	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kesatrian Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 358 - 376	
16	No.16 Tahun 1991 2 September 1991	Tata Cara Penilaian Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Depdagri.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 377 - 380	
17	No.17 Tahun 1991 5 September 1991	Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 1991 ttg Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Barat.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 381 - 385	
18	No.18 Tahun 1991 10 September 1991	Peningkatan Kemandirian, Kualitas dan Kemampuan Organisasi Kekuatan Sosial Politik.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 386 - 393	
19	No.19 Tahun 1991 10 September 1991	Peningkatan Kemandirian dan Kemampuan Organisasi Kemasyarakatan.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 394 - 400	
20	No.20 Tahun 1991 28 Oktober 1991	Pemasyarakatan Bahasa Indonesia Dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 401 - 415	
21	No.21 Tahun 1991 28 Oktober 1991	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.53 Th.1991 ttg Pembentukan Kota Administratip Watampone.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 416 - 420	
22	No.22 Tahun 1991 28 Oktober 1991	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.54 Th.1991 ttg Pembentukan Kota Administratip Banjar.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 421 - 424	
23	No.23 Tahun 1991 4 Nopember 1991	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 425 - 427	
24	No.24 Tahun 1991 4 Desember 1991	Tugas Bagi Jajaran Pertahanan Sipil Dalam Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1992.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 428 - 459	
25	No.25 Tahun 1991 12 Desember 1991	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.62 Th.1991 ttg Pembentukan Kota Administratip Rantau Prapat.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 460 - 464	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
26	No.26 Tahun 1991 12 Desember 1991	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1991 ttg Pembentukan Kota Administratip Langsa.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 465 - 469	
27	No.27 Tahun 1991 12 Desember 1991	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1991 ttg Pembentukan Kota Administratip Pagar Alam.	Himp.(II) PPU-DDN 1991 Hal.: 470 - 474	
<b>TAHUN 1992</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1992 15 Februari 1992	Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.	Himp. KMDN 1993 Hal.: 1 - 6	Dicabut dg Permen No.3 Th.2008
2	No. 2 Tahun 1992 22 Februari 1992	Lembaga Musyawarah Kota di Kotamadya dalam Wilayah/ Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Himp. KMDN 1993 Hal.: 7 - 11	Dicabut dg Kepmen No.3 Th.2002
3	No. 3 Tahun 1992 17 Mei 1992	Pedoman Penyusunan Perda ttg Rumah Susun.	Himp. KMDN 1993 Hal.: 12 - 21	
4	No. 4 Tahun 1992 23 Juni 1992	Pemeriksaan Masa Jabatan Gubernur KDH Tk.I & Bupati/Walikota madya KDH. Tk.II.	Himp. KMDN 1993 Hal.: 22 - 25	
5	No. 5 Tahun 1992 29 Juni 1992	Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kaw. Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin UU Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yg Berlokasi di Daerah Kawasan Industri.	Himp. KMDN 1993 Hal.: 26 - 32	Dicabut dg Permen No.7 Th.1993
6	No. 6 Tahun 1992 29 Juni 1992	Iuran Pelayanan Irigasi.	Himp. KMDN 1993 Hal.: 33 - 40	
7	No. 7 Tahun 1992 6 Juli 1992	Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin UU Gangguan (UUG) HO Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri.	Himp.II KMDN 1993 Hal.: 1 - 6	Dicabut dg Permen No.7 Th.1993
8	No. 8 Tahun 1992	Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah Dengan UU No.7 Th.1992 Tentang Perbankan.	L L : 5 hal	Diubah dg Permen No.1 Th.1999
9	No. 9 Tahun 1992 31 Juli 1992	Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.	Himp.II KMDN 1993 Hal.: 7 - 12	
10	No.10 Tahun 1992 31 Juli 1992	Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah.	Himp.II KMDN 1993 Hal.: 13 - 17	Dicabut dg Permen No.6 Th.1996
11	No.11 Tahun 1992 30 Oktober 1992	Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.	Himp.II KMDN 1993 Hal.: 18 - 23	Dicabut dg Kepmen No.10 Th.2002
12	No.12 Tahun 1992 30 Desember 1992	Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.	Himp.II KMDN 1993 Hal.: 24 - 34	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
	<b>KEPMENDAGRI</b>			
1	No. 1 Tahun 1992 02 Januari 1992	Pedoman Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tk.I & Sekretariat DPRD Tk.I.	L L : 55 hal Lamp : 4 hal	
2	No. 2 Tahun 1992 04 Tahun 1992	Asisten Sekretaris Wilayah /Daerah pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kotamadya Dati II.	L L : 3 hal Lamp : 1 hal	
3	No. 3 Tahun 1992 11 Januari 1992	Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk.	L L : 3 hal Lamp : 6 hal	Dicabut dg KMDN No.42Th.2001
4	No. 4 Tahun 1992 11 Januari 1992	Pemberian Keringanan thd Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Penyerahan kedua dan Sterusnya dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat.	L L : 3 hal	
5	No. 5 Tahun 1992 13 Januari 1992	Pengesahan Perda Kotamadya Dati II Pontianak No.09 Th.1987 ttg Revisi Rencana Induk Kota Pontianak.	L L : 4 hal	
6	No. 6 Tahun 1992 13 Januari 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No.2 Th.1989 ttg SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Dati I NTB.	L L : 2 hal	
7	No. 7 Tahun 1992 16 Januari 1992	Pengesahan Perda Prop.Dati I Jateng No.4 Th.1989 ttg SOTK Rumah Sakit Kusta Daerah Prop. Dati I Jawa Tengah.	L L : 5 hal	
8	No. 8 Tahun 1992 15 Januari 1992	Pedoman Pembentukan Cabang Dinas Pendapatan Dati II di 5 Kota Administratif.	L L : 3 hal	
9	No. 9 Tahun 1992 23 Januari 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumsel No.7 Th.1991 ttg Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Prop. Dati I Sumatera Selatan.	L L : 3 hal	
10	No.10 Tahun 1992 23 Januari 1992	Pedoman Pemeriksaan Reguler Aparat Pengawasan fungsional di jajaran Depdagri.	L L : 4 hal	
11	No.11 Tahun 1992 25 Januari 1992	Pengesahan Perda Kab. Dati II Bandung No.12 Th.1990 ttg Rencana Umum Tata Ruang Kota Soreang Th.1989 s/d 2009.	L L : 5 hal	
12	No.12 Tahun 1992 25 Januari 1992	Pengesahan Perda Kab. Dati II Bandung No.13 Th.1990 ttg Rencana Detail Tata Ruang Kota Soreang Th.1989 s/d 2009.	L L : 4 hal	
13	No.13 Tahun 1992 25 Januari 1992	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Nusa Tenggara Timur.	L L : 6 hal Lamp : 1 hal	
14	No.14 Tahun 1992 25 Januari 1992	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Sumatera Selatan.	L L : 6 hal Lamp : 1 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
15	No.15 Tahun 1992 25 Januari 1992	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Jatim.	L L : 6 hal Lamp : 1 hal	
16	No.16 Tahun 1992 25 Januari 1992	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Prop. Dati I Jawa Tengah.	L L : 8 hal Lamp : 1 hal	
17	No.17 Tahun 1992	KOSONG		
18	No.18 Tahun 1992 25 Januari 1992	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepatguna di Pedesaan.	L L : 5 hal	
19	No.19 Tahun 1992 27 Januari 1992	Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I.	L L : 9 hal Lamp. : 4 hal	
20	No.20 Tahun 1992 12 Februari 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jabar No.2 Th.1991 ttg Pembentukan Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Jawa Barat.	L L : 2 hal	
21	No.21 Tahun 1992 12 Februari 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jabar No.3 Th.1991 ttg Organisasi & Tatakerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Jawa Barat.	L L : 5 hal	
22-23		KOSONG		
24	No.24 Tahun 1992 17 Februari 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jabar No.21 Th.1990 ttg Perubahan Pertama Perda Prov. Dati I Jabar No.12 Th.1988 ttg Organisasi dan Tatakerja Pertambangan Daerah Prop. Dati I Jawa Barat.	L L : 3 hal	
25	No.25 Tahun 1992 18 Februari 1992	Pembentukan Asisten Sekretaris Wilayah/ Daerah pada 13 (tiga belas) Kabupaten Dati.II.	L L : 3 hal Lamp : 1 hal	
26	No.26 Tahun 1992 24 Februari 1992	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Tim Pembina Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia.	L L : 2 hal Lamp : 1 hal	
27	No.27 Tahun 1992 27 Februari 1992	Pengesahan Program Kerja dan rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tim Pembina Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Th.1992.	L L : 2 hal Lamp : 1 hal	
28	No.28 Tahun 1992 02 Maret 1992	Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kab./Kodya Dati II dan Sekretariat DPRD Dati II.	L L : 25 hal Lamp : 14 hal	
29	No.29 Tahun 1992 14 Maret 1992	Pedoman Tata cara Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi Proyek proyek PMA dan PMDN di Daerah.	L L : 5 hal	
30	No.30 Tahun 1992 15 Maret 1992	Pemeliharaan Daftar Pemilihan tetap/Daftar Pemilih Tambahan & Kartu Pemilih setelah selesai Penyelenggaraan Pemilu.	L L : 5 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
31	No.31 Tahun 1992 20 Maret 1992 Km. 9 Taun 1992	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Tarakan (SKB Mendagri dan Menteri Perhubungan)	L L : 6 hal Lamp : 2 hal	
32	No.32 Tahun 1992 20 Maret 1992 Km. 10 Tahun 1992	Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kerja Kepentingan Pelabuhan Samarinda (SKB Mendagri dan Menteri Perhubungan )	L L : 8 hal Lamp : 2 hal	
33	No.33 Tahun 1992 20 Maret 1992	Pedoman Penyusunan Perda Rencana Struktur Tata Ruang Prop. Dati I dan Rencana Tata Ruang Kab. Dati II.	L L : 5 hal	
34	No.34 Tahun 1992 21 Maret 1992	Pengesahan Perda DKI Jakarta No.13 Th.1991 ttg Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengelola Monumen Nasional DKI Jakarta.	L L : 3 hal	
35	No.35 Tahun 1992 23 Maret 1992	Pedoman Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Daerah Prop. Dati I Sumut.	L L : 6 hal Lamp : 1 hal	
36	No.36 Tahun 1992 23 Maret 1992	Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota DPRD TK.I dan Anggota DPRD Tk.II yang Berhenti Antar Waktu.	L L : 16 hal Lamp I : 2 hal Lamp II : 2 hal	Dicabut dg KMDN No.13 Th.2000
37	No.37 Tahun 1992 25 Maret 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati.I Sultra No.4 Th.1989 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Prop. Dati I Sultra.	L L : 3 hal	
38	No.38 Tahun 1992 26 Maret 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bali No.6 Th.1990 ttg Pembentukan Organisasi & Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Prop.Dati I Bali.	L L : 3 hal	
39	No.39 Tahun 1992 30 Maret 1992	Pedoman Organisasi Dinas Daerah.	L L : 7 hal	
40	No.40 Tahun 1992 11 April 1992	Pedoman Penilaian Atas Hasil Karya Prop. Dati I dalam Pelaksanaan Pelita V bagi Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha.	L L : 3 hal Lamp : 11 hal	
41	No.41 Tahun 1992 13 April 1992	Penutupan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Dua Puluh Propinsi Dati I.	L L : 3 hal	
42	No.42 Tahun 1992 04 Mei 1992	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Bengkulu .	L L : 6 hal Lamp : 1 hal	
43	No.43 Tahun 1992 13 Mei 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sumsel No.9/1991 ttg SOTK Dinas Pertambangan Prop. Dati I Sumatera Selatan.	L L : 2 hal	
44	No.44 Tahun 1992 10 Mei 1992	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kab. Tipe C menjadi Kantor Catatan Sipil Kab. Tipe B.	L L : 13 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
45	No.45 Tahun 1992 26 Mei 1992	Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Depdagri.	L L : 3 hal	
46	No.46 Tahun 1992 04 Juni 1992	Pedoman dan Tata Kerja Penetapan Wilayah Terpencil.	L L : 4 hal	Dicabut dg KMDN No.183 Th.1996
47	No.47 Tahun 1992 04 Juni 1992	Penetapan Wilayah Terpencil di Prop. Dati.I Irian Jaya.	L L : 2 hal Lamp : 3 hal	Diubah dg KMDN No.95 Th.1992
48	No.48 Tahun 1992 1 April 1992	(Kep. Ber. Mendagri, Mendikbud dan Menkeu) ttg Penetapan Besarnya Subsidi/ Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Tahun 1992/1993.	L L : 4 hal Lamp : 2 hal	
49	No.49 Tahun 1992 25 Juni 1992	Petunjuk Operasional Pemeriksaan Masa Jabatan Gubernur Kepala Dati.I & Bupati/ Walikotaamadya Kepala Daerah Tk.II.	L L : 4 hal	
50	No.50 Tahun 1992 1 Juli 1992	Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi.	L L : 6 hal	
51	No.51 Tahun 1992 06 Juli 1992	Pedoman Pembentukan 3 (tiga) Wilayah Kerja Pembantu Bupati di Kabupaten Aceh Barat dalam Wilayah Prop. DI. Aceh.	L L : 3 hal	
52	No.52 Tahun 1992 06 Juli 1992	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Sulawesi Utara.	L L : 6 hal Lamp : 1 hal	
53	No.53 Tahun 1992 06 Juli 1992	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Riau.	L L : 6 hal Lamp : 1 hal	
54	No.54 Tahun 1992 07 Juli 1992	Pembentukan Pusat Pengolahan Data Departemen Dalam Negeri.	L L : 7 hal Lamp : 1 hal	
55	No.55 Tahun 1992 10 Juli 1992 <b>0303/P/1992</b> <b>KP/SK.059A/92/01</b> <b>100/1992</b>	Keputusan Bersama Mendagri, Mendikbud, Menlu, Menag dan Menpan ttg Pemilihan Guru Teladan Th.1992 dan Pembentukan Panitia Nasional Pemilihan Guru Teladan Th.1992.	L L : 5 hal Lamp : 9 hal	
56	No.56 Tahun 1992 10 Juli 1992	Pedoman Pembentukan OSTK Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Kalimantan Barat.	L L : 6 hal Lamp : 1 hal	
57	No.57 Tahun 1992 17 Juli 1992	Program Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 1992/1993.	L L : 2 hal	
58	No.58 Tahun 1992 25 Juli 1992	Pengesahan Perda Prov. Dati.I Irja No.8 Th.92 ttg Pembentukan SOTK Kantor Arsip Daerah Prov. Dati I Irja.		
59	No.59 Tahun 1992 27 Juli 1992	Penegasan Batas Wilayah antara Prov. Dati I Sulut dg Propinsi Dati.I Sulawesi Tengah.	L L : 2 hal	
60	No.60 Tahun 1992 27 Juli 1992	Penyelenggaraan Kursus Bendaharawan Daerah di Lingk. Pemerintah Dati I dan Dati II.	L L : 3 hal Lamp : 14 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
61	No.61 Tahun 1992 31 Juli 1992	Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD	L L : 17 hal	Diubah dg KMDN No.133 Th.1996 Dicabut dg KMDN No.59 Th.1999
62	No.62 Tahun 1992 31 Juli 1992	Pedoman tunjangan tetap bagi Ketua, Anggota & Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah.	L L : 3 hal	
63	No.63 Tahun 1992 06 Agustus 1992	Pembentukan Tim Penilai Jabatan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan di Lingk. Badan Litbang Depdagri.	L L : 2 hal Lamp : 1 hal	
64	No.64 Tahun 1992 13 Agustus 1992	Pengesahan Perda Prov. Dati I Sulsel No.6 Th.1992 ttg SOTK Sekretariat Wil Daerah dan/Sekretariat DPRD Tk.I Sulsel.		
65	No.65 Tahun 1992 13 Agustus 1992	Keputusan Bersama Mendagri dan Menhub tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pangkal Balam, Muntok, Blinyu dan Sungai Selatan.	L L : 12 hal	
66	No.66 Tahun 1992 13 Agustus 1992	Jadwal Waktu dan Program Kerja dlm rangka Penelitian/Penilaian utk Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V.	L L : 7 hal	
67	No.67 Tahun 1992 15 Agustus 1992 <b>0323/P/1992</b> <b>KP/SK.088/92/01</b> <b>189 Tahun 1992</b>	Keputusan Bersama Mendagri, Mendikbud, Menlu, Menag dan Menpan ttg Penetapan Guru Teladan Tahun 1992.	L L : 5 hal Lamp : 15 hal	
68	No.68 Tahun 1992 15 Agustus 1992	Tanda Penghargaan Berupa Astha Brata Bagi Lulusan Terbaik STPDN.	L L : 3 hal Lamp : 4 hal	
69	No.69 Tahun 1992 15 Agustus 1992	Ikrar Pamong	L L : 2 hal	
70	No.70 Tahun 1992 15 Agustus 1992	Hymne Abdi Praja Dharma Satyanagara Bhakti	L L : 2 hal Lamp : 2 hal	
71	No.71 Tahun 1992 15 Agustus 1992 669/MENKES/SKB/ VIII/92/107/1992	Kepber Mendagri, Menkes, dan Menpan ttg Kenaikan Pangkat Istimewa Dokter dan Paramedis Teladan Puskesmas Tahun 1992.	L L : 3 hal	
72	No.72 Tahun 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bali No.7/92 ttg Pembentukan Org. d& Tatakerja Kantor Dokumentasi Budaya Bali Prop. Dati.I Bali.	L L : 2 hal	
73	No.73 Tahun 1992 18 Agustus 1992	Pedoman Tarif Retribusi Bahan Galian Gol.C	L L : 2 hal Lamp : 2 hal	
74	No.74 Tahun 1992 21 Agustus 1992	Pemberian Penghargaan Astha Brata kepada Wisudawan Terbaik STPDN.	L L : 2 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
75	No.75 Tahun 1992 28 Agustus 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Riau No.11 Th.1992 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tk.I Riau dan Sekretariat DPRD Prop. Dati.I Riau.	L L : 2 hal	
76	No.76 Tahun 1992 28 Agustus 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kaltim No.02 Th.1992 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tk.I dan Sekretariat DPRD Prop. Dati.I Kaltim.	L L : 2 hal	
77	No.77 Tahun 1992 28 Agustus 1992	Pengesahan Perda Prop.Dati I Lampung No.7 Th.1992 ttg SOTK Sekwil./ Dati.I Lampung & Sekretariat DPRD Prop. Dati.I Lampung.	L L : 2 hal	
78	No.78 Tahun 1992 28 Agustus 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulut No.2 Th.1992 ttg SOTK Sekretariat Wilayah/ Daerah Tk.I Sulut dan Sekretariat DPRD Prop. Dati I Sulawesi Utara.	L L : 2 hal	
79	No.79 Tahun 1992 28 Agustus 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bengkulu No.6/92 ttg SOTK Sekretariat Wilayah/Dati.I Bengkulu & Set.DPRD Prop. Dati.I Bengkulu.	L L : 2 hal	
80	No.80 Tahun 1992 29 Agustus 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Jambi No.2 Th.1992 ttg SOTK Sekretariat Wil./ Dati.I Bengkulu & Set.DPRD Prop. Dati.I Bengkulu.	L L : 2 hal	
81	No.81 Tahun 1992 29 Agustus 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Aceh No.7 Th.1992 ttg Sekwilda Prov. DI.Aceh dan Set DPRD Prov. DI.Aceh..	L L : 2 hal	
82	No.82 Tahun 1992 05 September 1992	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Arsip Daerah Prop. Dati I Sulawesi Tenggara.	L L : 6 hal Lamp : 1 hal	
83	No.83 Tahun 1992 07 Spetember 1992	Penyelenggaraan Orientasi Bidang Tugas Anggota DPRD Tk.I dan Anggota DPRD Tk.II Hasil Pemilihan Tahun 1992.	L L : 3 hal Lamp : 3 hal	
84	No.84 Tahun 1992 23 September 1992	Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perda ttg Rencana Kota.	L L : 8 hal	
85	No.85 Tahun 1992	BATAL		
86	No.86 Tahun 1992 29 September 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irja No.2 Th.1992 ttg SOTK Sekwilda Tk.I Irja dan Sekretariat DPRD Prov. Dati I Irja.		
87	No.87 Tahun 1992 28 September 1992	Pembentukan Tim Rekomendasi Pengesahan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) Tahun 1992	L L : 2 hal Lamp : 1 hal	
88	No.88 Tahun 1992 29 September 1992	Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kelembagaan / Institusi DPUK Dati.II Tahun Anggaran 1992/1993.	L L : 4 hal Lamp : 2 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
89	No.89 Tahun 1992 5 Oktober 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Irja No.2 Th.1992 ttg SOTK Sekwilda Tk.I Irja dan Sekretariat DPRD Prov. Dati I Irja.		
90	No.90 Tahun 1992 5 Oktober 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalteng No.5 Th.1992 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Prop. Dati I Kalimantan Tengah.	L L : 2 hal	
91	No.91 Tahun 1992 14 Oktober 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTB No.6 Th.1992 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tk.I NTB dan Sekretariat DPRD Prov. Dati I NTB.	L L : 2 hal	
92	No.92 Tahun 1992 13 Oktober 1992	Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.		Dicabut dg Kepmen No.99 Th.1999
93	No.93 Tahun 1992 13 Oktober 1992	Kriteria Pembentukan Jabatan Wakil Kepala Dinas Daerah Khusus Ibukota Jakarta	L L : 2 hal Lamp : 2 hal	
94	No.94 Tahun 1992 13 Oktober 1992	Bantuan Biaya Masjid Jami'at Taqwa di Kompleks Kostrad Jakarta Selatan.		
95	No.95 Tahun 1992 19 Oktober 1992	Penambahan Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Th.1992.	L L : 2 hal Lamp : 1 hal	
96	No.96 Tahun 1992 19 Oktober 1992	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kab./Kotamadya Tipe C menjadi Kantor Catatan Sipil Kab./Kotamadya Tipe B.	L L : 2 hal Lamp I : 1 hal Lamp II : 1 hal	
97	No.97 Tahun 1992 26 Oktober 1992	Keputusan Bersama Menkeu, Mendagri dan Ka. BAKN ttg Tatacara Pelaksanaan Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wilayah Terpencil.	L L : 7 hal	
98	No.98 Tahun 1992 28 Oktober 1992	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Depdagri.		Dicabut dg KMDN-OD No.25 Th.2001
99	No.99 Tahun 1992 28 Oktober 1992	Tata Naskah Dinas di Lingk. Pemerintah Propinsi Tk.I.		Dicabut dg KMDN No.42 Th.1998
100	No.100 Tahun 1992 28 Oktober 1992	Tata Naskah Dinas di Lingk. Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tk.II.		Dicabut dg KMDN No.43 Th.1998
101	No.101 Tahun 1992 28 Oktober 1992	Tata Naskah Dinas di Lingk. Pemerintah Kecamatan.		Dicabut dg KMDN No.44 Th.1998
102	No.102 Tahun 1992 28 Oktober 1992	Tata Naskah Dinas di Lingk. Pemerintah Desa/Kelurahan.		Dicabut dg KMDN No.45 Th.1998
103	No.103 Tahun 1992 28 Oktober 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Kalsel No.10 Th.1992 ttg SOTK Sekwilda Tk.I dan Sekretariat DPRD Prov. Dati I Kalsel.		

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
104	No.104 Tahun 1992 28 Oktober 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sultra No.8 Th.1992 ttg SOTK Sekwilda Tk.I dan Sekretariat DPRD Dati I Sultra.		
105	No.105 Tahun 1992 28 Oktober 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Timtim No.2 Th.1992 ttg perubahan pertama kali atas Perda Prov. Dati I Timtim No.7 Th.85 ttg SOTK Sekwilda Tk.I Prov. Dati I Timtim dan Sekretariat DPRD Dati I Timtim.		
106	No.106 Tahun 1992 30 Oktober 1992	Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan & Tatalaksana Pembangunan Daerah bagi Aparatus Perencana di Lingkungan Dati II dan Kecamatan.	L L : 4 hal	
107	No.107 Tahun 1992 12 Nopember 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No.5 Th.1992 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sek. Wilayah/Daerah Prop. Dati.I NTT.	L L : 2 hal	
108	No.108 Tahun 1992 12 Nopember 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I NTT No. 6 /1992 ttg Organisasi & Tatakerja Sekretariat DPRD Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur.	L L : 1 hal	
109	No.109 Tahun 1992 12 Nopember 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Sulteng No.10 Th.92 ttg Org. & Tata Kerja Set. Wil. /Dati.I Sulteng & Set. DPRD Prop. Dati.I Sulteng.	L L : 4 hal	
110	No.110 Tahun 1992 16 Nopember 1992	Pengesahan Perda Prop. Dati I Bali No.6 Th.1992 ttg SOTK Sekwilda Tk.I Bali dan Sekretariat DPRD Prov. Dati I Bali.		
111	No.111 Tahun 1992 21 Nopember 1992	Penegasan Batas Wilayah antara Prop. Dati I Sumatera Utara dg Prop. DI Aceh.	L L : 3 hal	
112	No.112 Tahun 1992 01 Desember 1992	Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Penerangan Jalan Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	L L : 7 hal Lamp : 1 hal	
113	No.113 Tahun 1992 01 Desember 1992	Pengesahan Perda DKI. Jakarta No.10/92 ttg SOTK Sekwilda DKI Jakarta dan Sekretariat DPRD DKI Jakarta.		
114	No.114 Tahun 1992 07 Desember 1992	Penetapan Batas Baru Secara Pasti antara Wil. Kotamadya Dati II Binjai, Kab. Dati II Langkat dan Kab. Dati II Deli Serdang.	L L : 12 hal	
115	No.115 Tahun 1992 08 Desember 1992 KEP-564/MEN/92	Keputusan Bersama Mendagri Menaker ttg Dewan Ketenagakerjaan Daerah.	L L : 5 hal Lamp. : 12 hal	
116	No.116 Tahun 1992 08 Desember 1992	Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palembang dari Tipe B Menjadi Tipe A.	L L : 2 hal Lamp : 1 hal	
117	No.117 Tahun 1992 10 Desember 1992	Biaya Pelayanan Catatan Sipil.	L L : 8 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
118	No.118 Tahun 1992 28 Desember 1992	Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1993.	L L : 3 hal	
<b>INMENDAGRI</b>				
1	No. 1 Tahun 1992 11 Januari 1992	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Harga Dasar Gabah.	L L : 3 hal	
2	No. 2 Tahun 1992 28 Januari 1992	Pelaksanaan Kepmendagri No. 973-161 Th.1991 ttg Perimbangan Pembagian Hasil Pungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi, Iuran Eksploitasi dari Pemegang Kuasa Pertambangan Swasta Nasional.	L L : 3 hal	
3	No. 3 Tahun 1992 28 Januari 1992	Pelaksanaan Kepmendagri No.102/1991 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.	L L : 4 hal	
4	No. 4 Tahun 1992 11 Februari 1992	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Subsidi Bantuan Pengembangan dan Pemeliharaan Obyek Pariwisata Daerah.	L L : 3 hal	
5	No. 5 Tahun 1992 06 Maret 1992	Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik.	L L : 3 hal	
6	No. 6 Tahun 1992 16 Maret 1992	Pelaksanaan Penataran P4 di Daerah Seluruh Indonesia TA 1992/1993.	L L : 4 hal Lamp : 7 hal	
7	No. 7 Tahun 1992 19 Maret 1992	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan TA.1992/1993 di Lingkungan Depdagri.		*
8	No. 8 Tahun 1992 13 April 1992	Penyelenggaraan Kursus Manajemen Proyek Bagi Pemimpin Proyek di Jaringan Depdagri dan Pemerintah Daerah.		*
9	No. 9 Tahun 1992 12 Mei 1992	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Perencanaan Umum Depdagri TA.1992/1993.		*
10	No.10 Tahun 1992 15 Mei 1992	Pembinaan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Daerah.	L L : 2 hal	
11	No.11 Tahun 1992 15 Mei 1992	Pelaksanaan Kepmendagri No.1 Th.1992 ttg Pedoman Organisasi & Tata kerja Sekretariat Wilayah Dati.I dan Sekretariat DPRD Tk.I.	L L : 3 hal Lamp : 6 hal	
12	No.12 Tahun 1992 15 Mei 1992	Alokasi Penyertaan Modal Pemda pada Yayasan Purna Bahkti dari APBD Kabupaten/ Kotamadya Dati II TA.1992/1993.	L L : 2 hal Lamp : 33 hal	
13	No.13 Tahun 1992 18 Mei 1992	Pembentukan Panitia Peneliti Pemberian Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V Tingkat Prop.Dati.I.	L L : 2 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
14	No.14 Tahun 1992 03 Mei 1992	Kartu Induk Pemerintah Desa/Kelurahan dan Sistem Pendataan Melalui Program Komputerisasi.	L L : 3 hal Lamp : 3 hal	Dicabut dg Inmen No.23 Th.1996
15	No.15 Tahun 1992 27 Mei 1992	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian (SBBO-PP).	L L : 3 hal Lamp : 4 hal	
16	No.16 Tahun 1992 27 Juni 1992	Penggunaan Dana Subsidi/Bantuan Pengembangan Usaha Penambangan Daerah (SBP-UPD) Program Pemetaan Bahan Galian Golongan C.	L L : 2 hal Lamp : 5 hal	
17		KOSONG		*
18	No.18 Tahun 1992 03 Juli 1992	Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No.19 Th.1992 ttg Organisasi dan Tatakerja Diklat Propinsi Dati I.	L L : 3 hal	
19	No.19 Tahun 1992 03 Juli 1992	Pelaksanaan Kepmendagri No.50 Th.1992 ttg Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi.	L L : 3 hal	
20	No.20 Tahun 1992 26 Juli 1992	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kesatriaan APDN yang Bersifat Nasional di Jatinangor Jawa Barat Tahun Anggaran 1992/1993.	L L : 2 hal	
21	No.21 Tahun 1992 13 Juli 1992	Pelaksanaan Keputusan Mendagri No.115 Th.1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kelurahan.	L L : 3 hal	
22	No.22 Tahun 1992 23 Juli 1992	Pelaks. Kepmendagri No.8 Th.1992 ttg Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan UU No.7 Th.1992.	L L : 2 hal	
23	No.23 Tahun 1992 29 Juli 1992	Petunjuk Pelaksanaan UU No.1 Th.1992 ttg Pembentukan Kotamadya Dati.II Denpasar.	L L : 4 hal	
24		KOSONG		
25	No.25 Tahun 1992 31 Juli 1992	Susunan Pimpinan DPRD Tk. I dan DPRD Tk.II.	L L : 3 hal Lamp : 2 hal	
26	No.26 Tahun 1992 14 Agustus 1992	Perubahan Status Tanah Bengkok dan yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa.	L L : 6 hal	
27	No.27 Tahun 1992 31 Agustus 1992	Peningkatan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pertimbangan Daerah.	L L : 2 hal Lamp : 3 hal	
28	No.28 Tahun 1992 24 September 1992	Pengamanan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 1993.	L L : 2 hal	
29	No.29 Tahun 1992 30 September 1992	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Pos Pedesaan.	L L : 2 hal Lamp : 4 hal	

No.	NOMOR/TGL PERATURAN	TENTANG	SUMBER	STATUS
30	No.30 Tahun 1992 7 Nopember 1992	Petunjuk Operasional Pelaksanaan Crassh Program Pembenahan Aparatur Prop. Timor Timur Th.1992/1993.	L L : 2 hal Lamp : 4 hal	
31	No.31 Tahun 1992 9 Nopember 1992	Pelaksanaan Peraturan Mendagri No.2 Th.1992 ttg Lembaga Musyawarah Kota madya dalam Wilayah DKI. Jakarta.	L L : 2 hal Lamp : 4 hal	Dicabut dg Kepmen No.3 Th.2002
32	No.32 Tahun 1992 12 Nopember 1992	Pelaksanaan Kepmendagri No.28 Th.1992 ttg Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/ Kotamadya Tk. II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk. II.	L L : 3 hal Lamp : 6 hal	
33	No.33 Tahun 1992 16 Nopember 1992	Petunjuk Operasional Pembinaan Hansip Irian Jaya Th.1992/1993.		*
34	No.34 Tahun 1992 1 Desember 1992	Jadwal Retensi Arsip	L L : 3 hal	
35	No.35 Tahun 1992 7 Desember 1992	Pelaksanaan PP No.69/1992 ttg Perubahan Batas Wilayah Kotamadya DaTI.II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tk.II Semarang.	L L : 4 hal	
36	No.36 Tahun 1992 7 Desember 1992	Penyelenggaraan Geladi Bina Praja dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.	L L : 2 hal Lamp : 1 hal	
<b>TAHUN 1993</b>				
<b>PERMENDAGRI</b>				
1.	No.1 Tahun 1993 13 Pebruari 1993	Pedoman Klasemen Bioskop & Tarip Pajak atas Pertunjukan & Keramaian Umum untuk Pertunjukan Film di Bioskop.	Himp. KMDN 1993	
2.	No.2 Tahun 1993 19 Pebruari 1993	Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban di Wilayah		Dicabut dg Permen No.1 Th.2000
3.	No.3 Tahun 1993 3 Maret 1993	Pencabutan Permendagri No.1 Th.1981 ttg SOTK Pemerintah Desa & Perangkat Desa.		
4.	No.4 Tahun 1993 24 Agustus 1993	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.		Dicabut dg Permen No.2 Th.2000
5.	No.5 Tahun 1993 9 September 1993	Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah		Dicabut dg Permen No.4 Th.1998
6.	No.6 Tahun 1993 12 Oktober 1993	Pencabutan Permendagri No.14 Th. 1974 ttg Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Th.1983 ttg Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.		
7.	No.7 Tahun 1993 23 Oktober 1993	Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri		

